

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2024**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BANJARBARU
2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan ini. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dilengkapi dengan berbagai data dan perbandingan, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pelaporan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

Akhirnya disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 ini. Saran dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang sangat diperlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Banjarmaru, Januari 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Selatan

RUSDI HARTONO, S.Pi., MP.
NIP. 197204261997031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2023. **Laporan Kinerja pada IKU RPJMD dan IKU Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.** Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru.

Laporan ini disusun sebagai bahan untuk mendukung penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pencapaian realisasi IKU terhadap target yang ditetapkan tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Realisasi IKU Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 99,57% (Sangat Memuaskan)
- 2) Realisasi IKU Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 93,85% (Sangat Memuaskan)
- 3) Realisasi IKU Angka Konsumsi Ikan mencapai 102% (Sangat Memuaskan)
- 4) Realisasi IKU Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi mencapai 128,31% (Sangat Memuaskan)
- 5) Realisasi IKU Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku mencapai 100% (Sangat Memuaskan)
- 6) Realisasi IKU Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 103% (Sangat Memuaskan)
- 7) Realisasi IKU Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan mencapai 100% (Sangat Memuaskan)

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai **KOMITMEN** untuk terus berupaya membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja yang dipahami dan diterapkan diseluruh unit dan aparatur penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh aparatur berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas atas segala beban tugas yang diberikan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Bumi Lambung Mangkurat.

Kata Kunci: *Laporan Kinerja Tahun 2023, IKU RPJMD dan IKU Kepala Dinas, Komitmen.*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	2
C. Struktur Organisasi	10
D. Isu Strategis SKPD	13
E. Sistematika Penyajian	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	37
1. Sasaran RPJMD	39
2. Eselon II Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kal-Sel	70
3. Eselon III Bidang Pengelolaan Ruang Laut	96
4. Eselon IV Lingkup Bidang Pengelolaan Ruang Laut	105
5. Eselon III Bidang Perikanan Tangkap	122
6. Eselon IV Lingkup Bidang Perikanan Tangkap	131
7. Eselon III Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	150
8. Eselon IV Lingkup Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	159
9. Eselon III Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	199

10.	Eselon IV Lingkup Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	208
11.	Eselon III Sekretariat	223
12	Eselon IV Lingkup Sekretariat	228
B.	Akuntabilitas Keuangan	235
1.	Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023	235
2.	Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program Tahun 2023	237
3.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	237
BAB IV.	PENUTUP	244
A.	Kesimpulan	244
B.	Strategi Peningkatan Kinerja	244
LAMPIRAN		iii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam LAKIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan,

Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100; yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95); serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi;

- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil;
- 6) Pengelolaan pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
- 7) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis usaha bidang kelautan dan perikanan;
- 8) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Cabang Dinas;
- 9) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan
- 10) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

c. Uraian Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- 2) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi;
- 3) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis penangkapan ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangan daerah;
- 4) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil;
- 6) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan perikanan;
- 7) Membina, mengawasi, dan mengendalikan Cabang Dinas;
- 8) Membina, mengawasi, dan mengendalikan UPTD;
- 9) Membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0124 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 7 (tujuh) UPTD, yaitu : a). Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, b). Pelabuhan Perikanan Batulicin, c). Pelabuhan Perikanan Muara Kintap, d). Pelabuhan Perikanan Kotabaru, e). Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan Karang Intan, f). Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru, dan g). Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan. Berikut dijelaskan tugas dan fungsi pada masing-masing UPTD di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan :

a. Pelabuhan Perikanan Banjarmasin

Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.

Sementara itu, Pelabuhan Perikanan Banjarmasin mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan kesyahbandaran, dan pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan serta bongkar muat ikan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengawasan sumberdaya ikan, mutu hasil penangkapan, dan mutu pengolahan hasil perikanan;

- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan tempat pemasaran dan distribusi ikan;
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, wisata bahari dan atau jasa lainnya terkait hasil perikanan; dan
- 9) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

b. Pelabuhan Perikanan Batulicin

Pelabuhan Perikanan Batulicin mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.

Sementara itu, Pelabuhan Perikanan Batulicin mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan kesyahbandaran, dan pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan serta bongkar muat ikan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengawasan sumberdaya ikan, mutu hasil penangkapan, dan mutu pengolahan hasil perikanan;
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan tempat pemasaran dan distribusi ikan;
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, wisata bahari dan atau jasa lainnya terkait hasil perikanan; dan
- 9) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

c. Pelabuhan Perikanan Muara Kintap

Pelabuhan Perikanan Muara Kintap mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.

Sementara itu, Pelabuhan Perikanan Muara Kintap mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan kesyahbandaran, dan pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan serta bongkar muat ikan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengawasan sumberdaya ikan, mutu hasil penangkapan, dan mutu pengolahan hasil perikanan;
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan tempat pemasaran dan distribusi ikan;
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, wisata bahari dan atau jasa lainnya terkait hasil perikanan; dan
- 9) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

d. Pelabuhan Perikanan Kotabaru

Pelabuhan Perikanan Kotabaru mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.

Sementara itu, Pelabuhan Perikanan Kotabaru mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan kesyahbandaran, dan pengelolaan serta pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta kapal pengawas kapal perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan serta bongkar muat ikan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pengawasan sumberdaya ikan, mutu hasil penangkapan, dan mutu pengolahan hasil perikanan;
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan tempat pemasaran dan distribusi ikan;
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, wisata bahari dan atau jasa lainnya terkait hasil perikanan; dan
- 9) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

e. Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan

Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul ikan air payau dan air tawar serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul

- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pendampingan teknis penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerjasama uji terap penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian monitoring dan evaluasi penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemuliaan dan pengembangan ikan lokal
- 8) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sistem informasi dan publikasi
- 9) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

f. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru

Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengembangan teknologi produksi, penyediaan dan produksi, distribusi benih, bimbingan teknis perikanan budidaya air payau dan laut.

Sementara itu, Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis produksi dan layanan teknis budidaya ikan air payau dan laut;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan teknologi produksi dan budidaya ikan air payau dan laut;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penyediaan dan produksi induk unggul dan benih bermutu ikan air payau dan laut;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan air payau dan laut;

- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan kerjasama uji terap produksi dan layanan teknis budidaya ikan air payau dan laut;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi perikanan budidaya air payau dan air laut; dan
- 7) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

g. Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, diversifikasi produk perikanan, dan pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk perikanan.

Sementara itu, Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pedoman teknis pelayanan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengujian mutu produk perikanan;
- 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan;
- 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pemenuhan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan diversifikasi produk perikanan;
- 5) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi penerapan mutu untuk proses rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan registrasi pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran;
- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan monitoring dan pengujian mutu keamanan produk perikanan yang distribusinya lintas kabupaten/kota; dan
- 7) pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

C. Struktur Organisasi

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Eselon II : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

b. Eselon III : Sekretariat

Eselon IV :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Eselon III : Bidang Pengelolaan Ruang Laut

Eselon IV :

1) Seksi Konservasi Ekosistem Laut;

2) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut; dan

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

d. Eselon III : Bidang Perikanan Tangkap

Eselon IV :

1) Seksi Kenelayanan;

2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Penangkapan; dan

3) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.

e. Eselon III : Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Eselon IV :

1) Seksi Budidaya Perikanan;

2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan

3) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

f. Eselon III : Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Eselon IV :

1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

2) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum; dan

3) Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Sementara itu terlampir disampaikan struktur organisasi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0152 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

a. UPTD yang membidangi Perikanan Tangkap sebanyak 4 (empat) unit kerja, yaitu:

1) Pelabuhan Perikanan Banjarmasin

a) Eselon III: Kepala PP Banjarmasin

b) Eselon IV :

(1) Sub Bagian Tata Usaha

(2) Seksi Kesyahbandaran

(3) Seksi Tata Operasional

c) Kelompok Jabatan Fungsional

2) Pelabuhan Perikanan Muara Kintap

a) Eselon III: Kepala PP Muara Kintap

b) Eselon IV :

(1) Sub Bagian Tata Usaha

(2) Seksi Kesyahbandaran

(3) Seksi Tata Operasional

c) Kelompok Jabatan Fungsional

3) Pelabuhan Perikanan Batulicin

a) Eselon III: Kepala PP Batulicin

b) Eselon IV :

(1) Sub Bagian Tata Usaha

(2) Seksi Kesyahbandaran

(3) Seksi Tata Operasional

c) Kelompok Jabatan Fungsional

- 4) Pelabuhan Perikanan Kotabaru
 - a) Eselon III: Kepala PP Kotabaru
 - b) Eselon IV :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha
 - (2) Seksi Kesyahbandaran
 - (3) Seksi Tata Operasional
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. UPTD yang membidangi Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kerja, yaitu:
 - 1) Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru
 - a) Eselon III: Kepala PBAPL Kotabaru
 - b) Eselon IV :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha
 - (2) Seksi Produksi
 - (3) Seksi Layanan Teknis
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan
 - a) Eselon III: Kepala PBKL
 - b) Eselon IV :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha
 - (2) Seksi Produksi
 - (3) Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan Prov. Kalsel
 - a) Eselon III: Kepala BPMHP
 - b) Eselon IV :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha
 - (2) Seksi Pengujian Mutu
 - (3) Seksi Penerapan Mutu
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional

D. Isu Strategis SKPD

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi dasar dalam penentuan sasaran strategis, yang dipandang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam jangka waktu pembangunan jangka menengah kedepan yaitu:

- 1) Pemulihan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan terdampak Covid-19 yang diarahkan untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- 2) Percepatan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan, Nilai Ekspor Hasil Perikanan, dan Konsumsi Ikan Masyarakat.
- 3) Pemulihan kualitas lingkungan ekosistem dan perairan wilayah pesisir serta penguatan ketahanan bencana yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, penataan dan pemanfaatan ruang laut, serta pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan yang diarahkan untuk pengembangan kompetensi teknis bagi nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.
- 5) Pemberdayaan SDM dan kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha perikanan, serta kapasitas kelembagaan dan kemandirian kelompok pelaku usaha perikanan.
- 6) Penguatan tata kelola sumber daya kelautan yang bertanggung jawab yang diarahkan untuk menjaga proporsi tangkapan jenis ikan di laut dan perairan umum daratan yang berada dalam batasan biologis yang aman, serta perluasan kawasan reservaat di perairan umum yang telah direstocking sumber daya ikannya.
- 7) Pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berdaya saing yang didukung dengan penguatan ketersediaan dan kontinuitas Produksi perikanan, serta pembangunan kawasan sentra industri perikanan terpadu.
- 8) Pengendalian preventif pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan masyarakat yang telah melekat peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan yang aktif, serta cakupan wilayah penyebaran informasi tentang peraturan perundang-undangan bidang perikanan.

- 9) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif yang diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan per-UU yang berlaku, pemantauan terhadap aktifitas illegal fishing di laut dan perairan umum, serta pemberkasan perkara kasus IUU Fishing yang tertangani sd. Tahap P.21.
- 10) Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik yang diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, serta kinerja anggaran.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan LAKIP Tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.
- Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2023, dan Penetapan Kinerja Tahun 2023
- Bab III Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2023.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini telah mengikuti tata laksana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SOP Penyusunan LAKIP (Lampiran 1). Selain itu dalam proses pembuatan Laporan ini juga telah disusun Penanggung Jawab Pengumpulan Data dan Informasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor.....Tahun 2023 (Lampiran 2).

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana yang diamanahkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah mendukung dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026.

Berikut keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Sasaran RENSTRA-PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

VISI	KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA
MISI - 2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata
Tujuan 1 RPJMD	Meningkatnya Perekonomian Daerah
Indikator Tujuan 1 RPJMD	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Sasaran 1 RPJMD	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata
Indikator Sasaran 1 RPJMD	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Sasaran 1 RENSTRA-PD	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan
Indikator Sasaran 1 RENSTRA-PD	LPE Perikanan
	Produksi Perikanan

Tujuan 2 RPJMD	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan
Indikator Tujuan 2 RPJMD	Persentase Penduduk Miskin
	Indeks Gini
Sasaran 2 RPJMD	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Indikator Sasaran 2 RPJMD	Pengeluaran per Kapita
Sasaran 2 RENSTRA-PD	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
Indikator Sasaran 2 RENSTRA-PD	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)
	Nilai Ekspor Perikanan
MISI - 5	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana
Tujuan 3 RPJMD	Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator Tujuan 3 RPJMD	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 3 RPJMD	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
Indikator Sasaran 3 RPJMD	Indeks Tutupan Lahan
	Indeks Kualitas Air
	Indeks Kualitas Udara
	Indeks Kualitas Air Laut
Sasaran 3 RENSTRA-PD	Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing
Indikator Sasaran 3 RENSTRA-PD	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21
Sasaran 4 RPJMD	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
Indikator Sasaran 4 RPJMD	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Sasaran 4 RENSTRA-PD	Meningkatnya Kontribusi Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi
Indikator Sasaran 4 RENSTRA-PD	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Sumber : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PEMDA (RPJMD Prov. Kal-Sel 2021 – 2026)

Berdasarkan Tabel 2.1, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) **Tujuan 1** : Meningkatnya Perekonomian Daerah
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan
Indikator Kinerja : — LPE Perikanan
— Produksi Perikanan
- 2) **Tujuan 2** : Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
Indikator Kinerja : — Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)
— Nilai Ekspor Perikanan
- 3) **Tujuan 3** : Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Strategis 3.a : Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing
Indikator Kinerja : Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21
Sasaran Strategis 3.b : Meningkatnya Kontribusi Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi
Indikator Kinerja : Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Berikut disajikan target untuk indikator sasaran pada masing-masing tujuan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2020	Baseline 2021	Target Kinerja				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata	LPE Perikanan (%)	4,30	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
			Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap) Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	207.229	247.864,99	264.476,48	211.000	212.500	214.000	215.500
			Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi	139.079	131.116,25	157.000	167.419	177.272	187.465	198.450
2	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan/NTNP (angka)	98,99	102,99	101,16	102,03	102,95	103,92	103,97
			Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar Rupiah)	167,68	168,00	169,00	170,00	171,00	172,00	173,00
			Angka Konsumsi Ikan Masyarakat	60,24	61,74*	62,06	63	64	65	66
3.	Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2020	Baseline 2021	Target Kinerja				
						2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi (Ha)	75,80	87,80	90	135,80	155,80	175,80	195,80

Sumber: RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel 2021-2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada Tabel 2.3 disampaikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 ini :

Tabel 2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT

		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing
--	--	--

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021 – 2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja di setiap tahunnya.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Eselon II)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	211.000 Ton	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	167.419 Ton	
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	63,00 Kg/Kapita	
4	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	135,80 Ha	
5	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	100%	
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	
		Jumlah Inovasi Pelayan Publik Yang Diterapkan	1	

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang (Eselon III)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perikanan Tangkap				
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	161.000 Ton	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di PUD Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	50.000 Ton	
		Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT Yang Memiliki Dokumen Perizinan Sesuai Ketentuan	210 Unit	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang Dibina Perizinan Usahanya	100%	Kepala Bidang BP2HP
		Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut Yang Dapat Dibina	100%	
		Persentase Cakupan Wilayah Yang Terkelola Usaha Pembudiyaan Ikan di Perairan Darat	100%	
2	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan	100%	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut				
1	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	Luas Akumulasi Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	135,80 Ha	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut
		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan Rekomendasi Perizinannya	100%	
		Persentase Cakupan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Masyarakatnya Dibina Keaktifan Kelembagaan Kelompoknya	100%	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per- UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut, Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sd 12 Mil	100%	Kepala Bidang PSDKP
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pembudidayaan Ikan dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya di Lintas Kab/Kota	100%	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Sekretaris				
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%	Sekretaris
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Sekretaris				
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasionalkan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%	Sekretaris
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%	
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%	
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%	
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%	

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Eselon IV)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan				
1	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	1 Dokumen	Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan
2	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Kenelayanan				
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Kepala Seksi Kenelayanan
2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan	210 Rekomendasi	
3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	4 Dokumen	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan				
1	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (di P.Laut)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	9 Unit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan
2	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (di PUD)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	4 Unit	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Budidaya Perikanan				
1	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Resiko	1 Dokumen	Kepala Seksi Budidaya Perikanan
2	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	
3	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat	3 Dokumen	
4	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	30 Orang	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
1	Terlaksananya Pembinaan Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	8 Unit Usaha	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran				
1	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran				
2	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut				
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan Dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola	194.698,09 Ha	Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut
2	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	48,60 Ha	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut				
1	Tercatatnya Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan SDKP				
1	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	Jumlah Wilayah Yang Terpantau dan Terawasi Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	3 Kabupaten	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan SDKP
2	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	3 Dokumen	
3	Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	1 Dokumen	
4	Terbayarnya Honorarium Tenaga Non ASN	Jumlah Honorarium Tenaga Non ASN Yang Dibayarkan	12 OB	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan SDKP				
5	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Wilayah Yang Terpantau dan Terawasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	5 Kabupaten	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan SDKP
6	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	1 Dokumen	
7	Terbinanya Keaktifan dan Peran POKMASWAS Dalam Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Wilayah Yang POKMASWASnya Dibina Keaktifannya	3 Kabupaten	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum				
1	Meningkatnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	1 Dokumen	Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
2	Terfasilitasinya Penanganan Konflik/ Supervisi Pemberkasas Kasus Perkara/ Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Per-UU Perikanan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	Jumlah Kabupaten Yang Terfasilitasi Penanganan Konflik/ Supervisi Pemberkasas Kasus Perkara/ Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Per-UU Perikanan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	5 Kabupaten	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum				
3	Terbayarnya Honorarium Tenaga Non ASN	Jumlah Honorarium Tenaga Non ASN Yang Dibayarkan	36 OB	Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
4	Meningkatnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	1 Dokumen	
5	Terlaksananya Koordinasi/ Konsolidasi/ Konsultasi Penegakan Hukum Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Konsolidasi/ Konsultasi Penegakan Hukum Usaha Perikanan Tangkap	2 Kegiatan	
6	Terlaksananya Pemberkasannya Kasus Perkara Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Kasus Perkara Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya Yang Difasilitasi Pemberkasannya sd. P.21	1 Kasus	
7	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per-UU di Bidang Perikanan	35 Orang	
8	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	Jumlah Kabupaten/Kota Yang di Monitoring dan di Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2023	13 Kabupaten	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan				
1	Terlaksananya Serah Terima Pemasangan Papan Seruan Untuk POKMASWAS	Jumlah Papan Seruan Untuk POKMASWAS Yang Terpasang	3 Buah	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan
2	Terlaksananya Identifikasi dan Verifikasi Bantuan Perlengkapan POKMASWAS	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi dan Verifikasi Bantuan Perlengkapan POKMASWAS	4 Dokumen	
3	Terlaksananya Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022	Jumlah Laporan Hasil Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022	6 Dokumen	
4	Terlaksananya Serah Terima Bantuan Pos Jaga Untuk POKMASWAS	Jumlah Pos Jaga Motor Pengawasan Yang Diserah Terimakan Untuk POKMASWAS	1 Buah	
5	Terlaksananya Serah Terima Pemasangan Papan Seruan Untuk POKMASWAS	Jumlah Papan Seruan Untuk POKMASWAS Yang Terpasang	5 Buah	
6	Terlaksananya Serah Terima Bantuan Perahu Motor Untuk POKMASWAS	Jumlah Perahu Motor Pengawasan Yang Diserah Terimakan Untuk POKMASWAS	8 Unit	
7	Terlaksananya Identifikasi Bantuan Perlengkapan POKMASWAS	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Calon Penerima Bantuan Perlengkapan POKMASWAS	9 Dokumen	
8	Terlaksananya Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022	Jumlah Laporan Hasil Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022	11 Dokumen	
9	Terlaksananya Pengadaan Poster	Jumlah Poster tentang Ilegal dan Destructive Fishing yang disebarluaskan ke Masyarakat	1500 Lembar	
10	Terlaksananya Pengadaan Leaflet	Jumlah Leaflet tentang Ilegal dan Destructive Fishing yang disebarluaskan ke Masyarakat	1570 Lembar	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan				
11	Terlaksananya Pengadaan Spanduk	Jumlah Spanduk tentang Illegal dan Destructive Fishing yang terpasang	80 Lembar	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan
12	Terlaksananya Pengadaan Baju Kaos Stof Illegal dan Destructive Fishing	Jumlah Baju Kaos tentang Stop Illegal dan Destructive Fishing yang diserahkan	425 Pcs	
13	Terlaksananya Pengadaan Kain Sasirangan	Jumlah Kain Sasirangan Rapat Koordinasi dengan Dinas Perikanan Manado	10 Lembar	
14	Terlaksananya Pengadaan Kain Sasirangan	Jumlah Kain Sasirangan Untuk Rapat Koordinasi dan Pengembangan Sarpras Untuk Pokmaswas Tahun 2023 ke Nusa Tenggara Barat	10 Lembar	
15	Terlaksananya Pengadaan Kain Sasirangan	Jumlah Kain Sasirangan Untuk Aparatur PSDKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	15 Lembar	
16	Terlaksananya Koordinasi dan Peningkatan Sarpras Pengawasan Untuk Pokmaswas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Peningkatan Sarpras Pengawasan Untuk Pokmaswas	1 Laporan	
17	Terlaksananya Verifikasi dan Peninjauan untuk Pokmaswas yang diusulkan mendapat Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2024	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Peninjauan untuk Pokmaswas yang diusulkan mendapat Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2024	3 Laporan	
18	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Aset Sarpras Pokmaswas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Aset Sarpras Pokmaswas	3 Laporan	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Sub Perencanaan dan Pelaporan				
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset				
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/Bulan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	
4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	8 Laporan	
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665 Laporan	
7	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian				
1	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	785 Orang	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian				
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	4 Unit	
7	Tersedianya Mebel Untuk Menunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	6 Paket	
8	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	65 Unit	
9	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
10	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	
11	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarnya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	
12	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	
13	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	174 Unit	

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut

Tabel 3.1. Kategorisasi Pencapaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

Sumber: Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015

I. Sasaran RPJMD

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 ditetapkan berdasarkan PERDA Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026.

Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang diamanatkan untuk dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan indikator kinerja:

1. LPE Perikanan;
2. Produksi Perikanan;
3. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)
4. Nilai Ekspor Perikanan
5. Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21
6. Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Berikut penjelasan dan penggunaan persamaan terkait dengan 6 (enam) indikator tujuan/sasaran Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan :

1. LPE Perikanan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Perikanan adalah peningkatan PDB perikanan pada tahun n terhadap capaian PDB perikanan pada tahun n-1, dengan satuan hitung %. Angka PDB berasal dari data yang dirilis oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk menghitung pertumbuhan PDB Perikanan dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \left[\frac{B - C}{C} \right] \times 100\%$$

Dimana :

A = Pertumbuhan PDB Perikanan pada tahun n

B = PDB Perikanan pada tahun n

C = PDB Perikanan pada tahun sebelumnya (n-1)

Keterangan : PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

2. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah total volume hasil perikanan yang diperoleh dari penjumlahan antara volume produksi perikanan tangkap dan volume produksi perikanan budidaya pada tahun n, dengan satuan hitung ton. Data produksi ikan tersebut diperoleh dari Aplikasi Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk menghitung produksi ikan dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = B + C$$

Dimana :

A = Produksi Perikanan pada tahun n

B = Volume Produksi Perikanan Tangkap pada tahun n

C = Volume Produksi Perikanan Budidaya pada tahun n

3. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan/NTNP

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) merupakan proxy untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan dan pembudidaya ikan (Ib) dikalikan dengan 100. Angka NTNP berasal dari data yang dirilis oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk menghitung Nilai Tukar ikan dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana :

A = Nilai Tukar

B = Indeks Harga Yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)

C = Indeks Harga Yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)

Keterangan: PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Keterangan:

Nilai tukar > 100: pendapatan surplus, dimana It > Ib.

Nilai tukar = 100: pendapatan impas, dimana It = Ib.

Nilai tukar < 100: pendapatan defisit, dimana It < Ib.

4. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai Ekspor Hasil Perikanan adalah nilai seluruh produk/komoditas hasil perikanan yang diperdagangkan ke luar negeri yang ditentukan oleh permintaan luar negeri pada tahun n, yang dikonversikan dalam satuan hitung milyar rupiah. Dalam hal ini, nilai ekspor diperoleh dari kompilasi nilai ekspor FOB (Free on Board) produk perikanan yang keluar dari daerah Pabean Kalsel selama kurun waktu 1 tahun yang dipasarkan langsung ke luar negeri. Nilai ekspor produk perikanan diperoleh melalui serifikasi karantina yang diterbitkan oleh BKIPM Banjarmasin.

5. Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21

Dalam penanganan kasus IUU Fishing, batas kewenangan PPNS Perikanan sampai dengan P.21, yang artinya pemberkasannya sudah pada tahap pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap.

Untuk menghitung Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing yang Tertangani sd. P.21 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana:

A = Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21

B = Jumlah Kasus IUU Fishing Yang Tertangani sd P.21

C = Jumlah Kasus IUU Fishing Pada Tahun n

Sumber data : PPNS Perikanan

6. Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi merupakan perbandingan antara luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi sampai dengan tahun n (luas akumulatif) terhadap total luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang terdapat di Kalimantan Selatan.

Untuk menghitung persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana:

A = Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

B = Jumlah Luas Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun n

C = Jumlah Total Luas Ekosistem Pesisir Kritis

1). Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD

Berikut disajikan capaian ke 6 (enam) indikator kinerja sasaran RPJMD pada tahun 2023 :

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2023 Pada RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	RPJMD		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan	LPE Perikanan	6%	2,96%	49,33%
		Produksi Perikanan	378.419 Ton	367.214,25 Ton	97,04%
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,03	99,22	97,24%
		Nilai Ekspor Perikanan	170,00 Milyar Rupiah	152 Milyar Rupiah	89,42%
3	Menurunnya Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kontribusi Ekosistem Pesisir Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	1,26%	1,41%	111%
Rata-rata Capaian					90,64%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

(1). LPE Perikanan

Dari sisi sektoral, kelautan dan perikanan dimasukkan dalam sub kategori perikanan. Sub kategori perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa data lainnya bersumber dari BPS, misalnya: data harga berupa harga produsen, data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah subkategori perikanan adalah melalui pendekatan produksi perikanan. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi perikanan dan harga untuk masing-masing komoditi perikanan.

Nilai Tambah Bruto (NTB) subkategori perikanan diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha perikanan yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga produsen dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga konstan tahun 2010 untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

Pertumbuhan Ekonomi (PE) Perikanan dikatakan mengalami pertumbuhan apabila hasil produksi ikan pada tahun tertentu (T_n) lebih besar dari pada tahun sebelumnya (T_{n-1}). Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat PE Perikanan adalah tingkat pertumbuhan PDRB subkategori perikanan. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, maka digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (tahun 2010). Artinya pertumbuhan ekonomi perikanan tidak terpengaruh oleh perubahan harga atau inflasi. Pendapatan regional atas dasar harga konstan dapat pula digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sub kategori perikanan, dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi sub kategori lainnya. Dengan membandingkan pertumbuhan masing-masing sub kategori menurut lapangan usaha, maka akan dapat pula mengukur kemajuan yang telah dicapai setiap lapangan usaha tersebut, sehingga prioritas pembangunan masing-masing daerah dapat diketahui. Berikut cara menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Perikanan adalah sebagai berikut :

$$A = \left[\frac{B - C}{C} \right] \times 100\%$$

Dimana :

A = Pertumbuhan PDB Perikanan pada tahun n

B = PDB Perikanan pada tahun n

C = PDB Perikanan pada tahun sebelumnya (n-1)

Keterangan : PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) diperoleh dari BPS Kalimantan Selatan

Berdasarkan data tahun 2023 dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, maka perhitungan LPE Perikanan tahun 2023 Atas Dasar Harga Konstan 2010 adalah sebagai berikut:

Jika diketahui:

—	PDB Perikanan (2023)	=	5.011,18 Milyar Rupiah
—	PDB Perikanan (2022)	=	4.866,92 Milyar Rupiah

Maka LPE Perikanan tahun 2023 yaitu:

$$A = \left[\frac{\text{PDB 2023} - \text{PDB 2022}}{\text{PDB 2022}} \right] \times 100\%$$

$$A = \frac{5.011,18 - 4.866,92}{4.866,92} \times 100\%$$

$$A = 2,96\%$$

Dari hasil perhitungan, maka Pertumbuhan Ekonomi Perikanan (Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut Lapangan Usaha) pada tahun 2023 adalah sebesar 2,96%.

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja indicator kinerja LPE Perikanan tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian LPE Perikanan} = \frac{\text{Realisasi LPE Perikanan Tahun 2023}}{\text{Target LPE Perikanan Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian LPE Perikanan} = \frac{2,96\%}{6\%} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian LPE Perikanan} = 49,33\%$$

Dengan demikian realisasi capaian kinerja LPE Perikanan tahun 2023 terhadap target LPE Perikanan tahun 2023 hanya tercapai sebesar 49,33%.

(2). Produksi Perikanan

Produksi Ikan adalah volume hasil produksi ikan yang diperoleh dari penjumlahan volume produksi perikanan tangkap dan volume produksi perikanan pembudidaya pada tahun berjalan (tahun n), dengan satuan hitung ton. Adapun rumus perhitungan volume produksi ikan adalah sebagai berikut:

$$A = B + C$$

Dimana :

A = Produksi Perikanan pada tahun n

B = Volume Produksi Perikanan Tangkap pada tahun n

C = Volume Produksi Perikanan Budidaya pada tahun n

Berdasarkan data sementara untuk realisasi jumlah total produksi perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} A &= B + C \\ &= 210.097,47 \text{ Ton} + 157.116,78 \text{ Ton} \\ &= \mathbf{367.214,25 \text{ **) Ton}} \end{aligned}$$

Keragaan produksi perikanan di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 :

Target = 378.419,00 Ton

Capaian = 367.214,25 **) Ton

**) = angka sangat sementara karena belum diselenggarakannya kegiatan validasi nasional oleh KKP untuk statistik produksi perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya)

Tabel 3.3. Data Produksi Perikanan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Kabupaten	Perikanan Budidaya	Perikanan Tangkap	Total **) Ton
1	Balangan	1.190,15	833,80	2.023,95
2	Banjar (Martapura)	49.906,51	8.718,01	58.624,52
3	Barito Kuala	12.685,61	10.023,57	22.709,18
4	Hulu Sungai Selatan	6.589,98	8.849,95	15.439,93
5	Hulu Sungai Tengah	2.888,03	8.206,98	11.095,01
6	Hulu Sungai Utara	30.089,81	13.487,30	43.577,11
7	Banjarbaru	449,96	343,01	792,97
8	Banjarmasin	2.598,00	2.106,75	4.704,75
9	Kotabaru	25.718,46	73.145,70	98.864,16
10	Tabalong	16.160,52	1.958,18	18.118,70
11	Tanah Bumbu	6.991,55	46.284,02	53.275,57
12	Tanah Laut	1.422,98	32.516,60	33.939,58
13	Tapin	425,22	3.623,60	4.048,82
	Total	157.116,78	210.097,47	367.214,25

Sumber Data : Bidang BP2HP dan Bidang Perikanan tangkap (2023)

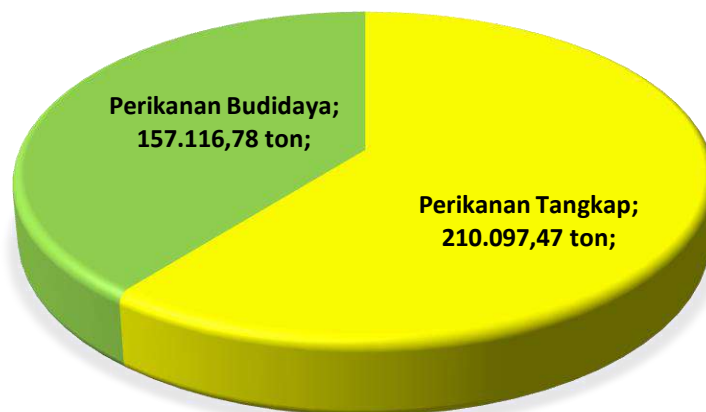
Keterangan **) : angka sementara

Data produksi ikan yang diperoleh tersebut merupakan data yang telah di input oleh petugas enumerator pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang tersebar di 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan melalui aplikasi Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan. Data yang telah ter-input selanjutnya oleh petugas validator kabupaten/kota dan provinsi dilakukan validasi akuntabilitas datanya pada tingkat provinsi, dan akhirnya di validasi kembali di tingkat pusat oleh petugas validator Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Validasi satu data statistik kelautan dan perikanan di tingkat pusat untuk tahun n, baru akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun n+1 berikutnya. Sementara itu , dan rilis resmi angka tetap untuk satu data statistik kelautan dan perikanan secara nasional baru akan dirilis pada bulan Maret tahun n+2. Oleh karena itu data volume produksi ikan yang

disampaikan dalam LAKIP 2023 ini masih bersifat sementara, dan akan dikoreksi kembali setelah validasi tingkat pusat dilaksanakan, dan rilis resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi sementara volume produksi perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 tercatat sebesar 367.214,25 **) ton, atau lebih sedikit 11.204,75 ton jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu 378.419,00 ton



Sumber: Data Terolah dari Aplikasi Satu Data Statistik-KKP (2023)

Gambar 3.1. Kontribusi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Terhadap Volume Produksi Ikan Tahun 2023

Dari Gambar 3.1 tersebut mengindikasikan bahwa produksi perikanan masih sebagian besar dihasilkan dari kegiatan perikanan tangkap, baik yang berasal dari perairan laut maupun perairan umum daratan. Usaha perikanan tangkap yang produksinya sangat tergantung pada musim dan kondisi cuaca serta potensi pemanfaatan sumber daya ikannya. Oleh karena itu kedepan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berupaya meningkatkan peran perikanan budidaya dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Untuk pengembangan usaha perikanan budidaya, kedepan akan diarahkan pada pengembangan komoditas perikanan berbasis ikan lokal untuk pengendalian inflasi serta mendukung ekspor perikanan Kalimantan Selatan.

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja indikator kinerja produksi ikan tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Produksi Ikan} = \frac{\text{Realisasi Volume Produksi Perikanan Pada Tahun 2023}}{\text{Target Volume Produksi Perikanan Pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Produksi Ikan} = \frac{367.214,25}{378.419,00} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Produksi Ikan} = 97,04 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka persentase realisasi capaian kinerja produksi ikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebesar 97,04% (Sangat Memuaskan).

(3). Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) berasal dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) dikalikan dengan 100. Nilai It dan Ib tersebut pada posisi per Desember tahun berjalan. Nilai Tukar Perikanan digunakan sebagai alat pengukur tingkat kemampuan/daya beli nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan pembudidaya.

Nilai Tukar Perikanan digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur kesejahteraan pelaku usaha yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh pelaku usaha.

Adapun cara menghitung Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) adalah sebagai berikut :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana :

A = Nilai Tukar

B = Indeks Harga Yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It)

C = Indeks Harga Yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)

Keterangan: PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Keterangan:

Nilai tukar > 100: pendapatan surplus, dimana $I_t > I_b$.

Nilai tukar = 100: pendapatan impas, dimana $I_t = I_b$.

Nilai tukar < 100: pendapatan defisit, dimana $I_t < I_b$.

Berdasarkan rilis data BPS Kalimantan Selatan, maka NTNP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jika diketahui:

$$- I_t_{(2023)} = 118,82$$

$$- I_b_{(2023)} = 119,75$$

Maka NTNP tahun 2023 yaitu:

$$NTNP_{2023} = \frac{118,82}{119,75} \times 100$$

$$NTNP_{2023} = 99,22\%$$

Dari hasil perhitungan, maka NTNP tahun 2023 adalah sebesar 99,22%. Dengan demikian realisasi capaian kinerja NTNP tahun 2023 terhadap target NTNP tahun 2023 sebesar 97,25% (Sangat Memuaskan).

Sementara itu apabila realisasi sementara capaian kinerja NTNP tahun 2023 dibandingkan dengan NTNP Tahun 2022 yang tercatat sebesar 98,27, maka capaian NTNP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk menghitung persentase peningkatan capaian kinerja dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{\text{Nilai 2023} - \text{Nilai 2022}}{\text{Nilai 2022}} \times 100\%$$

Jika diketahui:

$$- \text{Realisasi NTNP}_{(2023)} = 99,22$$

$$- \text{Realisasi NTNP}_{(2022)} = 98,27$$

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{\text{Nilai 2023} - \text{Nilai 2022}}{\text{Nilai 2022}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{99,22 - 98,27}{98,27} \times 100\%$$

$$\% \text{ Peningkatan} = 0,97\%$$

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja indikator kinerja NTNP tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian NTNP} = \frac{\text{Realisasi NTNP Pada Tahun 2023}}{\text{Target NTNP Pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian NTNP} = \frac{99,22}{102,03} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian NTNP} = 97,24 \%$$

Dengan menggunakan persamaan tersebut di atas, maka NTNP tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,97% dibanding NTNP 2022, dan persentase realisasi capaian kinerja NTNP tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2023 adalah sebesar 97,24% (Sangat Memuaskan).

(4). Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Perdagangan luar negeri merupakan sektor ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Selatan pada khususnya. Dari kegiatan ekspor seperti yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan dapat diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan.

Ekspor hasil perikanan dapat diartikan sebagai pengiriman komoditas hasil perikanan yang diperdagangkan keluar negeri melalui pelabuhan (laut dan udara) diseluruh wilayah Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial.

Sementara itu pengertian nilai ekspor hasil perikanan adalah nilai transaksi komoditas hasil perikanan yang di ekspor sampai di atas kapal pelabuhan (laut dan udara) yang dimuat dalam keadaan *free on board* (f.o.b).

Adapun lembaga legalisasi komoditas ekspor hasil perikanan di Kalimantan Selatan di bawah otoritas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Banjarmasin.

Data nilai ekspor hasil perikanan dihitung dengan menggabungkan nilai ekspor hasil perikanan Semester I dan Semester II pada tahun n, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TNEP_{Tn} = NES_{1Tn} + NES_{2Tn}$$

Dimana:

- $TNEP_{Tn}$ = Total Nilai Ekspor Hasil Perikanan Pada Tahun n
- NES_{1Tn} = Nilai Ekspor Hasil Perikanan sd. Semester 1 Tahun n
- NES_{2Tn} = Nilai Ekspor Hasil Perikanan sd. Semester 2 Tahun n

Jika diketahui:

- Nilai Ekspor Hasil Perikanan sd. Semester 1 Tahun n = 95,87 Milyar
- Nilai Ekspor Hasil Perikanan sd. Semester 2 Tahun n = 75,80 Milyar

$$\begin{aligned} TNEP_{Tn} &= NES_{1Tn} + NES_{2Tn} \\ TNEP_{2023} &= 81.179.836.091,24 + 71.320.148.075,76 \\ TNEP_{2023} &= 152.499.984.167,00 \end{aligned}$$

Target nilai ekspor hasil perikanan pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 170 Milyar. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai ekspor hasil perikanan tahun 2023 sebesar 152 Milyar, maka realisasi tersebut kurang dari target yang ditetapkan sebesar 18 Milyar, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% A &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \% A &= \frac{152 \text{ M}}{170 \text{ M}} \times 100\% \\ \% A &= 89,42\% \end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan tersebut di atas, maka persentase realisasi capaian kinerja nilai ekspor hasil perikanan tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2023 adalah sebesar 89,42% (Memuaskan).

(5). Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21

Persentase kasus *illegal fishing/destructive fishing* yang tertangani sampai dengan P.21 adalah persentase jumlah kasus *illegal fishing/destructive fishing* selama tahun n yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan proses pemberkasan perkaranya dapat tuntas diselesaikan sampai dengan tahap P.21.

Tahap P.21 merupakan batas kewenangan PPNS Perikanan untuk menangani proses penyidikan kasus perkara IUU Fishing. Pada P.21 ini menunjukkan kinerja PPNS Perikanan telah sampai pada tahap pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap, dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses pada tahap selanjutnya.

Persentase kasus *illegal fishing/destructive fishing* yang tertangani sampai dengan P.21 pada tahun n dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana:

A = Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd. P.21

B = Jumlah Kasus IUU Fishing Yang Tertangani sd P.21

C = Jumlah Kasus IUU Fishing Pada Tahun n

Jika diketahui:

- Jumlah Kasus Perkara Yang Tuntas sd. P.21 = 7 kasus
- Jumlah Kasus Yang Sedang Diproses Perkaranya = 7 kasus

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

$$A = \frac{7}{7} \times 100$$

$$A = 100\%$$

Target persentase kasus IUU Fishing/Destructive Fishing yang tertangani sd. P.21 pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang juga mencapai 100%, maka realisasi tersebut memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100,00%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\%A = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\%A = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\%A = 1 \times 100\%$$

$$\%A = 100\%$$

(6). Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Kerusakan ekosistem pesisir sudah terjadi hampir diseluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Hal ini karena kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan pesisir yang bertanggung jawab masih rendah. Terumbu karang dan mangrove merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang sangat berperan penting dalam kelestarian sumberdaya hayati di laut, jika terjadi kerusakan pada terumbu karang dan mangrove maka akan berpengaruh pada menurunnya keanekaragaman hayati. Sehingga perlu adanya langkah-langkah dalam menanggulangi masalah kerusakan ekosistem laut tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan rehabilitasi kawasan yang rusak.

Persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi merupakan perbandingan antara luas kasawan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi sampai dengan tahun n (luas akumulatif) terhadap total luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang terdapat di Kalimantan Selatan.

Adapun cara menghitung persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

Dimana:

- A = Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi
B = Jumlah Luas Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun n
C = Jumlah Total Luas Ekosistem Pesisir Kritis

Jika diketahui:

- Jumlah Luas Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun 2023 = 174,25 Ha
- Jumlah Total Luas Ekosistem Pesisir Kritis = 12.353,10 Ha

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$
$$A = \frac{174,25}{12.353,10} \times 100$$

$$A = 1,41\%$$

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja indikator kinerja persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{\% Capaian Ekosistem Yang Direhabilitasi} &= \frac{\text{Realisasi Pada Tahun 2023}}{\text{Target Pada Tahun 2023}} \times 100\% \\ \text{\% Capaian Ekosistem Yang Direhabilitasi} &= \frac{1,41\%}{1,26\%} \times 100\% \\ \text{\% Capaian Ekosistem Yang Direhabilitasi} &= 111\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka persentase realisasi capaian kinerja persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2023 adalah sebesar 111% (Sangat Memuaskan).

2). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait (Time Series)

a) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi		Capaian (%)
			2022	2023	
1	LPE Perikanan	6%	5,59%	2,96%	49,33%
2	Produksi Perikanan	378.419 Ton	331.607,18 Ton	367.214,25	97,04%
3	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	102,03	98,27	99,22	97,24%
4	Nilai Ekspor Perikanan	170,00 Milyar Rupiah	171,67 Milyar Rupiah	152 Milyar Rupiah	89,42%
5	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	1,26%	1,02%	1,41%	111%
Rata-Rata Capaian					90,64%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

b). Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.5 ditampilkan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 ini dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023		Capaian (%)
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	
1	LPE Perikanan	1,23%	2,34%	2,77%	6%	2,96%	49,33%
2	Produksi Perikanan	332.850,00	344.522,82	331.607,18	378.419 Ton	367.214,25	97,04%
3	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	98,99	102,99	98,27	102,03	99,22	97,24%
4	Nilai Ekspor Perikanan	167,68	200,53	171,67	170,00 Milyar Rupiah	152,00 Milyar Rupiah	89,42%
5	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	0,77%	0,83%	1,02%	1,26%	1,41%	111%
Rata-Rata Capaian							90,64%
Kategori Capaian							Sangat Memuaskan

c). Perbandingan Capaian Indikator Kinerja RPJMD dengan Regional Kalimantan Selatan dan Nasional

Pada Tabel 3.6 disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan capaian indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap capaian indikator kinerja regional Kalimantan dan nasional pada tahun 2023 ini :

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Regional Kalimantan dan Nasional 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023					Nasional (**)
		Kal-Bar	Kal-Sel	Kal-Teng	Kal-Tim	Kal-Tara	
1	LPE Perikanan	N/A	2,96%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Produksi Perikanan	N/A	367.214,25	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	N/A	99,22	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Nilai Ekspor Perikanan	N/A	152,00 Milyar Rupiah	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Kasus IUU Fishing/ Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	N/A	1,41%	N/A	N/A	N/A	N/A

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

(1). LPE Perikanan

Pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha seperti pada lapangan usaha kelautan dan perikanan biasanya selalu dikaitkan dengan iklim bisnis yang subur. Hal ini juga tidak luput dari peran investasi dalam pemulihan ekonomi pada sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan. Pada dasarnya investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian khususnya di sektor lapangan usaha kelautan dan perikanan Kalimantan Selatan. Apabila ingin memprediksi atau menganalisis kondisi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan, maka hal yang perlu diketahui adalah angka pertumbuhan ekonomi terkini, peran investasi, serta upaya yang sudah dilakukan pemerintah, khususnya pada lapangan usaha kelautan dan perikanan.

Realisasi laju pertumbuhan ekonomi perikanan pada tahun 2023 sebesar 2,96%. Berikut perkembangan data Pertumbuhan PDB Perikanan selama kurun waktu 2022-2023:

Tabel 3.7. Perkembangan Data Pertumbuhan PDB Perikanan Kalimantan Selatan Selama Kurun Waktu 2022-2023

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1.	PDB Perikanan (Milyar Rupiah)	4.866,92	5.011,18
2.	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	2,77	2,96

Sumber : BPS Kalimantan Selatan (2022-2023)

Penentu peningkatan dan penurunan Pertumbuhan PDB Perikanan Kalimantan Selatan diantaranya adalah investasi pada sektor kelautan dan perikanan. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur suatu wilayah. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor. Selain itu, investasi ini juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Kondisi ini pada akhirnya akan

membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

(2). Produksi Perikanan

Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di 13 kabupaten/kota dengan membandingkan capaian tahun 2022 dan 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan Produksi Perikanan di 13 kabupaten/kota tahun 2022 dan 2023

No.	Kabupaten/Kota	Produksi tahun 2022 (ton)			Produksi tahun 2023 (ton)			% Pertumbuhan
		Budidaya	Tangkap	Total Produksi	Budidaya	Tangkap	Total Produksi	
1.	Balangan	1.071,12	1.379	2.450,12	1.190,15	833,80	2.023,95	-17,39
2.	Banjar	47.520,25	9.109	56.629,25	49.906,51	8.718,01	58.624,52	3,52
3.	Barito Kuala	9.964,14	9.199	19.163,14	12.685,61	10.023,57	22.709,18	18,50
4.	Hulu Sungai Selatan	6.669,90	9.679	16.348,90	6.589,98	8.849,95	15.439,93	-5,56
5.	Hulu Sungai Tengah	3.069,13	8.048	11.117,13	2.888,03	8.206,98	11.095,01	-0,20
6.	Hulu Sungai Utara	10.472,68	12.857	23.329,68	30.089,81	13.487,30	43.577,11	86,79
7.	Banjarbaru	390,03	65	390.096,00	449,96	343,01	792,97	-99,80
8.	Banjarmasin	2.576,74	1.523	4.099,74	2.598,00	2.106,75	4.704,75	14,76
9.	Kotabaru	23.771,52	69.438	93.209,52	25.718,46	73.145,70	98.864,16	6,07
10.	Tabalong	16.764,29	1.948	18.712,29	16.160,52	1.958,18	18.118,70	-3,17
11.	Tanah Bumbu	5.788,113	42.842	48.630,11	6.991,55	46.284,02	53.275,57	9,55
12.	Tanah Laut	1.922,95	31.437	33.359,95	1.422,98	32.516,60	33.939,58	1,74
13.	Tapin	374,33	3.751	4.125,33	425,22	3.623,60	4.048,82	-1,85
JUMLAH		130.355,18	207.254	337.609,18	157.116,78	210.097,47	367.214,25	10,74

Sumber: Satu Data Statistik Kelautan dan Perikanan-KKP (2022, 2023)

Berdasarkan Tabel 3.7 terlihat bahwa capaian produksi perikanan Kalimantan Selatan tahun 2023 tercatat sebesar 367.214,25 ton. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 maka produksi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 29.605,07 Ton.

Apabila ditinjau dari aspek kegiatan usaha perikanan, produksi perikanan budidaya tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 26.761,60 Ton dibanding capaian produksi perikanan budidaya tahun 2022. Sementara itu produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2.843,47 Ton dibanding realiasi produksi perikanan tangkap tahun 2022.

(3). Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)

Target NTNP yang ditetapkan tahun 2023 adalah sebesar 102,03. Sementara itu realisasi capaian tahun 2023 tercatat sebesar 99,04. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja NTNP tahun 2023 hanya mencapai 97,07%.

Pada Desember 2023 terjadi kenaikan NTNP sebesar 1,46 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It lebih besar daripada kenaikan Ib. Kenaikan It disebabkan oleh naiknya harga berbagai kelompok perikanan tangkap sebesar 1,73 persen dan kelompok perikanan budidaya sebesar 2,00 persen. Sementara kenaikan yang terjadi pada Ib sebesar 0,32 persen disebabkan oleh naiknya indeks KRT sebesar 0,32 persen dan indeks BPPBM sebesar 0,35 persen. Untuk NTN pada bulan Desember naik sebesar 1,33 persen. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 1,73 persen sementara Ib hanya naik sebesar 0,39 persen. Kenaikan ini sesuai dengan kelompok penyusunnya. Pada kelompok penangkapan di perairan umum terjadi kenaikan sebesar 1,42 persen (khususnya komoditas ikan sepat dan gabus), sementara pada kelompok penangkapan di laut naik sebesar 1,79 persen (khususnya komoditas tenggiri, teri, kepiting laut, cumi-cumi, rajungan, kakap, dan bawal). Adapun kenaikan pada nilai Ib disebabkan oleh naiknya indeks KRT sebesar 0,32 persen dan indeks BPPBM sebesar 0,47 persen, sedangkan untuk NTPi pada bulan Desember naik sebesar 1,99 persen karena It mengalami kenaikan sebesar 2,00 persen sementara Ib hanya naik sebesar 0,02 persen. It kelompok budidaya air tawar naik sebesar 2,32 persen, khususnya pada komoditas ikan patin, nila, mas, lele, dan bawal. Sementara It kelompok budidaya air payau tidak mengalami perubahan. Kenaikan nilai Ib disebabkan oleh naiknya nilai indeks KRT sebesar 0,30 persen. Sementara indeks BPPBM justru turun sebesar 0,12 persen karena turunnya harga komoditas pakan pada sub kelompok pengeluaran pupuk, obat-obatan, dan pakan ikan.

Berikut perkembangan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) selama tahun 2023:

Tabel 3.9. Perkembangan NTNP, NTN dan NTPi Selama Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023												
Nilai Tukar Perikanan (NTNP)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	NTNP
Indeks Harga yang Diterima Petani	118,32	115,95	116,13	118,50	120,29	119,18	117,45	117,94	117,74	116,03	116,74	118,82	117,76
Indeks Harga yang Dibayar Petani	117,99	118,12	118,28	118,26	118,89	119,50	119,31	119,01	119,00	119,21	119,38	119,75	118,89
Nilai Tukar Petani	100,28	98,16	98,18	100,21	101,17	99,73	98,44	99,10	98,94	97,33	97,79	99,22	99,04
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	NTN
Indeks Harga yang Diterima Petani	117,83	115,41	115,92	118,49	120,64	119,61	117,44	118,12	118,19	115,92	116,82	118,83	117,77
Indeks Harga yang Dibayar Petani	118,54	118,65	118,70	118,61	119,30	119,78	119,52	119,20	119,17	119,38	119,57	120,04	119,20
Nilai Tukar Petani	99,40	97,27	97,66	99,90	101,12	99,86	98,26	99,10	99,18	97,10	97,70	98,99	98,80
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	NTPi
Indeks Harga yang Diterima Petani	120,18	117,99	116,92	118,57	118,95	117,55	117,49	117,26	116,04	116,46	116,45	118,79	117,72
Indeks Harga yang Dibayar Petani	115,90	116,11	116,72	116,94	117,36	118,46	118,54	118,31	118,38	118,58	118,63	118,65	117,72
Nilai Tukar Petani	103,69	101,62	100,17	101,39	101,35	99,23	99,11	99,11	98,03	98,21	98,16	100,11	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2023)

(4). Nilai Ekspor Perikanan

Ekspor termasuk ekspor hasil perikanan merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat. Oleh sebab itu dinamika aktifitas ekspor dapat mempengaruhi tingkat pendapatan daerah sekaligus nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, maka pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikkan pendapatan daerah dan nasional. Akan tetapi sebaliknya pendapatan daerah dan nasional tidak dapat mempengaruhi ekspor. Ekspor belum tentu bertambah apabila pendapatan daerah dan nasional bertambah, atau ekspor dapat mengalami perubahan walaupun pendapatan nasional tetap. Dengan demikian ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan fungsi pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka ekspor juga digolongkan sebagai pengeluaran otonomi oleh karena pendapatan daerah dan nasional bukanlah penentu penting dari tingkat ekspor yang dicapai suatu negara. Daya saing di pasaran luar negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, kebijakan proteksi di negara luar, pendapatan dan kurs valuta asing merupakan faktor utama yang akan menentukan kemampuan suatu negara mengekspor ke luar negeri. Ekspor yang akan dilakukan sesuatu negara bergantung kepada banyak faktor. Suatu negara dapat mengekspor barang-barang yang akan dihasilkannya ke negara-negara lain apabila barang-barang tersebut diperlukan negara-negara lain dan mereka tidak dapat menghasilkan sendiri barang-barang tersebut.

Ekspor bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Adapun tujuan dari teori permintaan (*Demand*) dan penawaran (*Supply*) adalah menggambarkan bagaimana harga bisa terbentuk dalam mekanisme pasar. Pertemuan antara kedua hukum ini dalam satu kondisi merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh para pelaku bisnis. Kondisi ideal demikian dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah titik keseimbangan (*equilibrium*).

Berikut data ekspor hasil perikanan Kalimantan Selatan selama tahun 2023:

Tabel 3.10. Data Ekspor Hasil Perikanan Kalimantan Selatan Tahun 2023

Komoditas Produk Perikanan	Volume		Total Nilai Perdagangan (Milyar Rp)	Negara Tujuan
	Ekor	KGM		
Frozen Shrimp		1.220.835,37	107.108.156.236,00	China dan Jepang
Live Ricefield Eels	803.444,00		8.698.543.136,00	Jepang
Live Crab	189.700,00		6.984.098.380,00	China dan Taiwan
Frozen Cooked Shrimps		189.000,00	25.961.474.160,00	United Kingdom dan Taiwan
Arowana Banjar Red	2.010,00		608.339.470,00	Korea Selatan dan Malaysia
Arowana Golden Red	20,00		13.096.100,00	Siangapura dan United Kingdom
Arowana Super Red	90,00		248.766.200,00	Malaysia dan Korea Selatan
Ikan Sepat Kering		5,00	275.000,00	Thailand dan Philipina
Live Blood Clam		61.722,00	2.877.235.485,00	Vietnam dan Thailand
Jumlah Nilai Ekspor 2023			152.499.984.167,00	

Sumber: Data Terolah dari BKIPM Banjarmasin (2023)

Realisasi pada tahun 2023 ini untuk nilai ekspor hasil perikanan sebesar 152 Milyar maka terjadi penurunan sebesar 18 Milyar dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 ini sebesar 170 Milyar. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- Dalam pemasaran ikan dan produk perikanan internasional, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh para eksportir adalah standar dan aturan yang berbeda yang diberlakukan oleh negara-negara importir pada negara eksportir untuk menjamin bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan. Bahkan sesudah ratifikasi langkah-langkah Perjanjian *Sanitary dan Phytosanitary (Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan Perjanjian Hambatan Teknis pada Perdagangan, *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*, dibawah the World Trade Organization (WTO), perbedaan-perbedaan diantara standar-standar nasional yang bermacam-macam dan sistem pemeriksaan mungkin mempertahankan atau menciptakan hambatan perdagangan non-tarif yang baru.
- Globalisasi pada perdagangan makanan dan juga perkembangan teknologi dalam produksi perikanan, penanganan, pengolahan dan distribusi serta peningkatan kepedulian dan permintaan konsumen untuk keamanan dan mutu makanan yang tinggi menjadikan keamanan pangan dan jaminan kualitas yang tinggi dalam

kepedulian publik dan prioritas bagi banyak pemerintahan. Ini ditunjukkan dengan serangkaian kekhawatiran akan keamanan pangan pada tahun 1990-an dengan munculnya penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) dan perhatian pada inovasi bioteknologi (GMO- modifikasi organisme genetik). Akibatnya banyak negara melakukan pengawasan yang ketat atas produk pangan yang gilirannya akan berdampak pada penambahan biaya importasi.

- Akhir-akhir ini, perhatian publik di negara maju terhadap tentang sanitary dan hygiene produk pangan telah meningkat. Hal ini menyebabkan negara pengimpor (negara maju) melakukan pengetatan atas aturan keamanan produk baik untuk produk domestik maupun produk impornya. Negara-negara berkembang sering mengeluhkan bahwa mereka terkena dampak aturan sanitary & phytosanitary yang ketat dari negara-negara importir utama. Perbedaan peraturan negara-negara pengimpor, standar, tatalaksana dan sistem inspeksi merupakan contoh kesulitan yang dihadapi negara berkembang, seperti Indonesia.

(5). Persentase Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing Yang Tertangani sd P.21

Penangkapan ikan secara ilegal atau lebih dikenal dengan *illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau resmi. Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing). Tindakan IUU Fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar daerah maupun antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Convention on The Law Sea 1982* (UNCLOS 1982). Untuk itu harus ada penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan nelayan asing beserta kapalnya untuk diproses secara hukum. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan perbatasan dengan

negara lain. Dalam penegakan hukum tersebut, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional.

Sudah banyak regulasi yang diundangkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum terkait IUU Fishing, beberapa diantaranya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Namun demikian kasus pelanggaran IUU Fishing masih saja terjadi.

Untuk di Kalimantan Selatan sendiri, terhitung sejak Januari hingga pertengahan Desember 2023, jumlah kasus IUU *Fishing/Destructive Fishing* yang tertangani sampai dengan P.21 di Kalimantan Selatan tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah kasus tahun 2022 lalu. Adapun jumlah perkara yang ditangani sd. P.21 pada tahun 2023 sebanyak 7 kasus. Sementara itu pada tahun 2022 tercatat sebanyak 9 kasus. Dengan demikian pada tahun 2023 terjadi penurunan perkara IUU Fishing sebanyak 2 kasus dari tahun 2022 sebelumnya. Berikut jumlah perkara IUU Fishing yang tertangani sd. P. 21 selama tahun 2023:

Tabel 3.11. Jumlah Perkara IUU Fishing Yang Tertangani sd. P.21 Tahun 2023

No.	Instansi/Aparat Penegak Hukum Yang Menangani	Perkara Perikanan Yang Ditangani (kasus)	Perkara Perikanan Yang Ditangani sd. Tahap P.21 (kasus)	Persentase Capaian (%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%	(6)
1.	Polair Polres Hulu Sungai Tengah bekerjasama dengan PPNS Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Hulu Sungai Tengah	2	2	100,00	Setrum
2.	Polair Polda Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	5	5	100,00	Setrum
Jumlah		7	7	100,00	
		Rata-rata Capaian		100,00	
		Kategori Capaian		Sangat Muemuaskan	

Sumber: Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2023)

Selain pengenaan sanksi pidana perikanan, seiring dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, maka di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 ini terdapat kasus perikanan yang putusan perkaranya bersifat sanksi administratif, baik berupa pengenaan denda administratif dan pemberian Surat Peringatan. Berikut rincian data pengenaan saksi administratif tahun 2023:

Tabel 3.12. Pengenaan Sanksi Administratif Tahun 2023

No.	Jenis Sanksi Administratif	Jumlah Perkara Administratif (kasus)	Instansi/Aparat Penegak Hukum Yang Menangani
1.	Pengenaan Denda	4	Satwas SDKP Tarakan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Pemberian Surat Peringatan I	7	
Jumlah		11	

Sumber: Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2023)

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan jumlah kasus perikanan yang ditangani oleh aparat penegak hukum di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2023 adalah sebanyak 18 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13. Penanganan Kasus Perikanan Tahun 2023

No.	Jenis Sanksi	Jumlah Perkara (kasus)
1.	Pengenaan Sanksi Pidana	7
2.	Pengenaan Sanksi Administratif	
	- Pengenaan Denda	4
	- Pemberian Surat Peringatan I	7
Jumlah		18

Sumber: Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2023)

Permasalahan dan Langkah Strategis Dalam Rangka Optimalisasi Pengendalian Kasus IUU Fishing/Destructive Fishing di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Permasalahan Utama	Langkah Strategis	Penanggung Jawab
1.	Belum terpetakannya titik rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan di wilayah perairan laut sd. 12 mil, dan di wilayah perairan umum daratan Provinsi Kalimantan Selatan	Penyusunan Peta Wilayah Rawan Pelanggaran Hukum di Bidang Perikanan di Wilayah Laut sd. 12 Mil Provinsi Kalimantan Selatan Penyusunan Peta Wilayah Rawan Pelanggaran Hukum di Bidang Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.	Belum adanya kajian awal untuk menyusun produk hukum daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; dan Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	
3.	Belum adanya kajian awal untuk menyusun produk hukum daerah yang mengatur tentang Pengelolaan sumber daya kelautan; pengelolaan sumber daya perikanan; serta pengaturan kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	

Sumber: Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2023)

(6). Persentase Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Berdasarkan Dokumen RZWP3K yang ditetapkan pada tahun 2018, total luas kawasan ekosistem pesisir kritis di Kalimantan Selatan adalah 12.353,10 Ha, dimana untuk luas kawasan kritis ekosistem mangrove seluas 4.972 Ha dan luas kawasan kritis ekosistem terumbu karang seluas 7.381 Ha.

Target persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi pada tahun 2023 ini adalah sebesar 1,26%. Sementara itu realisasi capaian tahun 2023 tercatat sebesar 1,41%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja persentase ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi pada tahun 2023 ini dengan capaian sebesar 111%.

Pada tahun 2023 ini berdasarkan anggaran yang tersedia pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut, kegiatan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir dapat dilaksanakan :

- a. kegiatan rehabilitasi terumbu karang di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru seluas **1 Ha**,
- b. kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Tanah Laut seluas **5 Ha**,
- c. kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru seluas **42,6 Ha**.

Adapun perkembangan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir di Kalimantan Selatan sd. tahun 2023 yang bersumber dari APBD dan Non APBD Provinsi Kalimantan Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.14. Perkembangan Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Pesisir sd Tahun 2023

No	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir sd. 2017	Tahun	Terumbu Karang (Ha)	Mangrove (Ha)	Total Pada Tahun n	Total sd Tahun n	Sisa Luas Kawasan Ekosistem	% Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem	% Akumulasi Berkurangnya Luas Kawasan
1	12.353,10	sd. 2017	28	58	86	86	12.267,10	–	0,70
2		2018	2	3	5	91	12.262,10	0,0408	0,74
3		2019	1	3,30	4,3	95,30	12.257,80	0,0351	0,78
4		2020	0,25	–	0,25	95,55	12.257,55	0,0020	0,78
5		2021	3	4	7	102,55	12.250,55	0,0571	0,84
6		2022	3	20,10	23,10	125,65	12.227,45	0,1886	1,03
7		2023	1	47,60	48,60	174,25	12.178,85	0,3975	1,43

Sumber : Bidang PRL (2023)

4). Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Berikut program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2023 :

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui:

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil, dengan Sub Kegiatan berupa:

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT;
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT;
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, melalui:

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan.
- b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, melalui:

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing.

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melalui:

- a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sd 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat;
 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut.
- c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melalui:

- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
 - Penumbuhan dan Pengembangan POKMASWAS
- b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya.

II. Eselon II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.15. Perjanjian Kinerja Eselon II

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	211.000 Ton
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	167.419 Ton
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	63,00 Kg/Kapita
4	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	135,80 Ha
5	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	100%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Point
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	1

1). Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Eselon II

Berikut disajikan target dan realisasi sasaran strategis dan indikator kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023

Tabel 3.16. Target dan Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Kepala Dinas		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	211.000 Ton	210.097,47 Ton	99,57%
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	167.419 Ton	157.116,78 Ton	93,85%
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	63,00 Kg/Kapita	64,64 Kg/Kapita	102%
4	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	135,80 Ha	174,25 Ha	128,31%
5	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Point	87,88	103%
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	1	1	100%

Rata-rata Capaian	100%
Kategori Capaian	Sangat Memuaskan

(1). Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Pengertian :

Jumlah total produksi perikanan tangkap merupakan jumlah hasil produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum daratan yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun n (tahun berjalan), dengan satuan hitung ton.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah total produksi perikanan tangkap dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$JTPPT_n = JPPTL_n + JPPTPUD_n$$

Dimana :

$JTPPT_n$ = Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Pada Tahun n

$JPPTL_n$ = Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Laut Pada Tahun n

$JPPTPUD_n$ = Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan Pada Tahun n

Sumber : Data Terolah dari Aplikasi Satu Data Statistik-KKP (2023)

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah total produksi perikanan tangkap dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 JTPPT_n &= JPPTL_n + JPPTPUD_n \\
 &= 148.692,00 + 61.405,47 \\
 &= \mathbf{210.097,47 \text{ **) Ton}}
 \end{aligned}$$

Keragaan Produksi Perikanan Tangkap di Kalimantan Selatan pada tahun 2023:

Target = 211.000,00 Ton

Capaian = 210.097,47 **) Ton

**) = angka sangat sementara karena belum diselenggarakannya kegiatan

validasi nasional oleh KKP untuk Statistik Perikanan Tangkap.

Dengan demikian realisasi sementara untuk total produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 adalah 210.097,47 **) ton atau lebih sedikit 902,53 ton jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 211.000,00 ton.

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator total produksi perikanan tangkap tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian Produksi Perikanan Tangkap} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\% \\ \% \text{ Capaian Produksi Perikanan Tangkap} &= \frac{210.097,47}{211.000,00} \times 100\% \\ \% \text{ Capaian Produksi Perikanan Tangkap} &= \mathbf{99,57\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja produksi perikanan tangkap tahun 2023 adalah sebesar 99,57% (Sangat Memuaskan).

Berikut pada Tabel 3.17 disajikan data produksi perikanan tangkap kabupaten/kota se Kalimantan Selatan tahun 2023 :

Tabel 3.17. Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2023 **) Ton		
		Tangkap Laut	Tangkap PUD	Total
1	Balangan		833,80	833,80
2	Banjar (Martapura)	7.312	1.406,01	8.718,01
3	Barito Kuala	4.469	5.554,57	10.023,57
4	Hulu Sungai Selatan		8.849,95	8.849,95
5	Hulu Sungai Tengah		8.206,98	8.206,98
6	Hulu Sungai Utara		13.487,30	13.487,30
7	Banjarbaru		343,01	343,01
8	Banjarmasin		2.106,75	2.106,75
9	Kotabaru	66.875	6.270,70	73.145,70
10	Tabalong		1.958,18	1.958,18
11	Tanah Bumbu	43.666	2.618,02	46.284,02
12	Tanah Laut	26.370	6.146,60	32.516,60
13	Tapin		3.623,60	3.623,60

	Total	148.692	61.405,47	210.097,47
--	--------------	----------------	------------------	-------------------

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

(2). Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Pengertian.

Jumlah total produksi perikanan budidaya merupakan jumlah hasil produksi pembesaran yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun n (tahun berjalan), dengan satuan hitung ton.

Rumus :

Adapun rumus perhitungan jumlah total produksi perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

$$JTPPB_n = JPPBP \text{ se Kalimantan Selatan pada tahun n (2023)}$$

Dimana :

$JTPPB_n$ = Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Pada Tahun n

$JPPBP$ = Jumlah Produksi Pembesaran Budidaya Perikanan

Sumber : Data Terolah dari Aplikasi Satu Data Statistik-KKP (2023)

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi jumlah total produksi perikanan budidaya dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi tahun 2023 sebagai berikut:

$$JTPPB_n = JPPBP \text{ se Kalimantan Selatan pada tahun n (2023)}$$

$$= 157.116,78 \text{ **) Ton}$$

Keragaan Produksi Perikanan Budidaya di Kalimantan Selatan pada tahun 2023:

Target = 167.419 Ton

Capaian = 157.116,78 **) Ton

**) = angka sangat sementara karena belum diselenggarakannya kegiatan validasi nasional oleh KKP untuk Statistik Perikanan Budidaya

Dengan demikian realisasi sementara untuk total produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 adalah 157.116,78 **) ton atau lebih sedikit 10.302,22 ton jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 167.419 ton.

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator total produksi perikanan tangkap tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian Produksi Perikanan Budidaya} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Produksi Perikanan Budidaya} = \frac{157.116,78}{167.419,00} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Produksi Perikanan Budidaya} = \mathbf{93,85\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja produksi perikanan budidaya tahun 2023 adalah sebesar 93,85% (Sangat Memuaskan).

Berikut pada Tabel 3.18 disajikan data produksi perikanan budidaya kabupaten/kota se Kalimantan Selatan tahun 2023 :

Tabel 3.18. Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Total Produksi Pembesaran Budidaya Perikanan Ton **)
1	Balangan	1.190,15
2	Banjar (Martapura)	49.906,51
3	Barito Kuala	12.685,61
4	Hulu Sungai Selatan	6.589,98
5	Hulu Sungai Tengah	2.888,03
6	Hulu Sungai Utara	30.089,81
7	Banjarbaru	449,96
8	Banjarmasin	2.598,00
9	Kotabaru	25.718,46
10	Tabalong	16.160,52
11	Tanah Bumbu	6.991,55
12	Tanah Laut	1.422,98

13	Tapin	425,22
	Total	157.116,78

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

(3). Angka Konsumsi Ikan

Pengertian :

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestic. Ikan mencakup ikan segar dan ikan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS (Badan Pusat Statistik).

Rumus :

Angka Konsumsi Ikan dapat diperoleh melalui beberapa cara diantaranya melalui: Penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat ($AKI = A + B + C$). Sumber data yang diperlukan dari hasil pelaksanaan Sensus sosial ekonomi nasional oleh BPS.

- Konsumsi rumah tangga merupakan jumlah konsumsi ikan segar, ikan dalam awetan, ikan dalam makan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan ($A = KIDS + KIDA + KIMJ + KIMU$).
- Konsumsi ikan diluar rumah tangga adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran dan catering ($B = 8\% \times A$).
- Konsumsi ikan tak tercatat adalah jumlah konsumsi ikan dari Rumah sakit, Lembaga pemasyarakatan, pondok pesantren dan panti asuhan ($C = 5,5\% \times (A + B)$)

Adapun rumus perhitungan AKI adalah sebagai berikut :

$$AKI = A + B + C$$

Dimana :

A = Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT)

B = Konsumsi Luar Rumah Tangga

C = Konsumsi Tidak Tercatat

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi AKI tahun 2023 sebagai berikut:

Rekapitulasi Angka Konsumsi Ikan (AKI) periode bulanan tahun 2023 untuk sampel 3 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan :

- 1 Kota Banjarmasin = 54,31 Kg/Kapita/Tahun
- 2 Kabupaten Banjar = 35,28 Kg/Kapita/Tahun
- 3 Kabupaten Hulu Sungai Utara = 66,50 Kg/Kapita/Tahun

A adalah Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT) dari rekapitulasi AKI periode bulanan tahun 2023

$$\begin{aligned}A &= 54,31 + 35,28 + 66,50 \\A &= 156,09 \\A &= 156,09 / 3 \\A &= 52,03 \text{ Kg/Kapita/Tahun}\end{aligned}$$

B adalah Konsumsi Luar Rumah Tangga

$$\begin{aligned}B &= 9\% \text{ dari } A \\B &= 52,03 \times 9\% \\B &= 4,68 \text{ Kg/Kapita/Tahun}\end{aligned}$$

C adalah Konsumsi Tidak Tercatat

$$\begin{aligned}C &= A + B \times 14\% \\C &= 52,03 + 4,68 \times 14\% \\C &= 56,71 \times 14\% \\C &= 7,93 \text{ Kg/Kapita/Tahun}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{AKI} &= A + B + C \\&= 52,03 + 4,68 + 7,93 \\&= \mathbf{64,64 \text{ Kg/Kapita/Tahun}}\end{aligned}$$

Keragaan AKI di Kalimantan Selatan pada tahun 2023:

$$\begin{aligned}\text{Target} &= 63,00 \text{ Kg/Kapita/Tahun} \\ \text{Capaian} &= 64,64 \text{ **) Kg/Kapita/Tahun} \\ \text{**) } &= \text{angka sangat sementara}\end{aligned}$$

Sementara itu untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator AKI tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ AKI} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian AKI} = \frac{64,64}{63,00} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian AKI} = \mathbf{102\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja AKI tahun 2023 adalah sebesar 102% (Sangat Memuaskan).

Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa Angka Konsumsi Ikan Kalimantan Selatan tahun 2023 tercatat sebesar 64,64%. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu 6 tahun terakhir sejak tahun 2016.

(4). Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Pengertian :

Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi merupakan akumulasi luas ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi sampai dengan tahun n (sampai dengan tahun berjalan) dengan satuan hitung Ha (Hektar). Kawasan ekosistem pesisir yang direhabilitasi adalah kawasan mangrove dan kawasan terumbu karang.

Rumus :

Adapun cara menghitung luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi adalah sebagai berikut :

$$A = B + C$$

Dimana :

A = Jumlah Total Luas Kawasan Ekosistem Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun 2023

B = Jumlah Total Luas Kawasan Ekosistem Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun 2022

C = Jumlah Total Luas Kawasan Ekosistem Yang Direhabilitasi Pada Tahun 2023

Sumber : Data Terolah dari Bidang Pengelolaan Ruang Laut (2023)

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A &= B + C \\ &= 125,65 \text{ Ha} + 48,60 \text{ Ha} \\ &= \mathbf{174,25 \text{ Ha}} \end{aligned}$$

Keragaan Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi pada tahun 2023:

Target = 135,80 Ha

Capaian = 174,25 Ha

Dan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian Luas Kawasan Yang Direhabilitasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Luas Kawasan Yang Direhabilitasi} = \frac{174,25}{135,80} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian Luas Kawasan Yang Direhabilitasi} = \mathbf{128,31\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi pada tahun 2023 adalah sebesar 128,31% (Sangat Memuaskan).

(5). Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku

Pengertian :

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku adalah persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperiksa kepatuhannya pada tahun n, dengan satuan hitung %.

Data persentase kepatuhan diperoleh pada saat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha kelautan dan perikanan. Usaha kelautan dan perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang terdiri dari pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pelaku usaha di bidang pengolahan hasil perikanan; dan pelaku usaha di bidang pembudidayaan ikan.

Rumus :

Untuk menghitung persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan per-UU yang berlaku menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$X_{psdp} = \frac{\sum_{i=1}^n \left[\frac{C_i}{S_i} \times 100\% \right]}{n}$$

Dimana:

X_{psdp} = Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku

C_i = Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh

S_i = Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Sumber : Data Terolah dari Bidang PSDKP (2023)

Capaian Kinerja :

Realisasi persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan per-UU yang berlaku tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$X_{psdp} = \frac{\sum_{i=1}^n \left[\frac{C_i}{S_i} \times 100\% \right]}{n}$$

$$X = \frac{1.798/1.798 \times 100\% + 350/350 \times 100\% + 1.651/1.651 \times 100\%}{3}$$

$$X = \frac{100 + 100 + 100}{3}$$

$$X = \frac{300}{3}$$

$$X = \mathbf{100\%}$$

Keragaan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku pada tahun 2023:

Target = 100%

Capaian = 100%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan per-UU yang berlaku pada tahun 2023 adalah sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

Berikut disajikan pada tabel 3.19 hasil evaluasi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan per-UU yang berlaku berdasarkan objek yang diperiksa

Tabel 3.19. Hasil Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Per-UU Yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No.	Uraian	Objek Yang Diperiksa	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang Diperiksa Kepatuhan nya	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang Patuh	Persentase % Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=((5)/(4))*100%
1.	Persentase Kepatuhan Operasional Kapal Perikanan Terhadap Per-UU (X_t)	Jumlah kepemilikan kapal penangkapan ikan nelayan di laut berdasarkan ukuran (unit)			
		≤ 5 GT	1.079	1.079	100,00
		6 sd. 30 GT	719	719	100,00
				Rata-rata x_t	100,00
2.	Persentase Kepatuhan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Terhadap Per-UU (X_o)	Pengolah Hasil Perikanan	200	200	100,00
		Pemasar Hasil Perikanan	150	150	100,00
				Rata-rata x_o	100,00
3.	Persentase Kepatuhan Usaha Pembudidayaan Ikan Terhadap Per-UU (x_b)	Pembudidayaan Ikan Laut	2	2	100,00
		Pembudidayaan Ikan Air Payau	141	141	100,00
		Pembudidayaan Ikan Air Tawar	1.508	1.508	100,00
				Rata-rata x_b	100,00
			$X_{psdp} = ((x_t) + (x_o) + (x_b)) / 3$		100,00
				Rata-rata Capaian	100,00
				Kategori Capaian	Sangat Memuaskan

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap, PP Kotabaru, PP Batulicin, Bidang BP2HP, BPMHP, dan Bidang PSDKP (2023)

(6). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengertian :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang berada di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta 7 UPTD. Hasilnya berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Rumus :

Nilai IKM pada tahun n diperoleh dengan cara merata-ratakan nilai IKM UPP Dinas dan 7 UPTD pada tahun n. Berikut persamaan untuk menghasilkan IKM tahun n:

$$IKM_{Tn} = \frac{TIKM_{UPP\ Tn}}{TUKPP}$$

Dimana:

- IKM_{Tn} = Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Tahun n
 $IKMD_{Tn}$ = Nilai Total IKM Pada UPP Dinas Pada Tahun n
 $TUKPP$ = Jumlah Total Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Pada Dinas dan UPTD

Capaian Kinerja :

Berikut nilai IKM pada UPP di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023:

Tabel 3.20. Nilai IKM pada UPP di UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023

No	Unit Kerja	Nilai IKM Tahun 2023
1	PP Banjarmasin	90.31
2	PP Batulicin	92.10
3	PP Muara Kintap	87.85
4	PP Kotabaru	83.84
5	BPMHP	91.85
6	PBKL	85.25
7	PBAPL Kotabaru	83.99
	Total	615.19

Sumber: 7 UPTD

Dari tabel tersebut di atas, maka:

Jika diketahui:

- Nilai total IKM pada UPTD = 615.19
- Jumlah total UPTD = 7 unit

$$IKM_{Tn} = \frac{TIKM_{UPP\ Tn}}{TUKPP}$$

$$IKM_{2022} = \frac{615.19}{7}$$

$$IKM_{2023} = \mathbf{87.88}$$

Target Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 ditetapkan yaitu dengan nilai 85. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang tercapai dengan nilai 86,43 maka realisasi tersebut dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$\% A = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% A = \frac{87,88}{85} \times 100\%$$

$$\% A = 103\%$$

(7). Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan

Pengertian :

Jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dan 7 (tujuh) UPTD pada tahun n.

Rumus :

Berikut persamaan untuk menghasilkan IPPT tahun n:

$$JIPPT = JIPPG_{Tn}$$

Dimana:

JIPPT = Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan

JIPPG_{Tn} = Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Tahun n

Capaian Kinerja :

Berikut daftar inovasi pelayanan publik yang dihasilkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta UPTD sampai dengan tahun 2023:

Tabel 3.21. Daftar Inovasi Pelayanan Publik Yang Dihasilkan Oleh Dinas Beserta UPTD sampai dengan Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Inovasi Pelayanan Publik	
		Nama Pelayanan Publik	Tahun
1.	Dinas	- Sifaras - Sepat-BP2HP	2021 2022
2.	UPTD		
	1)PP Banjarmasin	Sipeda	2019
	2)PP Batulicin	-	-
	3)PP Muara Kintap	-	-
	4)PP Kotabaru	E-Lakasi	2020
	5)BPMHP	E-Mutusilkan	2019
	6)BPKL	-	-
	7)PBAPL Kotabaru	-	-
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sd. Tahun 2023		5 buah	

Sumber: Dislautkan Prov. Kalsel + 7 UPTD (2023)

Salah satu inovasi pelayanan public yang menjadi unggulan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah E_MUTUSILKAN yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPTD-BPMHP).

E_MUTUSILKAN dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas layanan pengujian mutu hasil perikanan, terlebih khususnya penyampaian permohonan pengujian mutu hasil oleh para pengguna jasa yakni para pengusaha perikanan.

E_MUTUSILKAN yang diterapkan pada tahun 2019 yang lalu, merupakan salah satu inovasi untuk mempermudah para pengguna jasa, yang dulunya menggunakan pelayanan manual dimana para pengguna jasa datang ke kantor untuk melakukan permohonan pengujian mutu hasil perikanan sehingga satu kali pengujian para pengguna jasa perlu mendatangi Kantor UPTD BPMHP Kalimantan Selatan sampai berkali-kali. Dengan adanya aplikasi E_MUTUSILKAN, para pengguna jasa cukup melakukan permohonan uji melalui online di perusahaan masing-masing.

Pada tahun 2022, pengembangan aplikasi E_MUTUSILKAN terus dilakukan, yakni adanya penambahan Virtual Account untuk para pengguna jasa untuk mengetahui rekam jejak permohonan para pengguna jasa. Sehingga para pengguna jasa akan mengetahui rekam jejak permohonan masing-masing untuk mempermudah memantau penyelesaian pengujian yang dilakukan oleh UPTD BPMHP Kalimantan Selatan.

2). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a). Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi		Capaian (%)
			2022	2023	
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	211.000 Ton	207.254	210.097,47	99,57%
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	167.419 Ton	130.355,18	157.116,78	93.85%
3	Angka Konsumsi Ikan	63,00 Kg/Kapita	64,11	64,64	102%
4	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	135,80 Ha	125,65	174,25	128,31%
5	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Point	85,34 Point	87,88 Point	103%
7	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	1	5	1	100%
Rata-Rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

b). Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.23 ditampilkan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 ini dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023		Capaian (%)
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	207.229	218.546	207.254	211.000 Ton	210.097,47 Ton	99,57%
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	136.957	148.814,63	130.355,18	167.419 Ton	157.116,78 Ton	93.85%
3	Angka Konsumsi Ikan	60,24	63,74	64,11	63,00 Kg/Kapita	64,64 Kg/Kapita	102%
4	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	95,55	102,55	125,65	135,80 Ha	174,25 Ha	128,31%
5	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	85,34	85 Point	87,88 Point	103%
7	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	-	4	5	1	1	100%
Rata-Rata Capaian							100%
Kategori Capaian							Sangat Memuaskan

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

(1). Produksi Perikanan Tangkap

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Jumlah total produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 ini masih bersifat angka sementara, karena untuk perhitungan angka produksi baru akan dilaksanakan pada semester II (2024). Trend produksi perikanan tangkap yang cenderung mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir tentunya menjadi perhatian penting untuk segera dilaksanakannya revitalisasi usaha perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dimaksudkan agar target produksi perikanan tangkap tahun 2023 yang sebesar 211.000,00 ton dapat tercapai.

Sejauh ini upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah dengan cara meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan melalui penyediaan paket bantuan sarana perikanan tangkap ramah lingkungan, pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum melalui pelepasliaran (restocking) ikan lokal di reservaat perairan umum, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM nelayan untuk meningkatkan kemandirian usahanya.

Dan berikut pada Tabel 3.24 disajikan data perkembangan jumlah total produksi perikanan tangkap dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.24. Data Perkembangan Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap sd Tahun 2023

Uraian	Tahun (Ton)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Laut	179.696,11	186.453	127.139	136.949	157.645	144.588	148.692
Produksi PUD	67.914,89	75.697	83.130	70.280	60.901	62.666	61.405,47
Total Produksi Perikanan Tangkap	247.611	262.149	210.269	207.229	218.546	207.254	210.097,47

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

Maksimum Sustainable Yield (MSY) atau Potensi Lestari Sumberdaya Ikan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 270.000 Ton.

Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) untuk program sumberdaya perikanan berkelanjutan, dengan indikator kinerja proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu $\leq 72\%$ untuk tahun 2023.

Perhitungan JTB dari Potensi Lestari :

$$\text{JTB} = \frac{210.097,47 \text{ Ton}}{270.000 \text{ Ton}} \times 100\% = 77,82\%$$

Dari hasil produksi perikanan tangkap Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah 210.097,47 Ton, maka 77,82% hasil yang didapat dari potensi lestari.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Terjadinya fluktuasi angka produksi perikanan tangkap di Kalimantan Selatan pada tiga tahun terakhir didasari oleh beberapa faktor, yaitu:

Usaha Penangkapan Ikan di Laut

- Status proporsi tangkapan laut di WPP-712 dan WPP-713 pada tahun 2021, 2022, dan 2023 berada di atas batasan biologis aman (> 100% dari JTB yang ditentukan).
- Produksi tangkapan laut tahun 2022 sebesar 144.588 ton lebih besar 1% dari JTB 144.000, dan lebih kecil 1,25% dari potensi lestari MSY 180.000.
- Ikan pelagis kecil di WPP-712 berada pada kondisi fully exploited.
- Komoditas perikanan tangkap laut di WPP-713 yang berada pada kondisi fully exploited, yaitu: Udang Penaeid, Lobster, Ikan Demersal, Ikan Karang, Ikan Pelagis Besar, dan Tongkol.

Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan

Beberapa faktor yang mendasari penurunan angka produksi perikanan tangkap Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 pada perairan umum darat sebesar 61.405 ton yang mengalami penurunan sebesar 2,05 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 62.666 ton, disebabkan terjadinya penurunan kegiatan penangkapan ikan karena faktor cuaca dan iklim yang menyebabkan sumberdaya perikanan diwilayah perairan terkait berkurang cukup signifikan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Mengusulkan peningkatan anggaran pada Bidang Perikanan Tangkap, khususnya pada kegiatan restocking ikan dan pengadaan alat tangkap ikan di perairan darat.

(2). Produksi Perikanan Budidaya

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Jumlah total produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 ini masih bersifat angka sementara, karena untuk perhitungan angka produksi baru akan dilaksanakan pada semester II (2024). Trend produksi perikanan budidaya yang cenderung mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir tentunya menjadi perhatian penting untuk segera dilaksanakannya revitalisasi usaha perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dimaksudkan agar target produksi perikanan budidaya tahun 2023 yang sebesar 164.419,00 ton dapat tercapai.

Sejauh ini upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah dengan cara meningkatkan produksi dan produktifitas pembudidaya ikan melalui penyediaan paket bantuan berupa sarana pembudidayaan ikan yang berupa paket bantuan benih udang windu, benih ikan bandeng, dan bibit rumput laut yang diserahkan ke kelompok pembudidaya, selain itu juga dilakukan kegiatan pengembangan ikan gabus haruan skala industry, kegiatan ini baru pada tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED), dilaksanakannya kegiatan pembinaan kepada pembudidaya ikan dengan melaksanakan kegiatan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan juga dengan melaksanakan kegiatan monitoring hama dan penyakit ikan ke beberapa kabupaten.

Dan berikut pada Tabel 3.25 disajikan data perkembangan jumlah total produksi perikanan budidaya dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.25. Data Perkembangan Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya sd Tahun 2023

Uraian	Tahun (Ton)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Produksi Budidaya	164.715	177.852,20	136.870,99	136.957	148.814,63	130.355,18	157.116,78

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa faktor yang mendasari penurunan angka produksi perikanan budidaya Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 disebabkan oleh cenderung naiknya harga pakan, harga jual ikan di petani ikan yang cenderung turun yang menyebabkan para pembudidaya menahan siklus produksi budidaya ikan dan juga adanya kematian ikan yang disebabkan oleh factor alam, selain itu permasalahan utama yang dihadapi oleh pembudidaya ikan adalah terbatasnya permodalan usaha.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sekaitan dengan terbatasnya modal usaha oleh para pembudidaya ikan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan menyediakan paket bantuan hibah sarana budidaya bagi Kelompok Pembudidaya Ikan. Bantuan tersebut sifatnya stimulan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas usaha perikanan.

(3). Angka Konsumsi Ikan

Trend meningkatnya AKI Kalimantan Selatan mengindikasikan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan gemar makan ikan, terutama ikan lokal seperti ikan gabus haruan, papuyu, dan toman yang habitat hidupnya berada di lahan basah seperti rawa dan sungai. Kondisi tersebut memberi dampak pada pemenuhan kebutuhan ikan lokal, khususnya ikan gabus haruan relative lebih tinggi dibanding ikan jenis lain. Pada musim tertentu, ketersediaan terbatas dan permintaan yang tinggi menyebabkan harga ikan gabus haruan menjadi naik, bahkan dapat menjadi pendorong inflasi daerah.

Sebagai upaya untuk pengendalian inflasi ikan gabus haruan tersebut, maka pada rencana pembangunan kelautan dan perikanan jangka menengah, pengembangan perikanan budidaya ikan gabus haruan menjadi prioritas pembangunan tahun 2021-2026. Eksisting sumber daya lahan basah yang cukup potensial di Kalimantan Selatan memberikan peluang untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi ikan gabus haruan, serta stabilisasi ketahanan pangan daerah.

Di sisi lain, untuk pengembangan hilirisasi usaha perikanan sekaligus mendukung program pemerintah dalam rangka pengendalian stunting di Kalimantan Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya akan mengembangkan sentra industri Hidrolisat Protein Ikan (HPI) di Kalimantan Selatan.

Dan berikut pada Tabel 3.26 disajikan data perkembangan Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.26. Data Perkembangan Angka Konsumsi Ikan sd Tahun 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Konsumsi Ikan	50,20	51,65	57,99	60,24	63,74	64,11	64,64

- Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Dalam rangka akselerasi pencapaian kinerja luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi sesuai dengan target pada akhir tahun RENSTRA Tahun 2026, maka upaya yang dilakukan adalah dengan pengusulan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang maupun kegiatan lain yang mendukung program dari Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia maupun pihak swasta yang melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di wilayah kawasan kritis di pesisir Kalimantan Selatan.

Dan berikut pada Tabel 3.27 disajikan data perkembangan luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi di Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.27. Data Perkembangan Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Pesisir sd Tahun 2023

No	Database sd 2017	Tahun	Terumbu Karang	Mangrove	Total Pada Tahun n	Total sd Tahun n	Sisa Luas Kawasan Ekosistem	% Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem	% Akumulasi Berkurangnya Luas Kawasan
1	12.353,10	sd.2017	28	58	86	86	12.267,10	-	0,70
2		2018	2	3	5	91	12.262,10	0,0408	0,74
3		2019	1	3,30	4,30	95,30	12.257,80	0,0351	0,78
4		2020	0,25	-	0,25	95,55	12.257,55	0,0020	0,78
5		2021	3	4	7	102,55	12.250,55	0,0571	0,84
6		2022	3	20,10	23,10	125,65	12.227,45	0,1886	1,03
7		2023	1	47,60	48,60	174,25	12.178,85	0,3975	1,43

Sumber : Bidang Pengelolaan Ruang Laut (2023)

- Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang seluruhnya diseluruhnya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Keterbatasan sumberdaya untuk mengawasi perairan laut sampai dengan 12 mil tentunya mengharuskan Dinas Kelautan dan Perikanan meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Dinas Perikanan di Kabupaten/Kota, serta aparat dari instansi terkait. Selain itu, memberdayakan dan mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terus ditingkatkan.

Dan berikut pada Tabel 3.28 disajikan data perkembangan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.28. Data Perkembangan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sd Tahun 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
% Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	-	67%	98%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang PSDKP Tahun 2023

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang berisikan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pada tahun 2023, IKM di lingkup Unit Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 87.88 sementara itu target yang ditetapkan yaitu 85.

Strategi yang telah dilaksanakan secara umum yaitu:

- Kemudahan dalam memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
- Tersedia prosedur yang jelas, mudah dan tidak berbelit.
- Kompetensi dan kecakapan petugas dalam melayani pengguna telah memadai.

- Petugas memberikan pelayanan secara menyeluruh dan tuntas.
- Petugas menunjukkan kesungguhan dalam membantu.

Selain itu juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, yaitu:

- Petugas diharuskan lebih ramah.
- Kemampuan memahami materi untuk *Customer Service* perlu ditingkatkan.
- Lebih diperbaiki dan disempurnakan sistem perizinan online.
- Perlu penjelasan lebih detail terkait setiap prosedur.
- Informasi status permohonan layanan dapat lebih diberikan secara rinci.

- **Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan**

Pedoman dalam pengembangan inovasi pelayanan publik diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Inovasi pelayanan publik dimaksudkan untuk menyikapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah juga didorong untuk membudayakan semangat *one agency one innovation* (satu instansi satu inovasi). Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi. Sementara itu tujuan dikembangkannya inovasi pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kualitas, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Adapun tipe inovasi tersebut meliputi: inovasi produk, inovasi proses, inovasi organisasi, inovasi manajemen, inovasi produksi, inovasi komersial atau pemasaran, dan inovasi jasa.

Sampai dengan tahun 2023, jumlah inovasi pelayanan publik yang dicanangkan di lingkup UPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebanyak 5 (lima) buah inovasi sebagai berikut:

- E-Mutuskan di BPMHP.
- E-Lakasi di PP Kotabaru.
- Si Iwak Peda di PP Banjarmasin.

- Sepat_BP2HP di Bidang BP2HP.
 - Sifaras di Bidang Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan
- Diharapkan setiap tahunnya terdapat inovasi baru yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4). Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Berikut program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pada tahun 2023 :

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, melalui:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
 - c. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT;
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT;
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT.
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, melalui:
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;

- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, melalui:
 - a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing.
 - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melalui:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut sd 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat;
 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut.
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melalui:
 - a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
 - Penumbuhan dan Pengembangan POKMASWAS
 - b. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan berupa:
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya.
- Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Kesekretariatan

III. BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

III.1. SASARAN ESELON III BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

Tabel 3.29. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	Luas Akumulasi Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	135,80 Ha
		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan Rekomendasi Perizinannya	100%
		Persentase Cakupan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Masyarakatnya Dibina Keaktifan Kelembagaan Kelompoknya	100%

1). Perbandingan Realisasi Dengan Target

Berikut pada Tabel 3.30 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan pada kinerja utama dan indikator kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

Tabel 3.30. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	Luas Akumulasi Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	135,80 Ha	174,25 Ha	128,31%
		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan Rekomendasi Perizinannya	100%	100%	100%
		Persentase Cakupan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Masyarakatnya Dibina Keaktifan Kelembagaan Kelompoknya	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%	
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan	

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut (2023)

a. Luas Akumulasi Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi

Pengertian :

Merupakan akumulasi luas ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi sd tahun n.

Kawasan ekosistem pesisir yang direhabilitasi adalah kawasan mangrove dan kawasan terumbu karang.

Realisasi akumulasi luas kawasan kritis ekosistem wilayah pesisir ditentukan berdasarkan aksi kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilaksanakan sd. tahun n.

Rumus :

Adapun cara menghitung luas akumulasi kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi adalah sebagai berikut :

$$A = B + C$$

Dimana :

A = Jumlah Total Luas Kawasan Ekosistem Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun 2023

B = Jumlah Total Luas Kawasan Ekosistem Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun 2022

C = Jumlah Total Luas Kawasan Ekosistem Yang Direhabilitasi Pada Tahun 2023

Sumber : Data Terolah dari Bidang Pengelolaan Ruang Laut (2023)

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi luas akumulasi kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A &= B + C \\ &= 125,65 \text{ Ha} + 48,60 \text{ Ha} \\ &= \mathbf{174,25 \text{ Ha}} \end{aligned}$$

Keragaan Luas Akumulasi Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi pada tahun 2023:

$$\text{Target} = 135,80 \text{ Ha}$$

$$\text{Capaian} = 174,25 \text{ Ha}$$

Dan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator luas akumulasi kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{174,25}{135,80} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \mathbf{128,31\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja luas akumulasi kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi pada tahun 2023 adalah sebesar 128,31% (Sangat Memuaskan).

Dan berikut pada Tabel 3.31 disajikan data perkembangan luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi di Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.31. Data Perkembangan Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi sd Tahun 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	86 Ha	91 Ha	95,30 Ha	95,55 Ha	102,55 Ha	125,65 Ha	174,25 Ha

b. Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan Rekomendasi Perizinannya

Pengertian :

Perbandingan antara jumlah perusahaan yang diterbitkan izin rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil dengan jumlah perusahaan yang mengajukan izin rekomendasi pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil , di kali 100% yang dilaksanakan pada tahun n.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Selanjutnya pada pasal 17 menjelaskan bahwa Izin lokasi sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah ditetapkan.

Rumus :

Adapun cara menghitung persentase pemanfaatan ruang laut adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pemanfaatan Ruang Laut} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Dimana :

A adalah Jumlah Perusahaan Yang Diterbitkan Rekomendasi Izin Usahanya

B adalah Jumlah Perusahaan Yang Mengajukan Rekomendasi Izin Usahanya

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi persentase pemanfaatan ruang laut tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{ Pemanfaatan Ruang Laut} &= \frac{A}{B} \times 100\% \\ &= \frac{3}{3} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Keragaan Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan Rekomendasi Perizinannya pada tahun 2023:

Target = 100%

Capaian = 100%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja persentase pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang diterbitkan rekomendasi perizinannya pada tahun 2023 adalah sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

c. Persentase Cakupan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Masyarakatnya Dibina Keaktifan Kelembagaan Kelompoknya

Pengertian :

Perbandingan antara jumlah kelompok pelestari lingkungan yang dibina keaktifan kelembagaannya dengan jumlah kelompok pelestari lingkungan yang ada di Kalimantan Selatan di kali 100% yang dilaksanakan pada tahun n.

Rumus :

Adapun cara menghitung persentase cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya dibina keaktifan kelembagaan kelompoknya adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Kelompok Yang Aktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Dimana :

A adalah Jumlah Kelompok Yang Dibina Keaktifannya

B adalah Jumlah Kelompok Yang Ada di Kalimantan Selatan

Capaian Kinerja :

Dengan menggunakan rumus, maka diperoleh realisasi persentase cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya dibina keaktifan kelembagaan kelompoknya pada tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Kelompok Yang Aktif} &= \frac{A}{B} \times 100\% \\ &= \frac{4}{4} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Keragaan Persentase Cakupan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Masyarakatnya Dibina Keaktifan Kelembagaan Kelompoknya pada tahun 2023:

Target = 100%

Capaian = 100%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya dibina keaktifan kelembagaan kelompoknya pada tahun 2023 adalah sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

2). Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut:

Tabel 3.32. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		% Capaian
			2022	2023	
1	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	Luas Akumulasi Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	125,65 Ha	174,25 Ha	128,31%
		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan Rekomendasi Perizinannya	100%	100%	100%
		Persentase Cakupan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Masyarakatnya Dibina Keaktifan Kelembagaan Kelompoknya	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%	
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan	

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.33 disajikan perbandingan realisasi kinerja yang dicapai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						% Capaian
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	Luas Akumulasi Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	91 Ha	95,30 Ha	95,55 Ha	102,55 Ha	125,65 Ha	174,25 Ha	128,31%
		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Yang Diterbitkan Rekomendasi Perizinannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Cakupan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Masyarakatnya Dibina Keaktifan Kelembagaan Kelompoknya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian								100%	
Kategori Capaian								Sangat Memuaskan	

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2023 ini berdasarkan anggaran yang tersedia pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut, kegiatan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir yang dilaksanakan adalah:

- Rehabilitasi mangrove seluas 47,6 Ha terdiri dari:
 - a. 113.000 batang mangrove di Desa Tanjung Pangga, Kabupaten Kotabaru seluas 22,6Ha
 - b. 100.000 batang mangrove di Desa Segumbang, Setarap, Kersik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu seluas 20 Ha
 - c. 25.000 batang mangrove di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut seluas 5 Ha
- Rehabilitasi terumbu karang seluas 1 Ha, untuk pemasangan 200 unit transplantasi karang dan terumbu karang buatan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Untuk indikator persentase pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mill di luar minyak dan gas bumi yang diterbitkan rekomendasi perizinannya pada tahun 2023 adalah 3 dokumen dengan target tahun ini yaitu 3 dokumen, telah dilakukan melalui kegiatan penunjang :

1. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut telah terealisasi 2 Kabupaten yakni Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru
2. Tinjau Lapang Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut telah terealisasi 3 Kabupaten yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan Tanah Laut.
3. Selain kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan penunjang untuk IKU tersebut yaitu Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2023 tentang Rencana *Tata Ruang* Wilayah Provinsi *Kalimantan Selatan* Tahun 2023-2042.

Dan untuk indikator persentase cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masyarakatnya dibina keaktifan kelembagaan kelompoknya, kegiatan telah terlaksana dan selesai pada awal juli, sebanyak 1 kelompok yang diadakan di daerah Tanah Bumbu, namun terjadi perubahan target dengan adanya APBD-P sehingga target kelompok yang semula 3 kelompok menjadi 4 kelompok dan pada tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 4 kelompok atau dengan capaian 100%.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut terutama pada kegiatan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir kritis (mangrove dan terumbu karang) adalah terbatasnya porsi anggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud.

c. Rencana Tindak Lanjut

Mengusulkan peningkatan anggaran pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut, khususnya pada kegiatan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir kritis (mangrove dan terumbu karang).

4). Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang Pengelolaan Ruang Laut, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

III.2. SASARAN ESELON IV LINGKUP BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT

III.2.1. Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut terdapat 2 indikator kinerja pada tahun 2023 ini, yaitu :

- a. Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola
- b. Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi

Berikut pada Tabel 3.34 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.34. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dan Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola	194.698,09 Ha	194.698,09 Ha	100%
2	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	48,60 Ha	48,60 Ha	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

a. Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola

Pengertian :

Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola adalah total jumlah luasan kawasan konservasi perairan (KKP) dan jumlah luasan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K) yang di monev/di kelola pada tahun n (tahun berjalan) dengan satuan Ha.

Berdasarkan KEPMEN KKP No. 69 Tahun 2020 untuk luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah 179.659,89 Ha dan luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) adalah 58.018,70 Ha berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (RZWP3K), jadi total keseluruhan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah 237. 678,59 Ha.

Rumus :

Untuk menghitung luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{LKKWP3KYT} = \text{Luas KKPYT tahun } n + \text{Luas KP3KYT tahun } n$$

Dimana :

LKKWP3KYT = Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola

Luas KKPYT tahun n = Luas Kawasan Konservasi Perairan Yang Terkelola pada tahun n

Luas KP3KYT tahun n = Luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{LKKWP3KYT} &= \text{Luas KKPYT tahun } n + \text{Luas KP3KYT tahun } n \\ &= 177.469,08 \text{ Ha} + 17.229,01 \text{ Ha} \\ &= \mathbf{194.698,09 \text{ Ha}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola pada tahun 2023 adalah 194.698,09 Ha. Adapun target Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja adalah 194.698,09 Ha, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2023 ini terealisasi 100% (Sangat Memuaskan).

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2023 ini dilaksanakan :

Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | KKP Angsana dan KKP Sungai Loban | 18.751,68 Ha |
| 2 | KKP Kotabaru yaitu Pulau Laut – Pulau Sembilan | 158.717,4 Ha |

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Kecamatan Kelumpang Selatan dan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru | 8.506,69 Ha |
| 2 | Kabupaten Tanah Bumbu | 242,80 Ha |
| 3 | Kabupaten Banjar Desa Sungai Rasau | ± 3.000 Ha |
| 4 | Kabupaten Barito Kuala | 5.722,32 Ha |

b. Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi**Pengertian :**

Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi adalah jumlah akumulasi luas kawasan terumbu karang dan kawasan mangrove yang direhabilitasi sampai dengan tahun n dengan satuan Ha.

Rumus :

Untuk menghitung luasan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Luas Wilayah Perairan Yang Direhabilitasi} = A + B$$

Dimana :

Luas Wilayah Perairan Yang Direhabilitasi = Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi

A = Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi pada tahun n

B = Luas Kawasan Terumbu Karang Yang Direhabilitasi pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Luas Wilayah Perairan} &= A + B \\ \text{Yang Direhabilitasi} &= 47,60 \text{ Ha} + 1 \text{ Ha} \\ &= \mathbf{48,60 \text{ Ha}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi pada tahun 2023 adalah 48,60 Ha. Adapun target Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja adalah 48,60 Ha. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pada tahun 2023 ini dilaksanakan di :

1	Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru	rehabilitasi terumbu karang	1,00 Ha
2	Kabupaten Tanah Laut	rehabilitasi mangrove	5,00 Ha
3	Kabupaten Tanah Bumbu	rehabilitasi mangrove	20,00 Ha
4	Kabupaten Kotabaru	rehabilitasi mangrove	22,60 Ha
Total			48,60 Ha

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut.

Tabel 3.35. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola	39.033,43 Ha	194.698,09 Ha	100%
2	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	23,10 Ha	48,60 Ha	100%
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Selanjutnya disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.36 :

Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Konservasi Ekosistem Laut Tahun 2022 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Tahun 2023		
		2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola	-	-	-	-	39.033,43 Ha	194.698,09 Ha	194.698,09 Ha	100%
2	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi	5 Ha	4,3 Ha	0,25 Ha	7 Ha	23,10 Ha	48,60 Ha	48,60 Ha	100%
Rata-rata Capaian Kategori Capaian								100%	100%
									Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

Dan pada Tabel 3.37 disajikan data perkembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan pada Tabel 3.38 disajikan data perkembangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 3.37. Data Perkembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kalimantan Selatan Dari Tahun 2016 - 2023

No	Tahun	Kawasan KKPD di Kalimantan Selatan (Lokasi)	Kawasan KKPD Yang di Monev Pengelolaannya	
			Jumlah	Lokasi
1	2016	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
2	2017	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
3	2018	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
4	2019	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
5	2020	5	0	-
6	2021	2	2	Kotabaru dan Tanah Bumbu
7	2022	179.659,89 Ha	27.954,48 Ha	Kotabaru dan Tanah Bumbu
8	2023	177.469,08 Ha	177.469,08 Ha	Kotabaru dan Tanah Bumbu

Tabel 3.38. Data Perkembangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) di Kalimantan Selatan Dari Tahun 2016 – 2023

No	Tahun	Kawasan KP3K di Kalimantan Selatan (Lokasi)	Kawasan KP3K Yang di Monev Pengelolaannya	
			Jumlah	Lokasi
1	2016	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
2	2017	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
3	2018	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
4	2019	5	5	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala dan Banjar
5	2020	5	0	-
6	2021	3	3	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
7	2022	58.018,70 Ha	11.078,95 Ha	Kotabaru dan Tanah Bumbu
8	2023	17.229,01 Ha	17.229,01 Ha	Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar dan Barito Kuala

Dan pada Tabel 3.39 disajikan data perkembangan luas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi selama kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 3.39. Data Perkembangan Luas Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Direhabilitasi Dari Tahun 2017 – 2023

Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis sd. Tahun 2017	Tahun	Luas Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis			
		Terumbu Karang (Ha)	Mangrove (Ha)	Total Pada Tahun N (Ha)	Total sd. Tahun N (Ha)
12.353,10 (Baseline Data)	sd. 2017	28	58	86	86
	2018	2	3	5	91
	2019	1	3,30	4,3	95,30
	2020	0,25	-	0,25	95,55
	2021	3	4	7	102,55
	2022	3	20,10	23,10	125,65
	2023	1	47,60	48,60	174,25

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

1. Melaksanakan rehabilitasi Terumbu Karang dan Kawasan Mangrove secara terkontrol dan terus menerus
2. Melaksanakan kaji tiru teknologi pengelolaan Terumbu Karang
3. Melaksanakan monev kawasan konservasi perairan dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Mengadakan sosialisasi Kepmen KP tentang Kawasan Konservasi Perairan

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

1. Keterbatasan anggaran yang tersedia
2. Musim yang selalu berubah-ubah sehingga terkadang proses rehabilitasi tidak berjalan sesuai rencana

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Mengusulkan peningkatan anggaran pada Seksi Konservasi Ekosistem Laut, khususnya pada kegiatan rehabilitasi pada kawasan kritis mangrove dan terumbu karang,
2. Terus melaksanakan rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik di kawasan konservasi maupun di luar kawasan.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Seksi Konservasi Ekosistem Laut maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

III.2.2. Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut terdapat 1 indikator kinerja pada tahun 2022 ini, yaitu Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut

Berikut pada Tabel 3.40 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.40. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Tercatatnya Izin Lokasi Peraiean Dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
Rata-rata Capaian					300%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut

Pengertian :

Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut adalah tercatatnya izin lokasi perairan dalam system kadaster laut yang dihasilkan pada tahun n (tahun berjalan) dengan satuan Dokumen.

Kadaster laut merupakan suatu sistem informasi kelautan yang sangat penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut oleh negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 33.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Dokumen} = \sum \text{Izin Lokasi Perairan Dalam Kadaster Laut pada tahun } n$$

Capaian Kinerja :

Realisasi Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Dokumen} &= \sum \text{Izin Lokasi Perairan Dalam Kadaster Laut pada tahun } n \\ &= \mathbf{3 \text{ Dokumen}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Kadaster Laut pada tahun 2023 adalah 3 Dokumen. Adapun target Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Kadaster Laut yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja adalah 1 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 300% (Sangat Memuaskan).

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut.

Tabel 3.41. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1	Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	2 Dokumen	3 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Selanjutnya disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.42 :

Tabel 3.42. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2023 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Tahun 2023		
		2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut	-	-	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian									100%
Kategori Capaian									Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan diberlakukannya PERMEN KP No. 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyatakan jika semua perizinan lokasi yang dilakukan harus sepengetahuan ijin Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2023 ini, ada sebanyak 3 perusahaan yang mengajukan izin lokasi yang telah diterbitkan yaitu :

Tabel 3.43. Data Pengaju Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023

No	Nama Pengaju	Perihal	Lokasi	Hasil Rekomendasi
1	PT. Bayan	Pengembangan Terminal Khusus	Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu	Sesuai dengan Pola Ruang berada pada Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Pelabuhan Laut
2	PT. Ambaper	Pengerukan dan Dumping Area	Muara Sungai Barito	Sesuai dengan Pola Ruang berada pada Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Pelabuhan Laut
3	Rumah Ikan Sungai Cuka	Penempatan Rumah Ikan	Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu	Sesuai dengan Pola Ruang berada pada Kawasan Pemanfaatan Umum Zona Perikanan Tangkap dan Zona Wisata
Jumlah Pengaju				3 Pengaju

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 ini tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut dalam rangka pencapaian target kinerja karena capaian kinerja telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun dengan terbatasnya porsi anggaran yang didapatkan menyebabkan masih kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan :

- Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut pada orang per-orangan, koperasi, korporasi serta instansi pemerintahan dan;
- Sosialisasi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Laut maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut

III.2.3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat 2 indikator kinerja pada tahun 2023 ini, yaitu :

- Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berikut pada Tabel 3.44 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Bidang Pengelolaan Ruang Laut berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023:

Tabel 3.44. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 Kelompok	4 Kelompok	100%
2	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	90 Orang	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023.

a. Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengertian :

Merupakan jumlah kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibina mengenai penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun n (tahun berjalan) dengan satuan kelompok.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Kelompok} = \sum \text{Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun } n$$

Capaian Kinerja :

Realisasi Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Kelompok} &= \sum \text{Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun } n \\ &= \mathbf{4 \text{ Kelompok}} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2023 adalah 4 kelompok. Adapun target jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja adalah 4 Kelompok. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

b. Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengertian :

Merupakan jumlah orang yang mengikuti sosialisasi mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan nilai post tes >80 pada tahun n (tahun berjalan) dengan satuan orang

Rumus :

Untuk menghitung jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Orang = $\sum$ Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dengan Nilai Post Tes >80 pada tahun n.

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Orang} &= \sum \text{Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Mitigasi} \\ &\quad \text{Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil} \\ &\quad \text{Dengan Nilai Post Tes >80 pada tahun n} \\ &= \mathbf{90 \text{ Orang}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2023 adalah 90 Orang. Adapun target jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja adalah 90 Orang. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tabel 3.45. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 Kelompok	4 Kelompok	100%
2	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	90 Orang	100%
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.46:

Tabel 3.46. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2023 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Tahun 2023		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 lokasi	3 Lokasi	3 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	100 %
2.	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	60 orang	150 orang	90 orang	90 orang	90 orang	100 %
Rata-rata Capaian						100%	
Kategori Capaian						Sangat Memuaskan	

Dan pada Tabel 3.47 disajikan data perkembangan jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan pada Tabel 3.48 disajikan data perkembangan jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 3.47. Data Perkembangan Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Tahun	Target Lokasi/Kelompok Yang Masyarakat Pesisirnya Dibina	Realisasi Lokasi/Kelompok Yang Masyarakat Pesisirnya Dibina	
			Jumlah	Lokasi
1	2018	4 Lokasi	4 Lokasi	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
2	2019	3 Lokasi	3 Lokasi	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
3	2020	2 Lokasi	-	-
4	2021	3 Lokasi	3 Lokasi	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
5	2022	3 Kelompok	3 Kelompok	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut
6	2023	4 Kelompok	4 Kelompok	Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

Tabel 3.48 Data Perkembangan Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Tahun	Jumlah Peserta Sosialisasi Mitigasi Bencana (Orang)	Jumlah Peserta Dengan Nilai Post Test >80 (Orang)
1	2018	60 Orang	60 Orang
2	2019	60 Orang	60 Orang
3	2020	60 Orang	60 Orang
4	2021	150 Orang	150 Orang
5	2022	90 Orang	90 Orang
6	2023	90 Orang	90 Orang

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2023 ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok Taruna Mangrove Desa Sungai Bakau Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
2. Kelompok Hijau Lestari Kecamatan Angsana, Desa Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
3. Kelompok Anugerah Indah Desa Sungai Dua Laut Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu
4. Kelompok Kompak Penyu Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru

Kegiatan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diikuti oleh sebanyak 90 orang di 3 Kabupaten, yaitu :

1. Desa Sungai Dua Laut Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu
2. Desa Tabunganen Kecil Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala
3. Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 ini tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka pencapaian target kinerja karena capaian kinerja telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun dengan terbatasnya porsi anggaran yang didapatkan menyebabkan masih kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pembinaan dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada kelompok-kelompok yang telah terbentuk.
2. Melaksanakan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan penyadartahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

IV. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

IV.1. SASARAN ESELON III BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Tabel 3.49. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perikanan Tangkap

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	161.000 Ton
		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di PUD Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	50.000 Ton
		Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT Yang Memiliki Dokumen Perizinan Sesuai Ketentuan	210 Unit

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Berikut pada Tabel 3.50 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan pada kinerja utama dan indikator kinerja Kepala Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

Tabel 3.50. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Bidang Perikanan Tangkap

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	161.000 Ton	148.692 Ton	92,36 %
		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di PUD Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	50.000 Ton	61.405 Ton	122,81 %
		Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT Yang Memiliki Dokumen Perizinan Sesuai Ketentuan	210 Unit	411 Unit	195,71 %
Rata-rata Capaian				100%	
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan	

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Ruang Laut (2023)

a. Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Pengertian :

Merupakan jumlah hasil produksi perikanan tangkap di laut yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun n (tahun berjalan)

Rumus :

A = Jumlah produksi perikanan tangkap di laut yang dihasilkan dari seluruh kab/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023

Capaian Kinerja :

A = Jumlah produksi perikanan tangkap di laut yang dihasilkan dari seluruh kab/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023

= **148.692 **)** Ton

Berikut disajikan data produksi perikanan tangkap di laut yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

Tabel 3.51. Data Produksi Perikanan Tangkap di Laut Pada Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap di Laut
1	Balangan	-
2	Banjar (Martapura)	7.312
3	Barito Kuala	4.469
4	Hulu Sungai Selatan	-
5	Hulu Sungai Tengah	-
6	Hulu Sungai Utara	-
7	Banjarbaru	-
8	Banjarmasin	-
9	Kotabaru	66.875
10	Tabalong	-
11	Tanah Bumbu	43.666
12	Tanah Laut	26.370
13	Tapin	-
	Total	148.692

Sumber Data: Bidang Perikanan Tangkap (2023)

Keragaan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Laut pada tahun 2023 sebagai berikut :

Target = 161.000 Ton

Capaian = 148.692 **) Ton

Dan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator jumlah produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{148.692}{161.000} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \mathbf{92,36\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja jumlah produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2023 adalah sebesar 92,36% (Sangat Memuaskan).

Angka realisasi untuk produksi perikanan tangkap di laut ini masih bersifat sementara karena belum dilakukan validasi ditingkat nasional, kegiatan validasi biasanya dilaksanakan pada semester II (bulan Juni tahun n+), sehingga masih memungkinkan untuk terjadi peningkatan di produksi tangkap di laut ini, namun berdasarkan hasil perhitungan sementara ini, rendahnya hasil produksi perikanan tangkap di laut ini disebabkan adanya fenomena El-Nino yang melanda hampir keseluruhan perairan di Indonesia.

Dan berikut pada Tabel 3.52 disajikan data perkembangan jumlah produksi perikanan tangkap di laut di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.52. Data Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Laut sd Tahun 2023

Uraian	Tahun (Ton)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Laut	179.696,11	186.453	127.139	136.949	157.645	144.588	148.692

b. Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di PUD Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Pengertian :

Merupakan jumlah hasil produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun n (tahun berjalan)

Rumus :

A = Jumlah produksi perikanan tangkap di PUD yang dihasilkan dari seluruh kab/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023

Capaian Kinerja :

A = Jumlah produksi perikanan tangkap diPUD yang dihasilkan dari seluruh kab/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023

= **61.405,47 **) Ton**

Berikut disajikan data produksi perikanan tangkap di PUD yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

Tabel 3.53. Data Produksi Perikanan Tangkap di PUD Pada Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap di PUD
1	Balangan	833,80
2	Banjar (Martapura)	1.406,01
3	Barito Kuala	5.554,57
4	Hulu Sungai Selatan	8.849,95
5	Hulu Sungai Tengah	8.206,98
6	Hulu Sungai Utara	13.487,30
7	Banjarbaru	343,01
8	Banjarmasin	2.106,75
9	Kotabaru	6.270,70
10	Tabalong	1.958,18

11	Tanah Bumbu	2.618,02
12	Tanah Laut	6.146,60
13	Tapin	3.623,60
	Total	61.405,47

Sumber Data: Bidang Perikanan Tangkap (2023)

Keragaan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Laut pada tahun 2023 sebagai berikut :

Target = 50.000 Ton

Capaian = 61.405,47 **) Ton

Dan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator jumlah produksi perikanan tangkap di PUD pada tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{61.405,47}{50.000} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \mathbf{122,81\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja jumlah produksi perikanan tangkap di PUD pada tahun 2023 adalah sebesar 122,81% (Sangat Memuaskan).

Angka realisasi untuk produksi perikanan tangkap di PUD ini masih bersifat sementara karena belum dilakukan validasi ditingkat nasional, kegiatan validasi biasanya dilaksanakan pada semester II (bulan Juni tahun n+), sehingga masih memungkinkan untuk terjadi peningkatan di produksi tangkap di PUD ini.

Dan berikut pada Tabel 3.54 disajikan data perkembangan jumlah produksi perikanan tangkap di PUD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.54. Data Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PUD sd Tahun 2023

Uraian	Tahun (Ton)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi PUD	67.914,89	75.697	83.130	70.280	60.901	62.666	61.405,47

c. Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT Yang Memiliki Dokumen Perizinan Sesuai Ketentuan

Pengertian :

Merupakan jumlah ketaatan pelaku usaha dan kapal perikanan yang memiliki perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan/atau pengangkut ikan sesuai ketentuan dalam rangka pengendalian sumberdaya ikan yang dilaksanakan pada tahun n

Rumus :

A = Jumlah total kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sd 30 GT yang memiliki dokumen perizinan pada tahun 2023

Capaian Kinerja :

A = Jumlah total kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sd 30 GT yang memiliki dokumen perizinan pada tahun 2023

= **411 Unit**

Keragaan Jumlah Total Kapal Perikanan Yang Memiliki Dokumen Perizinan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Target = 210 Unit

Capaian = 411 Unit

Dan untuk mengetahui besaran persentase capaian realisasi kinerja untuk indikator jumlah total kapal perikanan yang memiliki dokumen perizinan pada tahun 2023 dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{411}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \mathbf{195,71\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, maka persentase realisasi capaian kinerja jumlah total kapal perikanan yang memiliki dokumen perizinan pada tahun 2023 adalah sebesar 195,71% (Sangat Memuaskan).

Tingginya angka realisasi pada indikator ini menunjukkan bahwa makin tingginya kesadaran para nelayan yang memiliki kapal berukuran di atas 10 GT sd 30 GT untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut, hal ini tidak lepas dari kegiatan pembinaan dan sosialisasi terhadap para nelayan yang terus menerus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Perikanan Tangkap.

Dan berikut pada Tabel 3.55 disajikan data perkembangan jumlah total kapal perikanan yang memiliki dokumen perizinan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan selama 2 tahun terakhir.

Tabel 3.55. Data Perkembangan Jumlah Total Kapal Perikanan Yang Memiliki Dokumen Perizinan sd Tahun 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapal Yang Memiliki Dokumen Perizinan	-	-	-	-	-	563	411

Keterangan : IKU Jumlah Total Kapal Perikanan Yang Memiliki Dokumen Perizinan baru dilaksanakan pada tahun 2023

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2023

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Bidang Perikanan Tangkap:

Tabel 3.56. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		% Capaian
			2022	2023	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	144.588	148.692	-
		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di PUD Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	62.666	61.405,47	-
		Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT Yang Memiliki Dokumen Perizinan Sesuai Ketentuan	563	411	-
Rata-rata Capaian					-
Kategori Capaian					-

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.57 disajikan perbandingan realisasi kinerja yang dicapai oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.57. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						% Capaian
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di Laut Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	186.453	127.139	136.949	157.645	144.588	148.692	-
		Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap di PUD Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	75.697	83.130	70.280	60.901	62.666	61.405,47	-
		Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT Yang Memiliki Dokumen Perizinan Sesuai Ketentuan	-	-	-	-	563	411	-
Rata-rata Capaian							-		
Kategori Capaian							-		

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Sejauh ini upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah dengan cara meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan melalui penyediaan paket bantuan sarana perikanan tangkap ramah lingkungan, pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum melalui pelepasliaran (restocking) ikan lokal di reservat perairan umum, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM nelayan untuk meningkatkan kemandirian usahanya.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 ini dapat terlihat kenaikan realisasi pada produksi perikanan tangkap di laut dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 dan angka inipun masih dengan angka sementara karena belum dilaksanakan perhitungan validasi di tingkat nasional, sedangkan untuk realisasi pada produksi perikanan tangkap di PUD masih rendah dibandingkan realisasi pada tahun 2022, hal ini dikarenakan terjadinya penurunan kegiatan penangkapan ikan karena faktor cuaca dan iklim yang menyebabkan sumberdaya perikanan di wilayah perairan cukup berkurang secara signifikan.

Secara angka dapat terlihat jika terjadi fluktuasi pada produksi perikanan tangkap di Kalimantan Selatan pada tiga tahun terakhir didasari oleh beberapa faktor, yaitu:

- Status proporsi tangkapan laut di WPP-712 dan WPP-713 pada tahun 2021, 2022, dan 2023 berada di atas batasan biologis aman (> 100% dari JTB yang ditentukan).
- Produksi tangkapan laut tahun 2022 sebesar 144.588 ton lebih besar 1% dari JTB 144.000, dan lebih kecil 1,25% dari potensi lestari MSY 180.000.
- Ikan pelagis kecil di WPP-712 berada pada kondisi fully exploited.
- Komoditas perikanan tangkap laut di WPP-713 yang berada pada kondisi fully exploited, yaitu: Udang Penaeid, Lobster, Ikan Demersal, Ikan Karang, Ikan Pelagis Besar, dan Tongkol.

c. Rencana Tindak Lanjut

Mengusulkan peningkatan anggaran pada Bidang Perikanan Tangkap, khususnya pada kegiatan restocking ikan dan pengadaan alat tangkap ikan di perairan darat.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang Perikanan Tangkap, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT

IV.2. SASARAN ESELON IV LINGKUP BIDANG PERIKANAN TANGKAP

IV.2.1. Kepala Seksi Kenelayanan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Kenelayanan terdapat 3 indikator kinerja pada tahun 2023 ini, yaitu:

- Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
- Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan
- Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia

Berikut pada Tabel 3.58 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Kenelayanan pada Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.58. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Kenelayanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan	210 Rekomendasi	411 Rekomendasi	195%
3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT sd 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	4 Dokumen	7 Dokumen	175%
Rata-rata Capaian					156%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

a. Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi

Pengertian :

Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi adalah jumlah dokumen standar operasional prosedur (SOP) selama 1 (satu) tahun sebagai acuan/standarisasi penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi yang dihasilkan pada tahun n (tahun berjalan).

Dokumen SOP Izin Usaha Perikanan Tangkap Kapal Perikanan yang diterbitkan merupakan pedoman teknis dalam penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi sehingga terwujud pelayanan prima (exelent service), harmonisasi dan integritas perizinan pusat dan daerah.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Dokumen} = \text{Jumlah Dokumen SOP Yang Diterbitkan pada tahun } n$$

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Dokumen} &= \text{Jumlah Dokumen SOP Yang Diterbitkan pada tahun } n \\ &= \mathbf{2 \text{ Dokumen}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi pada tahun 2023 adalah 2 Dokumen. Adapun target jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi adalah 2 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

b. Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan**Pengertian :**

Jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan adalah jumlah surat rekomendasi izin usaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan provinsi yang diterbitkan pada tahun n (tahun berjalan).

Rumus :

Untuk menghitung jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Rekomendasi = Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
Yang Diterbitkan pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang
Diterbitkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jumlah Rekomendasi = Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan
Tangkap Yang Diterbitkan pada tahun n
= **411 Rekomendasi**

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan pada tahun 2023 adalah 411 Rekomendasi. Adapun target jumlah rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap yang diterbitkan yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja adalah 210 Rekomendasi. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 195% (Sangat Memuaskan).

c. Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia

Pengertian :

Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia adalah jumlah data kenelayanan yang terbaru sebagai media informasi pada tahun n (tahun berjalan). Data dan informasi terkait berupa jumlah izin usaha perikanan yang diterbitkan (menurut ukuran kapal, profil usaha, alat penangkapan ikan), Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap, Jumlah Peserta Pelatihan ANKAPIN Tk. III, Jumlah Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Jumlah Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Rumus :

Untuk menghitung jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Dokumen = Layanan Data Yang Tersedia pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jumlah Dokumen = Layanan Data Yang Tersedia pada tahun n
= **7 Dokumen**

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia pada tahun 2023 adalah 7 Dokumen. Adapun target jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja adalah 4 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 175% (Sangat Memuaskan).

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Seksi Kenelayanan.

Tabel 3.59. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 Kepala Seksi Kenelayanan

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	-
2	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan	563 Rekomendasi	411 Rekomendasi	-
3	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	4 Dokumen	7 Dokumen	-
Rata-rata Capaian				-
Kategori Capaian				-

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya untuk Kepala Seksi Kenelayanan.

Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Capaian Kinerja %
		2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
2	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Diterbitkan	239 Rekomendasi	338 Rekomendasi	563 Rekomendasi	411 Rekomendasi	-
3	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	0 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	-
Rata-rata Capaian						-
Kategori Capaian						-

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2023, pencapaian persentase rekomendasi perizinan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terlayani penerbitannya sesuai SOP yang ditetapkan terealisasi sebesar 100%. Penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan sebanyak 411 rekomendasi yang terdiri dari :

- a. Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sebanyak 206 Rekomendasi.
- b. Penerbitan rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (SIPI-WPPNRI) sebanyak 83 Rekomendasi.
- c. Penerbitan rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan antar Pelabuhan Perikanan (SIKPI-PP) sebanyak 119 Rekomendasi.
- d. Penerbitan rekomendasi teknis Surat Tanda Penangkapan Ikan (STPI) Andon sebanyak 3 Rekomendasi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan rekomendasi sebanyak 411 rekomendasi teknis yang terdiri dari 206 rekomendasi SIUP, 119 rekomendasi SIKPI-PP, 83 rekomendasi SIPI-WPPNRI dan 3 rekomendasi STPI Andon. Seluruh rekomendasi tersebut telah diterbitkan perizinannya oleh Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk peningkatan pelayanan perizinan berusaha pada bulan Oktober 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan amanat Undang – Undang Cipta Kerja dengan melakukan pelayanan perizinan secara elektronik, yaitu pelaku usaha memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dari Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kapal Perikanan Daerah (SIMKADA). Dengan pelayanan berbasis online ini, pelaku usaha sangat dimudahkan dalam melakukan pengajuan penerbitan perizinan berusaha.

Pelayanan penerbitan perizinan berusaha juga dilakukan bagi kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT dilaksanakan secara elektronik berbasis online melalui OSS RBA terintegrasi SIMKADA dengan produk perizinan berusaha Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan TDKP sebanyak 2.949 dokumen.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 ini tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Kepala Seksi Kenelayanan dalam rangka pencapaian target kinerja karena capaian kinerja pada tahun 2023 ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Namun dengan terbatasnya porsi anggaran yang didapatkan menyebabkan masih kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Seksi Kenelayanan.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Terus menerus melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap terutama kepada pemilik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sd 30 GT,
2. Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada pelaku usaha perikanan tangkap berupa pelayanan berbasis on-line, dengan layanan berbasis on-line ini pelaku usaha sangat dimudahkan dalam melakukan pengajuan penerbitan perizinan berusaha.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Kenelayanan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sd 30 GT

IV.2.2. Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan terdapat 2 indikator kinerja pada tahun 2023 ini, yaitu :

- a. Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil
- b. Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat

Berikut pada Tabel 3.61 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan pada Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.61. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersedianya Data dan Informasi Sumberdaya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

a. Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil

Pengertian :

Tersedianya laporan yang menyampaikan informasi mengenai perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut yang dilaksanakan pada tahun n.

Laporan berupa buku statistik produksi perikanan tangkap laut yang dihimpun dari data produksi perikanan tangkap laut kabupaten/kota di Kalimantan Selatan

Rumus :

Untuk menghitung jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah laut sd 12 Mil menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Dokumen} = \text{Jumlah laporan statistik perikanan tangkap laut yang tersedia pada tahun n}$$

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah laut sd 12 Mil pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Dokumen} &= \text{Jumlah laporan statistik perikanan tangkap laut yang} \\ &\quad \text{tersedia pada tahun } n \\ &= \mathbf{1 \text{ Dokumen}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah laut sd 12 Mil pada tahun 2023 adalah 1 Dokumen. Adapun target jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah laut sd 12 Mil di dalam Perjanjian Kinerja adalah 1 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

b. Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat

Pengertian :

Tersedianya laporan yang menyampaikan informasi mengenai perkembangan hasil produksi perikanan tangkap perairan umum daratan yang dilaksanakan pada tahun n .

Laporan berupa buku statistik produksi perikanan tangkap perairan umum daratan yang dihimpun dari data produksi perikanan tangkap perairan umum daratan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan

Rumus :

Untuk menghitung jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah perairan darat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Dokumen} &= \text{Jumlah laporan statistik perikanan tangkap perairan umum} \\ &\quad \text{daratan yang tersedia pada tahun } n\end{aligned}$$

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah perairan darat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Rekomendasi} &= \text{Jumlah laporan statistik perikanan tangkap perairan} \\ &\quad \text{umum daratan yang tersedia pada tahun } n \\ &= \mathbf{1 \text{ Dokumen}}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah perairan darat pada tahun 2023 adalah 1 Dokumen. Adapun target jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah perairan darat di dalam Perjanjian Kinerja adalah 1 Dokumen. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan

Tabel 3.62. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	0 Dokumen	1 Dokumen	-
2	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	3 Dokumen	1 Dokumen	-
Rata-rata Capaian				-
Kategori Capaian				-

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya untuk Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan.

Tabel 3.63. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Capaian Kinerja %
		2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	-
2	Jumlah Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-
Rata-rata Capaian						-
Kategori Capaian						-

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

Realisasi kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan pada tahun 2023 ini hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena kegiatan baru dilaksanakan pada tahun 2022 dan kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan di wilayah perairan umum daratan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan tangkap, maka Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan telah melaksanakan kegiatan :

1. Pertemuan pendataan statistic perikanan tangkap, kegiatan dilaksanakan dalam rangka menghimpun data produksi perikanan tangkap dari seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, sehingga dapat diketahui angka produksi perikanan tangkap di Kalimantan Selatan
2. Pertemuan pembinaan tata kelola dan operasional log book penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan
3. Melaksanakan kegiatan restocking ikan di beberapa kabupaten dengan jenis ikan yang ditebar adalah Gabus Haruan dan Papuyu, sebanyak 130.000 ekor (Gabus Haruan 40.000 ekor dan Papuyu 90.000 ekor).

Berikut disajikan perkembangan pelaksanaan restocking ikan yang telah dilaksanakan di Kalimantan Selatan.

Tabel 3.64. Perkembangan Pelaksanaan Restocking Ikan di Kalimantan Selatan

No	Tahun	Kabupaten	Jenis Ikan	Jumlah Ikan Yang Ditebar (ekor)
1	2018	Tapin	-	400.000
		Tabalong	-	100.000
		Banjarbaru	-	100.000
2	2019	Tanah Bumbu	-	50.000
		Kotabaru	-	50.000
3	2020	-	-	-
4	2021	Tanah Laut	-	33.000
		Hulu Sungai Utara	-	33.000
5	2022	Balangan	Gabus Haruan	22.000
		Hulu Sungai Selatan	Gabus Haruan	23.000
6	2023	Hulu Sungai Utara	Papuyu	35.000
			Gabus Haruan	15.000
		Tanah Laut	Papuyu	15.000
		Tanah Bumbu	Gabus Haruan	15.000
		Tapin	Papuyu	40.000
			Gabus Haruan	10.000

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 ini tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan dalam rangka pencapaian target kinerja karena capaian kinerja pada tahun 2023 ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan kegiatan berkelanjutan pada penebaran benih ikan
2. Melaksanakan pertemuan berkelanjutan pada kegiatan statistic perikanan tangkap
3. Melaksanakan pertemuan berkelanjutan pada kegiatan pembinaan log book penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan (di Laut)
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Untuk Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan (di PUD)

IV.2.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap terdapat 2 indikator kinerja pada tahun 2023 ini, yaitu :

- Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd. 12 Mil
- Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Perairan Umum Daratan (PUD)

Berikut pada Tabel 3.65 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap pada Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.65. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (di P.Laut)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	9 Unit	9 Unit	100%
2	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (di PUD)	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	4 Unit	4 Unit	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

a. Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Laut sd. 12 Mil

Pengertian :

Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil adalah jumlah unit bantuan hibah sarana usaha perikanan tangkap di perairan laut yang diserahkan kepada kelompok masyarakat pada tahun n (tahun berjalan)

Rumus :

Untuk menghitung jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Unit Hibah = Jumlah Unit Hibah Yang Diserahkan pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jumlah Unit Hibah = Jumlah Unit Hibah Yang Diserahkan pada tahun n
= **9 Unit**

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil pada tahun 2023 adalah 9 Unit. Adapun target jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 Mil adalah 9 Unit. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

Kegiatan dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten, yaitu di Kabupaten Tanah Bumbu dan di Kabupaten Kotabaru, dengan nama kelompok nelayan yang menerima bantuan hibah sebagai berikut :

- ❖ Hibah Bantuan Alat Tangkap Ikan Perairan Laut (Gillnet/Trammel Net)
- 1. KUB Kandur Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru
- 2. KUB Bina Bersama Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru
- 3. KUB Indomanis Desa Setarap Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

4. KUB Bintang Samudera Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
- ❖ Hibah Bantuan Mesin Kapal Perairan Laut
1. KUB Mandrewasa Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru
2. KUB Sumber Usaha Desa Sungai Dua Laut Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu
3. KUB Bebaraan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
4. KUB Lampu Laut Jaya Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru
5. KUB Lautan Lestari Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

b. Jumlah Sarana Usaha Penangkapan Yang Tersedia Di Wilayah Perairan Darat

Pengertian :

Jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat adalah jumlah unit bantuan hibah sarana usaha perikanan tangkap di perairan umum daratan yang diserahkan kepada kelompok masyarakat pada tahun n (tahun berjalan)

Rumus :

Untuk menghitung jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Unit Hibah = Jumlah Unit Hibah Yang Diserahkan pada tahun n

Capaian Kinerja :

Realisasi jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Jumlah Unit Hibah	Jumlah Unit Hibah Yang Diserahkan pada tahun n
-------------------	--

4 Unit

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat pada tahun 2023 adalah 4 Unit. Adapun target jumlah sarana usaha penangkapan yang tersedia di wilayah perairan darat adalah 4 Unit. Dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 100% (Sangat Memuaskan).

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nama kelompok nelayan yang menerima bantuan hibah adalah :

Hibah Bantuan Perahu Bermotor Perairan Darat dan Mesin Perahu

1. KUB Nelayan Bina Sejahtera Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. KUB Batu Jilatan Desa Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. KUB Karya Bersama Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. KUB Sungai Garuda Desa Sungai Garuda Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

Tabel 3.66. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	6 Unit	9 Unit	-
2	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	2 Unit	4 Unit	-
Rata-rata Capaian				-
Kategori Capaian				-

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

Pada Tabel 3.66 realisasi kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap pada tahun 2023 ini, untuk kegiatan jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sd. 12 mil jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 ada peningkatan sebanyak 3 unit, pada tahun 2022 hanya 6 unit dan pada tahun 20223 ini menjadi 9 unit. Sedangkan untuk kegiatan jumlah sarana usaha perikanan

tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 juga ada peningkatan sebanyak 2 unit, dimana pada tahun 2022 hanya sebanyak 2 unit dan pada tahun 2023 menjadi 4 unit.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.67:

Tabel 3.67. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tahun 2023 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Tahun 2023		
		2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd. 12 Mil	18 Unit	8 Unit	0 Unit	12 Unit	6 Unit	9 Unit	9 Unit	-
2	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia di Wilayah Laut sd 12 Mil	-	-	-	5 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	-
Rata-rata Capaian									-
Kategori Capaian									-

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

Pada Tabel 3.68 disajikan data perkembangan jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil selama kurun waktu 2018 – 2023.

Tabel 3.68. Data Perkembangan Jumlah Sarana Penangkapan Laut Yang Diserahkan Dari Tahun 2018 – 2023

No	Tahun	Jumlah Paket Hibah Sarana Penangkapan Laut Yang Diserahkan (Unit)
1	2018	18
2	2019	8
3	2020	-
4	2021	12
5	2022	6
6	2023	9

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

Dan pada Tabel 3.69 disajikan data perkembangan jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan umum daratan selama kurun waktu 2018 – 2023.

Tabel 3.69. Data Perkembangan Jumlah Sarana Penangkapan Perairan Umum Daratan Yang Diserahkan Dari Tahun 2018 – 2023

No	Tahun	Jumlah Paket Hibah Sarana Penangkapan Laut Yang Diserahkan (Unit)
1	2018	-
2	2019	-
3	2020	-
4	2021	5
5	2022	2
6	2023	4

Sumber Data : Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya optimalisasi peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, terutama pada kegiatan hibah kepada masyarakat/kelompok berupa bantuan alat tangkap ikan di perairan laut dan hibah bantuan mesin kapal di perairan laut. Selain itu juga di perairan umum daratan juga dilaksanakan kegiatan hibah kepada masyarakat/kelompok berupa bantuan perahu bermotor untuk perairan darat dan mesin untuk perahu.

Kegiatan hibah ini dalam rangka meningkatkan produksi perikanan di bidang perikanan tangkap. Permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan di Kalimantan Selatan sedikit demi sedikit mulai teratasi. Harapan kedepannya dengan bantuan hibah yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan akan membantu para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 ini tidak ada hambatan yang dihadapi oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dalam rangka pencapaian target kinerja karena capaian kinerja pada tahun 2023 ini telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Namun dengan terbatasnya porsi anggaran yang didapatkan menyebabkan masih kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana

Perikanan Tangkap terutama masih kurangnya paket bantuan hibah yang diberikan kepada nelayan disetiap tahunnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Melakukan penambahan paket bantuan yang akan diberikan kepada nelayan, baik itu untuk nelayan di perairan laut maupun nelayan di perairan umum.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sd 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Perairan Laut)
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (PUD)

V. BIDANG PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP)

V.1. SASARAN ESELON III BIDANG PSDKP

Tabel 3.70. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang PSDKP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut, Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sd 12 Mil	100%
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pembudidayaan Ikan dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya di Lintas Kab/Kota	100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Berikut pada Tabel 3.71 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan pada kinerja utama dan indikator kinerja Kepala Bidang PSDKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.71. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Bidang PSDKP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut, Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sd 12 Mil	100%	100%	100%
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pembudidayaan Ikan dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya di Lintas Kab/Kota	100%	100%	100 %
				Rata-rata Capaian	100%
				Kategori Capaian	Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang PSDKP (2023)

a. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut, Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sd 12 Mil

Pengertian :

Perbandingan antara jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang memenuhi peraturan perundang-undangan di wilayah perairan laut sd 12 mil, dengan total jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa kepatuhannya, di kali 100%.

Kepatuhan (*compliance*) usaha perikanan adalah kesesuaian kegiatan usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang terdiri dari pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan budidaya ikan di laut.

Rumus :

Untuk menghitung persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaat ruang laut, pelaku usaha di bidang perikanan tangkap dan pelaku usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan di laut sd 12 Mil menggunakan persamaan berikut :

$$X_{psdp} = \frac{X_{rl} + X_t + X_b}{3} \times 100\%$$

Dimana:

X_{psdp} = Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

X_{rl} = Persentase kepatuhan pemanfaat ruang laut terhadap peraturan perundang-undangan

X_t = Persentase kepatuhan operasional kapal perikanan terhadap peraturan perundang-undangan

X_b = Persentase kepatuhan pembudidaya ikan di laut terhadap peraturan perundang-undangan

Capaian Kinerja :

Realisasi pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{3/3 \times 100\% + 719/719 \times 100\% + 143/143 \times 100\%}{3}$$

$$X = \frac{100 + 100 + 100}{3}$$

$$X = \frac{300}{3}$$

$$X = \mathbf{100\%}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi pada tahun 2023 ini adalah 100%. Adapun target yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah 100%, dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini adalah 100% (Sangat Memuaskan).

b. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pembudidayaan Ikan dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya di Lintas Kab/Kota

Pengertian :

Perbandingan antara jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang memenuhi peraturan perundang-undangan di wilayah perairan umum daratan, dengan total jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa kepatuhannya, di kali 100%.

Kepatuhan (*compliance*) usaha perikanan adalah kesesuaian kegiatan usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang terdiri dari : pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, pelaku usaha di bidang budidaya ikan dan pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah perairan umum daratan.

Rumus :

Untuk menghitung persentase kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, bidang pembudidayaan ikan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di lintas kab/kota menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$X_{psdp} = \frac{X_t + X_b + X_{p2hp}}{3} \times 100\%$$

Dimana:

X_{psdp} = Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

X_t = Persentase kepatuhan operasional kapal perikanan terhadap peraturan perundang-undangan

X_b = Persentase kepatuhan pembudidaya ikan di perairan umum daratan terhadap peraturan perundang-undangan

X_{p2hp} = Persentase kepatuhan usaha pengolahan hasil perikanan dan kepatuhan usaha distribusi perikanan terhadap peraturan perundang-undangan

Capaian Kinerja :

Realisasi pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{1.079/1.079 \times 100\% + 1.508/1.508 \times 100\% + 350/350 \times 100\%}{3}$$

$$X = \frac{100 + 100 + 100}{3}$$

$$X = \frac{300}{3}$$

$$X = 100\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa realisasi pada tahun 2023 ini adalah 100%. Adapun target yang ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah 100%, dengan demikian Capaian Kinerja pada tahun 2023 ini adalah 100% (Sangat Memuaskan).

Berikut disajikan data hasil evaluasi kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan per-UU yang berlaku berdasarkan objek yang diperiksa.

Hasil Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Per-UU Yang Berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No.	Uraian	Objek Yang Diperiksa	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang Diperiksa Kepatuhan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang Patuh	Persentase % Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=((5)/(4))*100%
1.	Persentase Kepatuhan Operasional Kapal Perikanan Terhadap Per-UU (X_i)	Jumlah kepemilikan kapal penangkapan ikan nelayan di laut berdasarkan ukuran (unit)			
		< 5 GT	1.079	1.079	100,00
		6 sd. 30 GT	719	719	100,00
				Rata-rata x_i	100,00
2.	Persentase Kepatuhan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Terhadap Per-UU (X_o)	Pengolah Hasil Perikanan	200	200	100,00
		Pemasar Hasil Perikanan	150	150	100,00
				Rata-rata x_o	100,00
3.	Persentase Kepatuhan Usaha Pembudidaya Ikan Terhadap Per-UU (x_b)	Pembudidaya Ikan Laut	2	2	100,00
		Pembudidaya Ikan Air Payau	141	141	100,00
		Pembudidaya Ikan Air Tawar	1.508	1.508	100,00
				Rata-rata x_b	100,00
			$X_{psdp} = ((x_i) + (x_o) + (x_b)) / 3$		100,00
				Rata-rata Capaian	100,00
				Kategori Capaian	Sangat Memuaskan

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Bidang PSDKP :

Tabel 3.72. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		% Capaian
			2022	2023	
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut, Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sd 12 Mil	100%	100%	100%
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pembudidayaan Ikan dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya di Lintas Kab/Kota	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.74 disajikan perbandingan realisasi kinerja yang dicapai oleh Kepala Bidang PSDKP pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 3.73. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						% Capaian
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut, Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap dan Pelaku Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sd 12 Mil	-	-	98%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pembudidayaan Ikan dan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya di Lintas Kab/Kota	-	-	98%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian									100%
Kategori Capaian									Sangat Memuaskan

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdampak pada kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang seluruhnya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Keterbatasan sumberdaya untuk mengawasi perairan laut sampai dengan 12 mil tentunya mengharuskan Dinas Kelautan dan Perikanan meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Dinas Perikanan di Kabupaten/Kota, serta aparat dari instansi terkait. Selain itu, memberdayakan dan mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terus ditingkatkan.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lapangan perlu didukung dengan SDM aparaturnya yang memadai. Namun demikian dari 13 kabupaten/kota, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2023 hanya memiliki 6 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Kondisi ini tentunya kurang dari ketersediaan ideal untuk menjaga dan mengamankan aktifitas IUU Fishing dan Destructive Fishing yang masih terus terjadi di Kalimantan Selatan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang yaitu:

- Meningkatkan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, melalui penguatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, penggerakan keaktifan POKMASWAS Perikanan dalam membantu pengawasan di lapangan, serta gelar operasi terpadu di perairan laut sampai dengan 12 mil dan perairan umum lintas kabupaten/kota.
- Fasilitasi penanganan dan penyelesaian konflik, supervisi proses pemberkasan kasus pelanggaran IUU Fishing dan Destructive Fishing sampai dengan P.21, serta pembinaan penegakan hukum dengan pendekatan preventive melalui kegiatan PSDKP mengajar dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.
- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengawasan bagi aparaturnya yang pengawasan perikanan dan POKMASWAS dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lapangan

Berikut data pelaku usaha perikanan yang patuh terhadap peraturan per-UU yang berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

Tabel 3.74. Data Pelaku Usaha Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Per-UU di Provinsi Kalimantan Selatan Pada Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Diperiksa (orang)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Diperiksa Yang Patuh (orang)	
1.	Kotabaru	1.603	1.603	100,00
2.	Tanah Bumbu	971	971	100,00
3.	Tanah Bumbu	217	217	100,00
4.	Barito Kuala	131	131	100,00
5.	Banjar	529	529	100,00
6.	Banjarbaru	105	105	100,00
7.	Tapin	152	152	100,00
8.	Hulu Sungai Tengah	337	337	100,00
9.	Hulu Sungai Utara	18	18	100,00
10.	Tabalong	35	35	100,00
11.	Balangan	36	36	100,00
Kalimantan Selatan		4.134	4.134	100,00

Sumber : Data Bidang PSDKP (2023)

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang PSDKP, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya

V.2. SASARAN ESELON IV LINGKUP BIDANG PSDKP

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Target dan realisasi IKU pada Eselon IV lingkup Bidang PSDKP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.75. Target dan Realisasi IKU Eselon IV lingkup Bidang PSDKP tahun 2023

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%
Kepala Seksi Pengawasan dan Pemantauan SDKP					
1.	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	Jumlah Wilayah Yang Terpantau dan Terawasi Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil (kabupaten)	3	3	100,00
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil (dokumen)	3	3	100,00
3.	Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (dokumen)	1	1	100,00
4.	Terbayarnya Honorarium Tenaga Non ASN	Jumlah Honorarium Tenaga Non ASN Yang Dibayarkan (OB)	12	12	100,00
5.	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Wilayah Yang Terpantau dan Terawasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya(kabupaten)	5	5	100,00
6.	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya (dokumen)	1	1	100,00
7.	Terbinanya Keaktifan dan Peran POKMASWAS Dalam Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Wilayah Yang POKMASWASnya Dibina Keaktifannya (kabupaten)	3	3	100,00
Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum					
8.	Meningkatnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil (dokumen)	1	1	100,00
9.	Terfasilitasnya Penanganan Konflik/ Supervisi Pemberkasan Kasus Perkara/ Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Per-UU Perikanan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil	Jumlah Kabupaten Yang Terfasilitasi Penanganan Konflik/ Supervisi Pemberkasan Kasus Perkara/ Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Per-UU Perikanan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil (kabupaten)	5	5	100,00
10.	Terbayarnya Honorarium Tenaga Non ASN	Jumlah Honorarium Tenaga Non ASN Yang Dibayarkan (OB)	36	36	100,00
11.	Meningkatnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan	1	1	100,00

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%
	Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya (dokumen)			
12.	Terlaksananya Koordinasi/ Konsolidasi/ Konsultasi Penegakan Hukum Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Konsolidasi/ Konsultasi Penegakan Hukum Usaha Perikanan Tangkap (kegiatan)	2	2	100,00
13.	Terlaksananya Pemberkasan Kasus Perkara Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya	Jumlah Kasus Perkara Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya Yang Difasilitasi Pemberkasannya sd. P.21 (kasus)	1	0	0 (tidak ada kab/kota yang mengajukan permohonan fasilitasi)
14.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per-UU di Bidang Perikanan (orang)	35	35	100,00
15.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	Jumlah Kabupaten/Kota Yang di Monitoring dan di Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2023 (kabupaten)	13	13	100,00
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan					
16.	Terlaksananya Serah Terima Pemasangan Papan Seruan Untuk POKMASWAS	Jumlah Papan Seruan Untuk POKMASWAS Yang Terpasang (buah)	3	3	100,00
17.	Terlaksananya Identifikasi dan Verifikasi Bantuan Perlengkapan POKMASWAS	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi dan Verifikasi Bantuan Perlengkapan POKMASWAS (dokumen)	4	4	100,00
18.	Terlaksananya Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022	Jumlah Laporan Hasil Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022 (dokumen)	6	6	100,00
19.	Terlaksananya Serah Terima Bantuan Pos Jaga Untuk POKMASWAS	Jumlah Pos Jaga Motor Pengawasan Yang Diserah Terimakan Untuk POKMASWAS (buah)	1	0	0 (direvisi karena lahan tidak clear & clean)
20.	Terlaksananya Serah Terima Pemasangan Papan Seruan Untuk POKMASWAS	Jumlah Papan Seruan Untuk POKMASWAS Yang Terpasang (buah)	5	5	100,00
21.	Terlaksananya Serah Terima Bantuan Perahu Motor Untuk POKMASWAS	Jumlah Perahu Motor Pengawasan Yang Diserah Terimakan Untuk POKMASWAS (unit)	8	8	100,00
22.	Terlaksananya Identifikasi Bantuan Perlengkapan POKMASWAS	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Calon Penerima Bantuan Perlengkapan POKMASWAS (dokumen)	9	9	100,00
23.	Terlaksananya Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022	Jumlah Laporan Hasil Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022 (dokumen)	11	11	100,00
24.	Terlaksananya pengadaan Kalender PSDKP	Jumlah Kalender PSDKP (eksemplar)	150	150	100,00
25.	Terlaksananya Pengadaan Poster	Jumlah Poster tentang Illegal dan Destructive Fishing yang disebarluaskan ke Masyarakat	1500	1500	100,00

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100%
		(lembar)			
26.	Terlaksananya Pengadaan Leaflet	Jumlah Leaflet tentang Ilegal dan Destructive Fishing yang disebarluaskan ke Masyarakat (lembar)	1570	1570	100,00
27.	Terlaksananya Pengadaan Spanduk	Jumlah Spanduk tentang Ilegal dan Destructive Fishing yang terpasang (lembar)	80	80	100,00
28.	Terlaksananya Pengadaan Baju Kaos Stof Ilegal dan Destructive Fishing	Jumlah Baju Kaos tentang Stop Ilegal dan Destructive Fishing yang diserahkan (peaces)	425	425	100,00
29.	Terlaksananya Pengadaan Kain Sasirangan	Jumlah Kain Sasirangan Rapat Koordinasi dengan Dinas Perikanan Manado (lembar)	10	10	100,00
30.	Terlaksananya Pengadaan Kain Sasirangan	Jumlah Kain Sasirangan Untuk Rapat Koordinasi dan Pengembangan Sarpras Untuk Pokmaswas Tahun 2023 ke Nusa Tenggara Barat (lembar)	10	10	100,00
31.	Terlaksananya Pengadaan Kain Sasirangan	Jumlah Kain Sasirangan Untuk Aparatur PSDKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (lembar)	15	15	100,00
32.	Terlaksananya Koordinasi dan Peningkatan Sarpras Pengawasan Untuk Pokmaswas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Peningkatan Sarpras Pengawasan Untuk Pokmaswas (dokumen)	1	1	100,00
33.	Terlaksananya Verifikasi dan Peninjauan untuk Pokmaswas yang diusulkan mendapat Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2024	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Peninjauan untuk Pokmaswas yang diusulkan mendapat Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2024 (dokumen)	3	3	100,00
34.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Aset Sarpras Pokmaswas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Aset Sarpras Pokmaswas (dokumen)	3	3	100,00
			Rata-rata Capaian		93,94
			Kategori Capaian		Sangat Memuaskan

Sumber Data : Kepala Seksi lingkup Bidang PSDKP (2023)

Data hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Eselon IV dilingkup Bidang PSDKP TA. 2023 dapat dilihat pada lampiran.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan realisasi IKU Eselon IV di lingkup Bidang PSDKP tahun 2023 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.76. Perbandingan Realisasi IKU Eselon IV lingkup Bidang PSDKP tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100%
Kepala Seksi Pengawasan dan Pemantauan SDKP							
1.	Jumlah Wilayah Yang Terpantau dan Terawasi Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil (kabupaten)	3	3	3	3	3	100,00
2.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil (dokumen)	3	3	3	3	3	100,00
3.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (dokumen)	1	1	1	1	1	100,00
4.	Jumlah Honorarium Tenaga Non ASN Yang Dibayarkan (OB)	12	12	12	12	12	100,00
5.	Jumlah Wilayah Yang Terpantau dan Terawasi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya(kabupaten)	5	5	5	5	5	100,00
6.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya (dokumen)	1	1	1	1	1	100,00
7.	Jumlah Wilayah Yang POKMASWASnya Dibina Keaktifannya (kabupaten)	3	3	3	3	3	100,00
Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum							
8.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil (dokumen)	4	5	3	1	1	100,00
9.	Jumlah Kabupaten Yang Terfasilitasi Penanganan Konflik/ Supervisi Pemberkasas Kasus Perkara/ Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Per-UU Perikanan Usaha Perikanan Tangkap sd. 12 Mil (kabupaten)	4	5	5	5	5	100,00
10.	Jumlah Honorarium Tenaga Non ASN Yang Dibayarkan (OB)	36	36	36	36	36	100,00
11.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya (dokumen)	1	1	1	1	1	100,00
12.	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Konsolidasi/ Konsultasi Penegakan Hukum Usaha Perikanan Tangkap (kegiatan)	2	2	2	2	2	100,00
13.	Jumlah Kasus Perkara Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya Yang Difasilitasi Pemberkasannya sd. P.21 (kasus)	0	0	0	1	0	0 (tidak ada kab/kota yang mengajukan permohonan fasilitasi)
14.	Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Paham Tentang Peraturan Per-UU	120	150	70	35	35	100,00

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100%
	di Bidang Perikanan (orang)						
15.	Jumlah Kabupaten/Kota Yang di Monitoring dan di Evaluasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanannya Tahun 2023 (kabupaten)	-	-	-	13	13	100,00
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan							
16.	Jumlah Papan Seruan Untuk POKMASWAS Yang Terpasang (buah)	3	5	3	3	3	100
17.	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi dan Verifikasi Bantuan Perlengkapan POKMASWAS (dokumen)	0	0	3	4	4	100
18.	Jumlah Laporan Hasil Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022 (dokumen)	0	3	3	6	6	100
19.	Jumlah Pos Jaga Motor Pengawasan Yang Diserah Terimakan Untuk POKMASWAS (buah)	0	0	0	1	0	0
20.	Jumlah Papan Seruan Untuk POKMASWAS Yang Terpasang (buah)	0	3	3	5	5	100
21.	Jumlah Perahu Motor Pengawasan Yang Diserah Terimakan Untuk POKMASWAS (unit)	0	3	2	8	6	80
22.	Jumlah Laporan Hasil Identifikasi Calon Penerima Bantuan Perlengkapan POKMASWAS (dokumen)	0	3	2	9	9	100
23.	Jumlah Laporan Hasil Monev Perkembangan Pemanfaatan Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2022 (dokumen)	0	2	0	11	11	100
24.	Jumlah Kalender PSDKP (eksemplar)	0	0	140	150	150	100
25.	Jumlah Poster tentang Ilegal dan Destructive Fishing yang disebarluaskan ke Masyarakat (lembar)	0	0	100	1500	1500	100
26.	Jumlah Leaflet tentang Ilegal dan Destructive Fishing yang disebarluaskan ke Masyarakat (lembar)	0	0	100	1570	1570	100
27.	Jumlah Spanduk tentang Ilegal dan Destructive Fishing yang terpasang (lembar)	0	0	0	80	80	100
28.	Jumlah Baju Kaos tentang Stop Ilegal dan Destructive Fishing yang diserahkan (peaces)	0	0	0	4325	425	100
29.	Jumlah Kain Sasirangan Rapat Koordinasi dengan Dinas Perikanan Manado (lembar)	0	0	0	10	10	100
30.	Jumlah Kain Sasirangan Untuk Rapat Koordinasi dan Pengembangan Sarpras Untuk Pokmaswas Tahun 2023 ke Nusa Tenggara Barat (lembar)	0	0	0	10	10	100
31.	Jumlah Kain Sasirangan Untuk Aparatur PSDKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (lembar)	0	0	0	15	15	100
32.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Peningkatan Sarpras Pengawasan Untuk Pokmaswas (dokumen)	0	0	0	1	1	100
33.	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Peninjauan untuk Pokmaswas yang	0	0	0	3	1	100

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100%
	diusulkan mendapat Bantuan Sarpras Pengawasan Tahun 2024 (dokumen)						
34.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Aset Sarpras Pokmaswas (dokumen)	0	0	0	3	1	100
						Rata-rata Capaian	93,94
						Kategori Capaian	Sangat Memuaskan

Sumber Data : Kepala Seksi lingkup Bidang PSDKP (2023)

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2023, capaian IKU Eselon IV lingkup Bidang PSDKP sebesar 93,94%. Capaian tahun 2023 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang terealisasi sebesar 96,11%. Tidak tercapainya realisasi IKU 100% pada tahun 2023 tersebut disebabkan karena:

1. Tidak terlaksananya kegiatan Pemberkasan Kasus Perkara Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya sebanyak 1 (satu) kasus. Hal ini karena sampai dengan Desember 2023 tidak ada surat permohonan dari Dinas Perikanan Kabupaten yang mengajukan permohonan fasilitasi penganggaran pemberkasan perkara.

Diinformasikan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor 500.5.6.19/2857-P3H/ DISLUTKAN/2023 tanggal 06 Nopember 2023 telah menyampaikan pemberitahuan ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan se Kalimantan Selatan tentang penyediaan anggaran untuk fasilitasi pemberkasan perkara. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada satu pun kabupaten/kota yang mengajukan permohonan fasilitasi penganggaran pemberkasan perkara sebagaimana dimaksud (surat pemberitahuan terlampir).

2. Tidak terlaksananya kegiatan Serah Terima Bantuan Pos Jaga Untuk POKMASWAS. Hal ini karena penyediaan lahan untuk pembangunan pos jaga dalam status tidak *clear & clean*. Selanjutnya anggaran direvisi untuk kegiatan lain terkait peningkatan kinerja sarana dan prasarana pengawasan.

Adapun historis/klarifikasi kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 pada bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yakni pada kegiatan seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan terdapat sub kegiatan 3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil yakni kegiatan 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial berupa Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Spesifikasi : Pos Jaga/Menara Pengawas di Pulau Sembilan di Kabupaten Kotabaru dengan Dana Pagu Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Tidak dapat dilaksanakan karena sesuai prosedur dan ketentuan bahwa untuk proses hibah dibuatkannya pos jaga atau menara pengawasan tanah yang akan dibangun pos jaga atau menara pengawasan tersebut harus di hibahkan kepada Pemerintah Provinsi atau kepada Kelompok Masyarakat yang nantinya menjadi hak milik penerima hibah, sementara pada saat dilakukan pengecekan dan identifikasi fisik kelengkapan pemilik Lahan atau tanah tidak bersedia menghibahkan tanahnya sesuai yang di maksud tersebut diatas, dan pemilik lahan membuat pernyataan tidak bersedia menghibahkan tanahnya pada tanggal 14 April 2023 yang di tandan tangani oleh Ketua Kelompok Pamali selaku perwakilan dari pemilik lahan atau tanah dan kelompok, maka guna terserap serta berdasarkan azas manfaatnya maka dilakukan Pergeseran atau kegiatan perubahan pada tahun 2023 ini dengan rincian sebagaimana berikut :

Yang Semula :

- 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial : berupa Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Spesifikasi : Pos Jaga/Menara Pengawas di Pulau Sembilan di Kabupaten Kotabaru dengan Dana Pagu Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Menjadi :

- 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa :
Dalam Rangka Konsultasi Ke Kantor Pusat di Jakarta dan dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Perlengkapan Pokmaswas Tahun 2022 (DAK) Rp. 21.095.000.
- Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Pengembangan Sarpras untuk Pokmaswas Tahun 2023 Ke Nusa Tenggara Barat Rp. 57.414.000.
- Dalam Rangka Rapat Koordinasi Peningkatan Sarpras Pengawasan Tahun 2023 Ke Manado Rp. 75.420.000.

Tabel 3.77. Data POKMASWAS Tahun 2023

	Kabupaten/ Kota	Nama Pokmaswas	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Tahun Pembentukan	Alamat	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Koordinat Lokasi	Sarana dan Prasarana Pokmaswas			Aktif/ Tidak Aktif
									Nama Barang	Tahun Perolehan	Sumber Dana	
1	Banjarbaru	R.O ULIN	RUSTAMAJI / 082153274951	11 Orang		Jl. Sidodadi 1 RT. 002 RW. 006 Kel. Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan						Aktif
2	Banjarbaru	BATU KAPUR	JAHRANIANSY AH/082245641 47	10 Orang		Jl. UPT Trans Cempaka Batu RT. 036 RW. 010 Kel. Cempaka, Kec. Cempaka						Aktif
3	Banjarbaru	MAJU BERSAMA	M. NOOR /085101656427	10 Orang		Jl. Sapta Marga Kel. Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin						Aktif
4	Banjarbaru	PASIR PUTIH	H. ABDULLAH	10 Orang		Kel. Landasan Ulin Selatan, Kec. Liang Anggang						Aktif
5	Banjarbaru	MINA SEJAHTERA	SUDIONO / 081349546869	12 Orang		Gunung Kupang RT. 036 RW. 10 Kel. Cempaka, Kec. Cempaka						Aktif
6	Banjarbaru	BANGKAL	H. SAUKONI /081349586127	10 Orang		Kel. Bangkal Kec. Cempaka						Aktif
7	Banjarbaru	DANAU GALUH	SADRI/081348 846606	24 Orang		Jl. Purnawirawan Tambak Jariah Kel. Palam Kec. Cempaka						Aktif
8	Banjarbaru	SALAM LESTARI	MUCHLIS / 081349343665	11 Orang		Jl. Nusantara RT. 6 RW. 2 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang						Aktif
9	Kotabaru	PADA IDI	H. SULAIMAN/ 085332138368	15 Orang		RT.03 RW.01, Desa Teluk Tamiang, Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar						Aktif
10	Kotabaru	RAJAWALI	ALIUDDIN / 085249501856	14 Orang		RT/RW.02/01, Desa Teluk Sirih, Kec. Pulau Laut Selatan						Aktif
11	Kotabaru	BINA BERSAMA	SUPRIADI	20 Orang		Jln. Pantai Baru RT/ RW.03/02 Desa Tanjung Lalak Utara, Kec. Pulau Laut Kepulauan			Handphone (1 buah)	2018	APBN	Aktif
12	Kotabaru	BAMEGA SAIJA'AN	RAHMANSYAH	20 Orang		Desa Hilir Muara, Kec. Pulau Laut Utara						Aktif

13	Kotabaru	SELAYAR BERSATU	NURDIANSYA H, S.Pd / 085390272222	10 Orang		Jln. Pendidikan RT/RW. 01/01 No. 28 Desa Tanjung Pelayar, Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar						Aktif
14	Kotabaru	HIDUP BERSAMA	SIRAJUDDIN / 081217613202	10 Orang		Jln. Budi Luhur RT/RW. 02/01, Desa Pulau Kerasian, Kec. Pulau Laut Kepulauan						Aktif
15	Kotabaru	LUMBA-LUMBA	TASWIN / 082151051769	11 Orang		RT/ RW. 06/02, Desa Kerayaan, Kec. Pulau Laut Kepulauan						Aktif
16	Kotabaru	KUDA LAUT	H. SYAMSUL / 081348071559	20 Orang		Jln. Padat Karya RT/RW.04/02, Desa Hilir Muara, Kec. Pulau Laut Utara			GPS, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Rompi Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	Aktif
17	Kotabaru	KARANG TANJUNG	DARDIANSYA H/ 081317205991	10 Orang		RT. 05, Desa Tanjung Batu, Kec. Kelumpang Tengah			Papan Seruan	2021	APBD Prov.	Aktif
18	Kotabaru	PANTAI KELUMPANG	MUHAMMAD BAYANI / 082153039667	10 Orang		RT/ RW. 05/02, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan			Papan Seruan (1 buah)	2021	APBD Prov.	Aktif
									Hp (1 buah)	2018	APBN	
19	Kotabaru	SIPATUO	SINRANG / 085391991855	32 Orang		RT/ RW. 01/01, Desa Teluk Tamiang, Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar			Papan Seruan (1 buah)	2021	APBD Prov.	Aktif
									Hp (1 buah)	2018	APBN	
20	Kotabaru	MAJU BERSAMA	ABDUL GAFAR / 085248846063	13 Orang		RT/ RW. 02/01, Desa Tanjung Sungkai, Kecamatan Pulau Laut Barat						Aktif
21	Kotabaru	SAHABAT LAUT	LATUO	15 Orang		RT/ RW. 06/03, DesaTengah,Pulau Marabatuan, Kec. Pulau Sembilan						Aktif
22	Kotabaru	MUTIARA SARANG TIUNG	ABDUL MULUD/ 085345290888	10 Orang		Jl. Berangas Km. 8,5 RT.04, Desa Sarang Tiung Kec. Pulau Laut Utara						Aktif
23	Kotabaru	BERKAT RAKAT	NASTAJUDIN / 085259939829	19 Orang		Jln. Berangas RT.01 Desa Teluk Gosong, Kec. Pulau Laut Timur						Aktif

24	Kotabaru	PUTRA NELAYAN	BAHRUDIN / 085348689768	14 Orang		Jl. Madrasah RT.02, Desa Pudi Seberang, Kec. Kelumpang Utara						Aktif
25	Kotabaru	BINA LAUT SEJAHTERA	ZULKIFLI	18 Orang		Kampung Baru RT.05 RW.03 Ds. Tanjung Nyiur Kec. Pulau Sembilan						Aktif
26	Kotabaru	BANGKIT BERSAMA	BEDDU	15 Orang		Jl. Mercu Suar RT/RW.03/002 Ds. Tanjung Kunyit Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar						Aktif
27	Banjarmasin	BELAYUNG SAKTI	ASMURI / 085248025607	54 Orang		Jl. Tatah Belayung, RT.12 RW. 02 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan	3°21'30.3"S 114°33'42.6" E	Hp (2 buah)	2019	APBD Prov.		Aktif
28	Banjarmasin	UDANG LESTARI	SAHRANI / 082357864588	40 Orang		Jl. Simpang Sungai Jelai RT.27/RW.02 Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan	3.364259479 5674086S 114.6089043 5613692E					Aktif
29	Banjarmasin	RAKAT MUFAKAT	MULYADI / 082350992593	30 Orang		Jl. Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur						Aktif
30	Banjarmasin	BINA WARGA	MUHIDIN / 083142259439	25 Orang		Jl. Sei Gempa, Kecamatan Banjarmasin Utara						Aktif
31	Hulu Sungai Selatan	BASAMAAN	ROBYANOOR	37 Orang	1997	Desa Bangkau, Kecamatan Kandungan			Hp	2018	APBN	Aktif
32	Hulu Sungai Selatan	KERJASAMA	BERAHIM	24 Orang	2006	Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara			Perahu Bermotor 2	2021	APBD. Prov	Aktif
									Papan Seruan	2022	APBD. Prov	
									GPS, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Rompi Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	
33	Hulu Sungai Selatan	PANTAI ULIN	ABDUL LAHMAN	61 Orang	2003	Desa Pantai Ulun, Kecamatan Simpur						Aktif
34	Hulu Sungai Selatan	TERATAI	ARDI	15 Orang	2004	Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan						Aktif

35	Hulu Sungai Selatan	MUNING	H. NURDIN	21 Orang	2003	Desa Pandan Sari, Kecamatan Daha Selatan						Aktif
36	Hulu Sungai Selatan	GAMURUNG	MUKERANSYA H	23 Orang	2004	Desa Amparaya, Kecamatan Simpur						Aktif
37	Hulu Sungai Selatan	SUKA MAJU	M. HUSAINI	63 Orang	2018	Desa Panjampang, Kecamatan Simpur						Aktif
38	Hulu Sungai Selatan	AKBAR	M. YANA	22 Orang	2007	Desa Baru, Kecamatan Daha Barat						Aktif
39	Hulu Sungai Selatan	AMANAHA	ARIANTO	20 Orang	2013	Desa Bajayau Lama, Kecamatan Daha Barat			Hp	2018	APBN	Aktif
40	Hulu Sungai Selatan	RAKAT MUFAKAT	YUSRAN	66 Orang	2017	Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Simpur						Aktif
41	Hulu Sungai Selatan	KARYA AMANDIT	HUSIN	32 Orang	2017	Desa Muning Baru, Kecamatan Daha Selatan						Aktif
42	Hulu Sungai Selatan	RAKAT MUFAKAT	AAN	93 Orang	2011	JL. Nagara Kandungan RT. 02/I Desa Muning Tengah, Kec. Daha Selatan						Aktif
43	Hulu Sungai Selatan	PERKASA	IMUK	25 Orang	2010	Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang						Aktif
44	Hulu Sungai Selatan	SAPU JAGAT	BADARUDIN	68 Orang	2004	Desa Baggo Tanggul, Kecamatan Kalumpang						Aktif
45	Hulu Sungai Selatan	PANTAI ULIN	ABDUL LAHMAN	61 Orang	2003	Desa Pantai Ulun, Kecamatan Simpur						Aktif
46	Hulu Sungai Selatan	GAWI MANUNTUNG	SAHIDIN	15 Orang	2012	Desa Pandak Daun, Kec. Daha Selatan						Tidak Aktif
47	Hulu Sungai Selatan	BERKAT BERSAMA	M. DAMIYATI	67 Orang	1997	Desa Pandak Daun, Kecamatan Daha Utara						Tidak Aktif
48	Hulu Sungai Selatan	MAJU BERSAMA	ALIYAS	40 Orang	2006	Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara			Perahu (2 unit)	2018	APBD	Aktif
49	Hulu Sungai Selatan	USAHA MEMBANGUN	ABDUL HAMID	17 Orang	2004	Desa Murung Raya, Kecamatan Daha Utara						Tidak Aktif

50	Banjar	KASTURI	BAIHAKI / 082151892675	23 Orang	2020	Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat	Pengawasan sumberdaya perikanan	- 3.35925283 S 114.8198357 4E				Aktif
51	Banjar	ABULUNG	M. NOOR / 081251808001	19 Orang	2009	Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat	Pengawasan sumberdaya perikanan	- 3.35162862 S 114.8164384 3E	HP	2016	APBN	Aktif
52	Banjar	BINA BANUA	M. YAMIN / 082156526206	12 Orang	2011	Desa Taluk Selong, Kecamatan Martapura Barat	Pengawasan sumberdaya perikanan					Tidak aktif
53	Banjar	PEMUDA PEDULI	SYAMSUDI / 081349513324	10 Orang	2020	Desa Antasan Senor, Kecamatan Martapura Timur	Pengawasan sumberdaya perikanan	3°24'10.6"S 114°51'12.7" E				Aktif
54	Banjar	FAJAR LESTARI	ZAINAL ABIDIN /081251619399	20 Orang	2003	Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Aranio	Pengawasan sumberdaya perikanan					Aktif
55	Banjar	KARYA BERSAMA	MURTADO / 0852579790	11 Orang	2013	Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio	Pengawasan sumberdaya perikanan	3°31'16.3"S 115°00'32.1" E	HP	2016	APBN	Tidak Aktif
56	Banjar	BINA BERSAMA	KAMRAJI / 085821665638	21 Orang	2007	Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk	Pengawasan sumberdaya perikanan	3°17'55.6"S 114°40'18.1" E				Aktif
57	Banjar	RAKAT	AS'AT / 083159722081	15 Orang	2009	Desa Sei. Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk	Pengawasan sumberdaya perikanan	-3.313652 .114753517				Aktif
58	Banjar	SADAR UNTUK MAJU	MAHYUNI	25 Orang	2010	Desa Tajau Landung, Kecamatan Sungai Tabuk	Pengawasan sumberdaya perikanan		HP	2016	APBN	Tidak aktif
59	Banjar	PUTRI SALJU	JASMANI / 085345448561	14 Orang	2010	Desa Munggur Raya, Kecamatan Astambul	Pengawasan sumberdaya perikanan	3°20'47.9"S 114°50'46.8" E				Aktif
60	Banjar	BINA KELAUTAN	SABIRIN / 085248019437	10 Orang	2008	Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh	Pengawasan sumberdaya perikanan	3.50444'S. 114.51943'E				Aktif

61	Banjar	PANTAI HARAPAN	MURSIDI / 085249859653	10 Orang	2008	Desa Tanipah, Kec. Aluh-Aluh	Pengawasan sumberdaya perikanan					Aktif
62	Banjar	MINA LESTARI	H. BADRUDDIN / 081251336607	55 Orang	2016	Desa Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan	Pengawasan sumberdaya perikanan	3.454493. 114.947287	HP ALDO -007	2017	APBD	Aktif
62	Banjar	BUBUHAN SADAR LESTARI	SULAIMAN	16 Orang	2021	Desa Pandak Daun, Kecamatan Karang Intan	Pengawasan sumberdaya perikanan	3°25'41.2"S 114°55'06.3" E				Aktif
64	Banjar	BARISAN PEMUDA PANDAK DAUN	HAMLI/ 085233690826	15 Orang	2021	Desa Pandak Daun, Kecamatan Karang Intan	Pengawasan sumberdaya perikanan	3.42816°S. 114.91840°E				Aktif
65	Banjar	JAMBU MERAH	ANANG SYAHRANI	17 Orang	2021	Desa Pejambuan, Kecamatan Sungai Tabuk	Pengawasan sumberdaya perikanan	3.3237626,1 14.7345541, 1104				Aktif
66	Banjar	PULAU JAYA	SULAIMAN/ 083155654462	34 Orang	2021	Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul	Pengawasan sumberdaya perikanan	3.42820'S 114.91844'E				Aktif
67	Barito Kuala	SADAR BERSAMA	H. JAMHARI / 081347119779	15 Orang	2009	Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit	Perikanan Tangkap dan Budidaya		Hp	2009	APBD Kab.	Aktif
									Handy Talky	2012	APBD Kab.	
									Senter 3, Kamera, Rompi 20	2014	APBD Kab.	
									HT 2, Kamera, Teropong Senter, Topi, Baju Kaos	2015	APBD Prov.	
									Papan Seruan	2015	APBD Prov.	
68	Barito Kuala	SADAR KARYA	MIRHAN / 085251323005	10 Orang	2009	Desa Pantang Raya, Kecamatan Tabukan	Perikanan Tangkap dan Budidaya		Handy Talky	2012	APBD Kab.	Aktif
									Baju 10, Topi 10, Jaket 10, Senter 2	2014	APBD Kab.	

									HT 2, Senter 3, Kamera	2015	APBD Kab.	
									Hp	2016	APBD Prov.	
									Papan Seruan	2017	APBD Prov.	
69	Barito Kuala	SHANDY CITRA	RUSBANDI	10 Orang	2011	Desa Lepas, Kecamatan Bakumpai	Perikanan Tangkap dan Budidaya		HT 2, Senter 3, Kamera	2015	APBD Kab.	Aktif
									Papan Seruan, Hp	2016	APBD Prov.	
									Rompi 11, Sepatu Boat 11, Baju 11	2019	APBD Prov.	
70	Barito Kuala	BUSER	MASRAWAN / 085249764400	10 Orang	2011	Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak	Perikanan Tangkap dan Budidaya		Perahu Motor, HT	2013	APBD Kab.	Aktif
									Teropong Kamera, Senter, Rompi 10, Topi 10	2014	APBD Prov.	
									Kamera, Senter 3, Rompi 20	2014	APBD Kab.	
									HT 2	2015	APBD Kab.	
71	Barito Kuala	RUKN BERSAMA	DAHLANSYAH / 085393394064	11 Orang	2015	Desa Sungai Gampa, Kecamatan Rantau Badauh	Perikanan Tangkap dan Budidaya					Aktif
72	Barito Kuala	GRAHA BAKTI MULIA	AL-AMINUDDIN /085705085438	29 Orang	2020	Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak	Perikanan Tangkap dan Budidaya					Aktif
73	Barito Kuala	SEPAKAT	SURIADI / 082148313297	13 Orang	2015	Desa Bagus, Kecamatan Marabahan	Perikanan Tangkap		Papan Seruan, Hp	2016	APBD Prov.	Aktif
									Hp	2017	APBD Prov.	
74	Barito Kuala	BERKAT BERSAMA	H. M. YAMANI / 081348195969	45 Orang	2006	Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit	Perikanan Tangkap dan Budidaya		HT, Perahu Motor	2004	APBD Kab.	Aktif

									Teropong Kamera, Senter, Rompi 10	2014	APBD Prov.	
									Baju 11, Jaket 11, Senter 2	2014	APBD Kab.	
									HT 2	2015	APBD Kab.	
									Papan Seruan	2015	APBD Kab.	
75	Barito Kuala	KEMITRAAN	M. SABDI / 085249877581	10 Orang	2009	Desa Balandean, Kecamatan Alalak	Perikanan Tangkap dan Budidaya		Hp	2009	APBD Kab.	Aktif
									Hp	2010	APBD Kab.	
									HT	2012	APBD Kab.	
									Teropong Kamera, Senter, Rompi 10, Topi 10	2014	APBD Prov.	
									Senter 3, Kamera, Rompi 20	2014	APBD Kab.	
									HT 2	2015	APBD Kab.	
									Papan Seruan	2018	APBD Prov.	
76	Barito Kuala	SUNGAI MADANG	AHMAD SAIHANI	10 Orang	2012	Desa Penghulu, Kecamatan Marabahan	Perikanan Tangkap dan Budidaya		HT, Perahu Motor	2012	APBD Kab.	Aktif
									TeropongKamera, Senter, 10 Rompi 10 Topi	2014	APBD Prov.	
									3 senter, Kamera, 20 Rompi	2014	APBD Kab.	
									HT 2	2015	APBD Kab.	

77	Barito Kuala	KARYA BERSAMA	MASLANI	11 Orang	2011	Desa Karya Baru, Kecamatan Tabunganen	Perikanan Tangkap dan Budidaya					Aktif
78	Barito Kuala	BAGUS PEDULI	HASAN	10 Orang	2011	Desa Bagus, Kecamatan Marabahan	Perikanan Tangkap dan Budidaya		10 Baju, 10 Topi, 10 Jaket, 2 Senter	2014	APBD Kab.	Aktif
									HT 2, Kamera, Senter 3	2015	APBD Kab.	
79	Barito Kuala	SUMBER ABADI	MISRAN	10 Orang	2015	Desa Tatah Belayung, Kec. Mandastana	Perikanan Tangkap dan Budidaya					Tidak Aktif
80	Barito Kuala	MINA LESTARI	ABDUL RAHMAN	21 Orang	2011	Desa Kuala Lupak, Kec. Tabunganen	Perikanan Tangkap dan Budidaya		Perahu Motor, HT,	2013	APBD Kab.	Aktif
									3 Senter, Kamera, 20 Rompi	2014	APBD Kab.	
									Kamera, Teropong Senter, Topi, Rompi, Baju	2015	APBD Prov.	
82	Tanah Laut	INDAH LESTARI	Marhalan	20 Orang		Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan			GPS, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Rompi Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	Aktif
83	Tanah Laut	BATU LIMA	RUSLAN ARIANDI	51 Orang		Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung						Aktif
84	Tanah Laut	BINA WARGA	JOHANSYAH	20 Orang		Desa Ranggung Dalam, Kecamatan Takisung						Aktif
85	Tanah Laut	BINA BERSAMA	DAUD	24 Orang		Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong						Aktif
86	Tanah Laut	SUKA DAMAI	AHMAD ZARKASIH	12 Orang		Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari						Aktif
87	Tanah Laut	MAJU BERSAMA	RIDUAN	15 Orang		Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur						Aktif

88	Tanah Laut	JELANG MASA DEPAN	RUSIANSYAH / 085348313033	9 Orang		Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau						Aktif
89	Tanah Laut	WADAH TANI	SUPARIAN	10 Orang		Desa Benua Tengah, Kecamatan Takisung						Aktif
90	Tanah Laut	DEWA TANJUNG	AKLI	29 Orang		Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan						Aktif
91	Tanah Laut	BAKTI HARAPAN MASA	M. YUSUF	8 Orang		Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau						Aktif
92	Tanah Laut	ARUNG SAMUDRA	H. ISKANDAR	10 Orang		Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap						Aktif
93	Tanah Laut	ARMADA NELAYAN	AWAR	13 Orang		Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur						Aktif
94	Tanah Laut	TELAGA SAMUDRA	MUHAMMAD	10 Orang		Desa Telaga Langsung, Kecamatan Takisung						Aktif
95	Tanah Laut	GUNTUNG LESTARI	MAHLAN	10 Orang		Desa Guntung Besar, Kecamatan Pelaihari						Aktif
96	Tanah Laut	BURUNG LAUT	JURIANSYAH	12 Orang		Desa Tabanio, Kecamatan Takisung						Aktif
97	Tanah Laut	LAUT BIRU	KASTAN	20 Orang		Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung						Aktif
98	Tanah Laut	RAWA BAKAU ABADI	BASIR	13 Orang		Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau						Aktif
99	Tanah Laut	MINA RAWA MAKMUR	SARMAN	15 Orang		Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur						Aktif
100	Tanah Laut	MINA ATU- ATU LESTARI	SYAID TOHIR	13 Orang		Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari						Aktif
101	Tanah Laut	HARAPAN BERSAMA	KHAIRUDDIN	20 Orang		Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur						Aktif
102	Tanah Laut	KAYUH BAIMBAI	ABDUL SANI	20 Orang		Desa Bawah Layung, Kecamatan Kurau						Aktif

103	Tanah Laut	SAMUDRA JAYA	UMAR	20 Orang		Desa Swarangan, Kecamatan Jorong						Aktif
104	Tanah Laut	BINA KARYA	M. EFENDY	30 Orang		Desa Benua Rata, Kecamatan Bati-Bati						Aktif
105	Tanah Laut	MANUNGAL LESTARI	BUDI HANDOKO	28 Orang		Desa Kayu Abang, Kecamatan Tambang Ulang						Aktif
106	Tanah Laut	KUNYIT LESTARI	NAKHROWI	26 Orang		Desa Kunyit, Kecamatan Pelaihari						Aktif
107	Tanah Laut	AMBAWANG LESTARI	YITNO OTOMO	28 Orang		Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar						Aktif
108	Hulu Sungai Tengah	BINA USAHA	NOOR AHMADI /085346390976	50 Orang	2008	Desa Tabat RT. 04, Kecamatan Labuan Amas Utara	Patroli Pengawasan	2°37'29.072" S 115°13'33.241"E	Perahu Bermotor 2, HT	2019	APBD PROV.	Aktif
									HP	2013	APBD Kab.	
									Hp, Kamera, Senter 10	2017	APBD Kab.	
									Rompi 10 Baju 10	2009	APBD Kab.	
									Baju Kaos 5	2007	APBD Kab.	
									Sepatu Boat 5, Papan Seruan 2	2016	APBD Kab.	
109	Hulu Sungai Tengah	BINA BERSAMA	ABDUL WAHID / 08235011578	34 Orang	2003	Desa Tabat RT. 01, Kecamatan Labuan Amas Utara	Patroli Pengawas	2°37'34.148" S 115°13'57.209"E	Hp	2013	APBD Kab.	Tidak Aktif
									Sepatu Boat 5, Papan Seruan	2016	APBD Kab.	
									Hp, Kamera, Senter 10	2018	APBD Kab.	
									Perahu Motor 2, HT	2019	APBD Prov.	
110	Hulu Sungai Tengah	SETIA KAWAN	PARMAN / 082358750934	15 Orang	2011	Desa Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara	Patroli Pengawasan	2°38'17.078" S 115°12'55.161"E	HP	2013	APBD Kab.	Tidak Aktif
									Sepatu Boat 5, Papan Seruan	2016	APBD Kab.	

									Hp	2018	APBD Kab.	
									Perahu Motor 2, HT	2019	APBD Prov.	
111	Hulu Sungai Tengah	PANGGANG KUNING	ABDURAHMAN /082350457433	10 Orang	2013	Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan	Patroli Pengawasan	2°38'41.285" S 115°15'39.68 1"E	HP	2013	APBD Kab.	Tidak Aktif
									Hp, Kamera, Senter 3, Sepatu Boat 5, Pos Pokmaswas, Papan Seruan 2	2016	APBD Kab.	
									Perahu Motor 2, HT	2019	APBD Prov.	
112	Hulu Sungai Tengah	KARYA BERSAMA	KADERI / 081348693517	20 Orang	2013	Desa Tungkup, Kecamatan Labuan Amas Utara	Patroli Pengawasan		HP	2013	APBD Kab.	Tidak Aktif
									HP, Kamera, Senter 5,	2016	APBD Kab.	
									HP, Kamera, Senter 5, Sepatu Boat 5, Pos Pengawasan, Papan Seruan 2	2016	APBD Kab.	
									Perahu Motor 2, HT	2019	APBD Prov.	
113	Hulu Sungai Tengah	KERUING	DIAN / 085249923250	10 Orang	2013	Desa Perumahan, Kecamatan Labuan Amas Utara	Patroli Pengawasan	2°38'11.591" S 115°15'41.57 5"E	HP, Kamera, Senter 5, Teropong	2016	APBD Kab.	Tidak Aktif
									Pos Pengawas, Papan Seruan 2	2017	APBD Kab.	
									Perahu Motor 2, HT	2019	APBD Prov.	

114	Hulu Sungai Tengah	BERKAT SABAR	SAIBATUL HAMDI / 085248358416	19 Orang	2011	Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan	Patroli Pengawasan	2°32'24.586" S 115°16'52.78 2"E	Perahu Motor, HP	2013	APBD Kab.	Aktif
									HP,Kamera, Teropong, Senter 5, Sepatu Boat 5	2016	APBD Kab.	
									Pos Pengawas, Papan Seruan 2	2017	APBD Kab.	
115	Hulu Sungai Tengah	KERAMAT URANG TUHA	SUPIANI	33 Orang	2009	Desa Manta'as, Kecamatan Labuan Amas Utara	Patroli Pengawasan	2°35'28.328" S 115°11'24.80 3"E	Hp, Kamera, Senter 5	2013	APBD Kab.	Tidak Aktif
									Sepatu Boat 5, Papan Seruan	2016	APBD Kab.	
									Perahu Motor 2, HT	2019	APBD Prov.	
116	Hulu Sungai Tengah	USAHA BERSAMA	SYAHRANI	50 Orang	2008	Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara	Patroli Pengawasan		Perahu Motor 2, HT, Papan Seruan			Tidak Aktif
117	Hulu Sungai Tengah	BERKAT BERSATU	MISERAN	23 Orang	2007	Desa Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara	Patroli Pengawasan	2°38'17.070" S 115°12'55.14 8"E	Perahu Motor 2, HT 2, Baju Kaos 10, Papan Seruan	2008	APBD Kab.	Tidak Aktif
118	Hulu Sungai Tengah	PANGGANG RAMBA	BADERI	26 Orang	2005	Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan	Patroli Pengawasan	2°32'26.068" S 115°16'52.88 8"E	Perahu Motor, HT 2	2006	APBD Kab	Tidak Aktif
									Kaos 5	2007	APBD Kab.	
119	Hulu Sungai Tengah	BERKAT SETUJU	YUSERAN	11 Orang	2013	Desa Panggang Marak, Kecamatan Labuan Amas Selatan	Patroli Pengawasan	2°41'11.799" S 115°18'47.50 2"E	Perahu Motor, Sepatu Boat 5	2016	APBD Kab.	Tidak Aktif
120	Hulu Sungai Tengah	MAJU BERSAMA	JUNAIDI	13 Orang	2013	Desa Pandanu, Kecamatan Haruyan	Patroli Pengawasan	2°41'11.799" S 115°18'47.50 2"E	Perahu Motor 2, HP, Sepatu Boat 5, Pos Pokmaswas, Papan Seruan	2016	APBD Kab.	Tidak Aktif
121	Tanah Bumbu	HARAPAN MAJU	IR. HAIRUDIN	17 Orang		Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat						Aktif

122	Tanah Bumbu	CINTA BAHARI	MULIYANSYAH			Desa Wiritasi, Kecamatan Kusan Hilir						Aktif
123	Tanah Bumbu	BERKAT USAHA	TAKING	24 Orang		Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir						Aktif
124	Tanah Bumbu	TIGA SERANGKAI	MULYADI	20 Orang		Desa Salimuran, Kecamatan Kusan Hilir						Aktif
125	Tanah Bumbu	BERDIKARI	YUSDIANI	27 Orang		Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui			GPS, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Rompi Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	Aktif
126	Tanah Bumbu	KARANG KIMA	SAYID FIRDAUS	27 Orang		Desa Angsana, Kecamatan Angsana			GPS, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Rompi Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	Aktif
127	Tanah Bumbu	KARANG INDAH LESTARI	AMIRUDDIN	22 Orang		Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban						Aktif
128	Tanah Bumbu	POLEWALI	M. IDRIS	18 Orang		Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir						Aktif
129	Tanah Bumbu	ANTASAN	MONNENG	19 Orang		Desa Pulo Satu, Kecamatan Kusan Hilir						Aktif
130	Tanah Bumbu	USAHA MAJU	TARSAH	17 Orang		Desa Pulo Satu, Kecamatan Kusan Hilir						Aktif
131	Tanah Bumbu	DANAU INDAH	H. MASRANI / 082350631447	20 Orang		Desa Danau Indah, Kecamatan Batulicin			Papan Seruan	2021	APBD PROV.	Aktif
132	Tanah Bumbu	BINA BERSAMA	ASWADI RAHMAN	16 Orang		Desa Anjir Baru, Kecamatan Kusan Hulu			Papan Seruan	2021	APBD PROV.	Aktif

									GPS, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Rompi Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	
133	Tanah Bumbu	MAKMUR BERSAMA	MULYADI	22 Orang		Desa Tiberu Panjang, Kecamatan Kusun Hulu						Aktif
134	Tanah Bumbu	BINA MAKMUR	ABDUL HALIM	13 Orang		Desa Lasung, Kecamatan Kusan Hulu						Aktif
135	Tanah Bumbu	SUNGAI DANAU LESTARI	MUHAMMAD ZAKKY	26 Orang		Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui			GPS, Rompi, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	Aktif
136	Tanah Bumbu	TIBARAU JAYA	MIJARI RAHMAN	Tanah Bumbu		Desa Tiberu Panjang, Kec. Kusan Hulu			GPS, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Rompi Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	Aktif
137	Balangan	MINA LESTARI	AUD TAHYUDIN /081210400170	10 Orang		UPT Lajar Papuyuan, Kecamatan Lampihong	Pengawasan Perairan Umum	2.308922036 7032026, 115.3647015 0349241	Papan Seruan	2021	APBD Prov.	Aktif
138	Balangan	SUKA MAJU	M. JUMAIDI / 082159629574	13 Orang		Desa Murung Abuin, Kecamatan Paringin Selatan	Pengawasan Perairan Umum	2.375701882 8838796, 115.5276811 87194	GPS, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Rompi Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	Aktif

139	Balangan	PULAU BEREDAR	M. ABIDIN / 085348176298	12 Orang		Desa Baruh Bahinu Dalam, Kecamatan Parigin Selatan	Pengawasan Perairan Umum	2.374651596 114188, 115.5321625 965371				Aktif
140	Balangan	TELAGA BEREDAR	MUHAMMAD ZAINI	10 Orang		Desa Telaga Purun, Kecamatan Paringin Selatan	Pengawasan Perairan Umum	2.376272721 9401856, 115.5372355 8877576	Perlengkapan Pokmaswas	2021	APBD Kab.	Aktif
141	Balangan	LEPASI	SUKIRMAN / 082253324739	10 Orang		Desa Lok Hamawang, Kecamatan Lampihong	Pengawasan Perairan Umum	2.330983002 661057, 115.3882663 5930091				Aktif
142	Balangan	MAJU BERSAMA	MUSTAFA KEMAL / 081944242277	10 Orang		Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan	Pengawasan Perairan Umum	2.375277282 6653024, 115.5330219 9981971	Perlengkapan Pokmaswas	2021	APBD Kab.	Aktif
143	Balangan	KERAYAU LESTARI	RIDUAN / 081346801813	10 Orang		Desa Liyu, Kecamatan Halong	Pengawasan Perairan Umum	2.165516353 7939335, 115.6267344 0764257	Papan Seruan	2021	APBD Prov.	Aktif
144	Balangan	LESTARI PERIKANAN	MULYONO	16 Orang		Desa Sungai Barung, Kecamatan Juai	Pengawasan Perairan Umum	2.348242008 804286, 115.5814673 3798968				Aktif
145	Hulu Sungai Utara	86	ASRANI / 085248705587	15 Orang		Desa Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah						Aktif
146	Hulu Sungai Utara	SUMBER MAKMUR	FAHRURAJI / 085248966616	15 Orang		Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik						Aktif
147	Hulu Sungai Utara	NELAYAN MEMBANGUN	BIJIRMI / 085247948679	15 Orang		Desa Sungai Papuyu, Kecamatan Babirik			Hp	2018	APBN	Aktif
148	Hulu Sungai Utara	HARAPAN USAHA	AHMADI / 081349354012	17 Orang		Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik						Aktif
149	Hulu Sungai Utara	SUMBER LESTARI	SUBELI	10 Orang		Desa Sungai Kuini, Kecamatan Sungai Pandan						Aktif

150	Hulu Sungai Utara	SADAR KARYA	MAHYUDIN	15 Orang		Desa Rantau Karau Raya, Kecamatan Sungai Pandan						Aktif
152	Hulu Sungai Utara	BINA BERSAMA	MARHAT	15 Orang		Desa Sungai Durait Hulu, Kecamatan Babirik						Aktif
153	Hulu Sungai Utara	BERKAT MAJU	ARDIMAN / 085251413306	10 Orang		Desa Banyu Tajun Dalam, Kecamatan Sungai Pandan						Aktif
154	Hulu Sungai Utara	MAJU BERSAMA	BAHRUDIN	10 Orang		Desa Padang Bangkal, Kecamatan Sungai Pandan						Aktif
155	Hulu Sungai Utara	SUKA MAJU	AMIN	18 Orang		Desa Sungai Durait , Kecamatan Tengah Babirik			Hp	2018	APBN	Aktif
									Perahu Bermotor 2 GPS, kamera, teropong, jaket, kaos, topi, tas ransel, sepatu boat, senter	2019	APBD Prov.	
									Papan Seruan	2022	APBD Prov.	
156	Hulu Sungai Utara	SUMBER TELAGA	SABIRIN / 082255258539	29 Orang		Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah						Aktif
157	Hulu Sungai Utara	BUNGA TERATAI	GAFURI RAHMAN	27 Orang		Desa Hambuku Tengah, Kecamatan Sungai Pandan						Aktif
158	Hulu Sungai Utara	MANDALA	M. ROBI	23 Orang		Desa Pinang Habang, Kecamatan Amuntai Tengah			Papan Seruan	2022	APBD Prov.	Aktif
159	Tabalong	AMBARAWA	ABRAR	23 Orang		Desa Hapalah, Kecamatan Banua Lawas						Aktif
160	Tabalong	USAHA BERSAMA	M. YUSUF	30 Orang		Desa Batang Banyu, Kecamatan Banua Lawas			GPS, Rompi, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Pokmaswas, Handlamp	2022	APBD PROV.	Aktif
161	Tabalong	PESAYANGAN	TAUFIKURRAH MAN 085389036910	16 Orang		Desa Sungai Durian No. 13 RT. 1 RW., Kecamatan Banua Lawas						Aktif

162	Tabalong	SUKA MAKMUR	ABDUL KARIM/ HUSNI	17 Orang		Habau Hulu, Kecamatan Banua Lawas						Aktif
163	Tabalong	UNDAN SWARNA	SULAIMAN / 085390490569	17 Orang		Desa Talan No. 43 RT. 04 RW., Kecamatan Banua Lawas		S-2°16'22" E 15°17'51"				Aktif
164	Tabalong	SUKA MAJU	JAILANI	20 Orang		Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas						Aktif
165	Tabalong	BINGKAI RAYA	SUHARDI	13 Orang		Desa Ampukung, Kecamatan Kelua						Aktif
166	Tabalong	LUNDU JAYA	ARNADI	20 Orang		Desa Ampukung, Kecamatan Kelua						Aktif
167	Tabalong	WAJA SAMPAI KAPUTING	M. SALEH /085249009489	23 Orang		Desa Pampanan No. RT. 02 RW., Kecamatan Pugaan						Aktif
168	Tabalong	MADANG LESTARI	MASRANI	25 Orang		Desa Madang, Muara Harus						Aktif
169	Tabalong	SUMBER REZEKI	YAKUPDIN	12 Orang		Desa Tamunti, Kecamatan Pugaan						Aktif
170	Tabalong	MAWAR	JULKIPLI HANAPI	15 Orang		Desa Sungai Rukam I, Kecamatan Pugaan						Aktif
171	Tabalong	KERANGKANG RAYA	MURJANI	15 Orang		Desa Sungai Rukam II, Kecamatan Pugaan						Aktif
172	Tabalong	MINA PEDULI	SALMANA	16 Orang		Desa Banua Lawas, Kecamatan Banua Lawas						Aktif
173	Tabalong	HARIANG LESTARI	MASRAN / JUMRI	16 Orang		Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas						Aktif
174	Tabalong	PELITA	KARTAMI / 085247740995	23 Orang		Desa Jirak No. 28 RT. II RW., Kecamatan Pugaan,			GPS, Rompi Pokmaswas, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Handlamp	2022	APBD PROV.	Aktif

175	Tabalong	BERKAT SABAR	JUNAIDI	25 Orang		Desa Purai, Kecamatan Banua Lawas						Aktif
176	Tabalong	MAJU BERSAMA	HADIANTO	20 Orang		Desa Talan, Kecamatan Banua Lawas						Aktif
177	Tabalong	SUKSES SELALU	M. HUSNANDAR Y.	25 Orang		Desa Pematang, Kecamatan Banua Lawas						Aktif
178	Tabalong	SINAR BARU	ASTARI	15 Orang		Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua						Aktif
179	Tabalong	KARYA BERSAMA	ARNI	25 Orang		Desa Binturu, Kecamatan Kelua						Aktif
180	Tabalong	BELANTI JAYA	SYARKAWI	25 Orang		Desa Masintan, Kecamatan Kelua						Aktif
181	Tabalong	TELAGA MAKMUR	ARPAN	27 Orang		Desa Karangan, Putih Kecamatan Kelua						Aktif
182	Tabalong	SUKA MAKMUR	BASRI	14 Orang		Desa Madang, Muara Harus						Aktif
183	Tabalong	SUMBER REZEKI	DEUT	15 Orang		Desa Warukin, Kecamatan Tanta						Aktif
184	Tabalong	HARAPAN BARU	JUHRI	20 Orang		Desa Pulau Ku'u, Kecamatan Tanta						Aktif
185	Tabalong	SADAR BERSAMA	AHMAD	25 Orang		Desa Walangkir, Kecamatan Tanta						Aktif
186	Tabalong	TUNJUR LESTARI	IMAN	12 Orang		Desa Pangi, Kecamatan Tanjung						Aktif
187	Tabalong	SABAR	RUSMA	21 Orang		Desa Banua Lawas, Kecamatan Banua Lawas						Aktif
188	Tabalong	ARWANA	ANTONG	15 Orang		Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung						Aktif
189	Tabalong	BERKAT SETIA	SYAHRUNI	23 Orang		Desa Tanjung Kecamatan Tanjung						Aktif

190	Tabalong	MINA LESTARI	SUDIBIO UTOMO	15 Orang		Desa Pangi Kecamatan Tanjung						Aktif
191	Tabalong	SINAR AGUNG	SYAHRANSYAH	30 Orang		Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pundak						Aktif
192	Tabalong	ARWANA	ANTONG	15 Orang		Desa Suput Kecamatan Haruai						Aktif
193	Tapin	BAMIGA	SALMAN	36 Orang	21-01-2009	Desa Banua Halat Kanan, Kecamatan Tapin Utara	Pengawasan	2° 89 -115° 14'	Perahu, HT, Jaket	2013	APBD Kab.	Tidak Aktif
194	Tapin	SUMBER REZEKI	AMIRUL / 081349653729	15 Orang	19-12-2021	Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan	Pengawasan	2° 90 -115° 12'	Perahu, HT, Rompi	2012	APBD Kab.	Aktif
									GPS,KaosKamera, Senter, Rompi	2015	APBD Kab.	
195	Tapin	PADANG KARUKAN	SYAIDINA HAMZAH / 081349650639	13 Orang	07-04-2015	Desa Tangkawang Lama, Kecamatan Bakarangan	Pengawasan	2° 92 -115° 10'	Perahu, HT, Pelampung, Kamera, Rompi, Senter, Kaos	2015	APBD Kab.	Aktif
									HP	2017	APBD Prov.	
196	Tapin	KURNIA SUBUR	A. YANI	12 Orang		Desa Masta, Kecamatan Bakarangan	Pengawasan	2° 83 -115° 11'				Tidak Aktif
197	Tapin	RAWA LESTARI	AHMAD SYARKANI / 085390977738	17 Orang		Desa Masta, Kecamatan Bakarangan	Pengawasan	2° 83 -115° 10'				Tidak Aktif
198	Tapin	SUMBER HARAPAN	ARBAIN	11 Orang		Desa Buas-Buas, Kecamatan Candi Laras Utara	Pengawasan	2° 75 -115° 93'	Perahu, HT, Pelampung, Kamera, Senter, Rompi	2015	APBD Kab.	Tidak Aktif
199	Tapin	SI KAWAH	KADEARAN	9 Orang		Desa Pariok, Kecamatan Candi Laras Utara	Pengawasan	2° 87 -115° 92'	Perahu, HT, Pelampung, Kamera, Senter, Rompi	2014	APBD Kab.	Tidak Aktif
200	Tapin	DOA BERSAMA	NONO / 085390608182	15 Orang		Desa Rawana Hulu, Kecamatan Candi Laras Utara	Pengawasan	2° 79 -115° 93'	HP	2017	APBD Prov.	Aktif
									Perahu Motor	2022	APBD PROV.	
201	Tapin	MUNING BERSAMA	ABD. MANAP	10 Orang		Desa Sei. Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan	Pengawasan	2° 86 -115° 02'				Tidak Aktif

202	Tapin	MAWAS DIRI	SUPIADI	15 Orang		Desa Teluk Haur, Kecamatan Candi Laras Utara	Pengawasan	2° 48 -115° 53'	Perahu, HT,Jaket	2013	APBD Kab.	Tidak Aktif
203	Tapin	SUWARGA	MUSA	11 Orang		Desa Sawaja, Kecamatan Candi Laras Utara	Pengawasan		Perahu, HT,Jaket	2013	APBD Kab.	Tidak Aktif
204	Tapin	SAMA BERJUANG	RUSTAM	30 Orang		Desa Rawana, Kecamatan Candi Laras Utara	Pengawasan	2° 80 -115° 92'				Tidak Aktif
205	Tapin	USAHA BERSAMA	MUHAMMAD	15 Orang		Desa Rawana, Kecamatan Candi Laras Utara	Pengawasan	2° 81 -115° 93'				Tidak Aktif
206	Tapin	MURUNG INDAH	NAPIAH	11 Orang		Desa Sei. Rutas, Kecamatan Candi Laras Selatan	Pengawasan	2° 85 -115° 01'				Tidak Aktif
207	Tapin	RAWA LESTARI	AHMAD SYARKANI	17 Orang		Desa Marampiau, Kecamatan Candi Laras Selatan	Pengawasan	2° 87 -115° 97'	Perahu, HT, Pelampung, Kamera, Senter, Rompi	2014	APBD Kab.	Aktif
									HP, Papan Seruan	2017	APBD Prov.	
									Papan Seruan	2020	APBD Prov.	
									Perahu Motor	2022	APBD Prov.	
208	Tapin	BINA USAHA	DARHAM	25 Orang		Desa Hiyung, Candi Laras Selatan	Pengawasan	2° 89 -115° 05'	Kapal, HT, Jaket	2013	APBD Kab.	Tidak Aktif
209	Tapin	KARATAU JAYA	RUSMIADI / 082255404043	12 Orang		Desa Bundung, Kecamatan Bakarangan	Pengawasan	2° 53 -115° 8'	Perahu, HT, Pelampung, Kamera, Senter, Rompi	2014	APBD Kab.	Aktif
									HP, Papan Seruan	2017	APBD Prov.	
									Papan Seruan Perahu Motor	2021 2021	APBD Prov. APBD Prov.	

									GPS, Rompi Pokmaswas, Teropong Binokuler, Teropong Monokuler Kamera Bawah Air, Kamera Semipro, Handlamp	2022	APBD PROV.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------	------------	--

Sumber: Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2023)

Tabel 3.78. Rekapitulasi Penanganan Perkara Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2023

No.	Nama Tersangka	Dugaan Pelanggaran	Tanggal Kejadian	Waktu Kejadian	Lokasi Kejadian	Proses Penanganan Pelanggaran	Hasil Penanganan Pelanggaran
1.	FERI RAMADHON (Nahkoda KM. TAMBAH REJEKI)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP NRI 712 (13 Mil) dari perairan Kalimantan Selatan dan menggunakan alat tangkap yang spesifikasinya tidak sesuai dengan dokumen perijinan yang telah ditentukan; serta Penggunaan alat tangkap cantrang.	27 Februari 2023	-	Perairan laut Muara Kintap pada koordinat 04° 07' 381" LS - 115° 12' 873" BT	Diproses oleh Satwas SDKP Tarakan, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kal-Sel tanggal 05 April 2023	Sanksi denda Rp. 160.252.400,00. Dilanjutkan dengan proses sanksi pidana.
2.	TUMINDAR (Nahkoda KM. JAYA INDAH II)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP NRI 712 (13 Mil) dari perairan Kalimantan Selatan dan menggunakan alat tangkap yang spesifikasinya tidak sesuai dengan dokumen perijinan yang telah ditentukan; serta Penggunaan alat tangkap cantrang.	27 Februari 2023	-	Perairan laut Muara Kintap pada koordinat 04° 08' 654" LS - 115° 11' 125" BT	Diproses oleh Satwas SDKP Tarakan, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kal-Sel tanggal 05 April 2023	Sanksi denda Rp. 48.246.000,00. Dilanjutkan dengan proses sanksi pidana.
3.	BAHRUNI Als BAHRUN Bin SANDRI	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan seperangkat alat Strum atau aliran listrik	07 Maret 2023	03.30 Wita	Perairan Sungai Ray 7 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan	Diproses oleh POLAIRUD POLDA Kalimantan Selatan, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel tanggal 09 Maret 2023	Sanksi pidana

No.	Nama Tersangka	Dugaan Pelanggaran	Tanggal Kehadian	Waktu Kejadian	Lokasi Kejadian	Proses Penanganan Pelanggaran	Hasil Penanganan Pelanggaran
4.	SURIANI Als SYAMSURI Als KAI URI Bin Alm. IJUJH	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan seperangkat alat Strum atau aliran listrik	30 Maret 2023	01.00 Wita	Perairan atau Persawahan di Desa Sungai Tabuk Keramat RT. 01 Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Prov. Kal-Sel	Diproses oleh Kepolisian Sektor Sungai Tabuk, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel tanggal 05 April 2023	Sanksi pidana
5.	USMAN (Nahkoda KM. ARTIKA WULANDARI)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen kapal sesuai ketentuan	Apr-23		Perairan Kotabaru	Diproses oleh Satwas SDKP Kotabaru, dengan menahan dokumen kapal dan diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel. Dokumen kapal ditahan sampai diselesaikannya kelengkapan dokumen yang ditetapkan.	Surat Peringatan I, dan selanjutnya dimintakan untuk menyelesaikan dan melengkapi dokumen kapal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan
6.	MUHAMMAD ISNAINI bin H. SULTAN (Nahkoda KM. BINA USAHA O1)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen kapal sesuai ketentuan	Apr-23		Perairan Kotabaru	Diproses oleh Satwas SDKP Kotabaru, dengan menahan dokumen kapal dan diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel. Dokumen kapal ditahan sampai diselesaikannya kelengkapan dokumen yang ditetapkan.	Peringatan untuk menyelesaikan kelengkapan dokumen sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan
7.	SYARIFUDIN (Nahkoda KM. BINA PASIPIK)	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen kapal sesuai ketentuan	Apr-23		Perairan Kotabaru	Diproses oleh Satwas SDKP Kotabaru, dengan menahan dokumen kapal dan diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel. Dokumen kapal ditahan sampai diselesaikannya kelengkapan dokumen yang ditetapkan.	Peringatan untuk menyelesaikan kelengkapan dokumen sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan
8.	HAMRANI Als AHAM Als Bin ANANG HAIRANI	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan seperangkat alat Strum atau aliran listrik	11 Mei 2023	03.00 Wita	Sungai Martapura, Desa Keliling Benteng Kec. Martapura Barat Kab. Banjar	Diproses oleh POLAIRUD POLDA Kalimantan Selatan, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel tanggal 15 Mei 2023	Sanksi pidana

No.	Nama Tersangka	Dugaan Pelanggaran	Tanggal Kehadiah	Waktu Kejadian	Lokasi Kejadian	Proses Penanganan Pelanggaran	Hasil Penanganan Pelanggaran
9.	JUNAIDI Als MAYDI Als Bin Alm. YUSRAN	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan seperangkat alat Strum atau aliran listrik	11 Mei 2023	01.00 Wita	Sungai Martapura, Desa Keliling Benteng Ulu RT. 007 Kec. Martapura Barat Kab. Banjar	Diproses oleh POLAIRUD POLDA Kalimantan Selatan, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel tanggal 15 Mei 2023	Sanksi pidana
10.	TARMIJI Als MIJI Bin SABL (Alm)	Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan seperangkat alat Strum atau aliran listrik	13 Juni 2023	00.05 Wita	Perairan/Sungai di Desa Kuin Besar Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar	Diproses oleh Kepolisian Resor Banjarbaru Sektor Aluh-aluh, dengan meminta Saksi Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel tanggal 27 Juni 2023	Sanksi pidana
11.	MAUDU (Nelayan Perikanan/Pemilik Kapal KM. CAHAYA INDAH, baru dibeli dari H. Rustam) (HP. 082256612826) DEDI NASDAR (Nahkoda KM. CAHAYA INDAH) Kotabaru	Melakukan pelanggaran usaha penangkapan ikan dengan ijin yang telah habis masa berlakunya (<i>expired</i>) dan keberadaan dokumen kapal yang tidak lengkap	16 Mei 2023	12.36 Wita	Perairan Timur Laut Kotabaru (WPP NRI 713)	Melalui Surat Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan Nomor B.1168/PS DKPSta.5/TU.210/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 Hal Pemberitahuan Pelanggaran Kapal Perikanan Izin Daerah	Surat Peringatan I, dan selanjutnya dimintakan untuk menyelesaikan dan melengkapi dokumen kapal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan
12.	ABDUL KODIR (Nahkoda/Pemilik Kapal KM. PUTRI BERLIAN) (HP. 082132915288) Pagatan	Melakukan pelanggaran usaha penangkapan ikan dengan ijin yang telah habis masa berlakunya (<i>expired</i>) dan keberadaan dokumen kapal yang tidak lengkap	13 Mei 2023	10.30 Wita	Perairan Timur Laut Kotabaru (WPP NRI 713)	Melalui Surat Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan Nomor B.1168/PS DKPSta.5/TU. 210/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 Hal Pemberitahuan Pelanggaran Kapal Izin Daerah	Surat Peringatan I, dan selanjutnya dimintakan untuk menyelesaikan dan melengkapi dokumen kapal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan
13.	DEDI MASDAR (Nahkoda Kapal KM. MAIKEL) (HP. 082132915288) Pagatan	Melakukan pelanggaran usaha penangkapan ikan dengan ijin yang telah habis masa berlakunya (<i>expired</i>) dan keberadaan dokumen kapal yang tidak lengkap	13 Mei 2023	10.00 Wita	Perairan Timur Laut Kotabaru (WPP NRI 713)	Melalui Surat Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan Nomor B.1168/PS DKPSta.5/TU. 210/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 Hal Pemberitahuan Pelanggaran Kapal Perikanan Izin Daerah	Surat Peringatan I, dan selanjutnya dimintakan untuk menyelesaikan dan melengkapi dokumen kapal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan

No.	Nama Tersangka	Dugaan Pelanggaran	Tanggal Kehadian	Waktu Kejadian	Lokasi Kejadian	Proses Penanganan Pelanggaran	Hasil Penanganan Pelanggaran
14	JAMADAN	Melakukan penangkapan ikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen SPB dan SLO, Kelayanan Expired, Nahkoda tidak dilengkapi dengan Surat Kecakapan	21 September 2023	10.30 Wita	Selat Kotabaru - Batulicin (WPP NRI 713)	Laporan dari Satwas PSDKP Kotabaru An. Aang Kunaefi. Saat ini dokumen administrasi kapal ybs masih di Satwas PSDKP Kotabaru	Surat Peringatan I, dan selanjutnya dimintakan untuk menyelesaikan dan melengkapi dokumen kapal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan
15	HAIRUDDIN	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan (Tidak memiliki SIUP, SIPI); dan Melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang (lampara)	18 Oktober 2023	10.00 Wita	WPPNRI 713/Selat Makasar	Melalui Surat Nomor 500.5.6.19/ 2631 - P3H/DISLUTKAN/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan Permintaan Penanganan Kapal Daerah ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ditjen PSDKP KKP-RI	Menunggu Proses persetujuan pelimpahan Penanganan Kapal Daerah dari Ditjen PSDKP-KKP RI
16	BAHRUDDIN	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan (Tidak memiliki SIUP, SIPI); dan Melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang (lampara)	18 Oktober 2023	10.30 Wita	WPPNRI 713/Selat Makasar	Melalui Surat Nomor 500.5.6.19/ 2631 - P3H/DISLUTKAN/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan Permintaan Penanganan Kapal Daerah ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ditjen PSDKP KKP-RI	Menunggu Proses persetujuan pelimpahan Penanganan Kapal Daerah dari Ditjen PSDKP-KKP RI

Sumber: Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Bidang PSDKP (2023)

Keterangan:

Terdapat 2 (dua) kasus perkara perikanan yang ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan demikian total perkara perikanan tahun 2023 sebanyak 18 kasus

Tabel 3.79. Rekapitulasi Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pengawasan untuk POKMASWAS Provinsi Kal-Sel
TA. 2023

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	SUMBER DANA	KETERANGAN
PERAHU MOTOR				
1	Pokmaswas Rakat Mufakat	Jl. Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	APBD 2023	
2	Pokmaswas Udang Lestari	Jl. Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	APBD 2023	
3	Pokmaswas Bina Bersama	Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar	APBD 2023	
4	Pokmaswas Sumber Rezeki	Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin	APBD 2023	
5	Pokmaswas Berkat Sabar	Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	APBD 2023	
6	Pokmaswas Usaha Bersama	Desa Batang Banyu, Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong	APBD 2023	
PAPAN SERUAN				
1	Pokmaswas Rakat Mufakat	Jl. Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	APBD 2023	
2	Pokmaswas Pulau Jaya	Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar	APBD 2023	

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	SUMBER DANA	KETERANGAN
3	Pokmaswas Bina Kelautan	Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar	APBD 2023	
4	Pokmaswas Karya Bersama	Desa Tungkup, Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah	APBD 2023	
5	Pokmaswas Berkat Sabar	Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	APBD 2023	
6	Pokmaswas Bina Laut Sejahtera	Kampung Baru RT.05 RW.03 Ds. Tanjung Nyiur Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru	APBD 2023	
7	Pokmaswas Sahabat Laut	RT/ RW. 06/03, Desa Tengah, Pulau Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru	APBD 2023	
8	Pokmasawas Buser	Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala	APBD 2023	
PERLENGKAPAN POKMASWAS AKTIF PUD				
1	Pokmaswas Rakat Mufakat	Jl. Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	APBD 2023	Baju Pokmasawas 15 buah; Handlamp 5 buah; Handy Talky 2 buah; Life Jacket 5 buah; Rompi Pokmaswas 5 buah
2	Pokmaswas Do'a Bersama	Desa Rawana Hulu, Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin	APBD 2023	Baju Pokmasawas 15 buah; Handlamp 5 buah; Handy Talky 2 buah; Life Jacket 5 buah; Rompi Pokmaswas 5 buah

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	SUMBER DANA	KETERANGAN
3	Pokmaswas Rawa Lestari	Desa Marampiau , Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin	APBD 2023	Baju Pokmasawas 15 buah; Handlamp 5 buah; Handy Talky 2 buah; Life Jacket 5 buah; Rompi Pokmaswas 5 buah
4	Pokmaswas Sumber Rezeki	Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin	DAK 2023	Handlamp 5 buah; Handy Talky (HT) 2 Buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah
5	Pokmaswas Berkat Sabar	Desa Kayu Rabah, Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	DAK 2023	Handlamp 5 buah; Handy Talky (HT) 2 Buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah
6	Pokmaswas Sumber Makmur	Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara	DAK 2023	Handlamp 5 buah; Handy Talky (HT) 2 Buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah
7	Pokmaswas Bingkai Raya	Desa Ampukung, Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong	DAK 2023	Handlamp 5 buah; Handy Talky (HT) 2 Buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	SUMBER DANA	KETERANGAN
8	Pokmasawas Belayung Sakti	Jl. Tatah Belayung, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	DAK 2023	Handlamp 5 buah; Handy Talky (HT) 2 Buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah
9	Pokmasawas Pulau Jaya	Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar	DAK 2023	Handlamp 5 buah; Handy Talky (HT) 2 Buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah
10	Pokmasawas Pemuda Peduli	Desa Antasan Senior, Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar	DAK 2023	Handlamp 5 buah; Handy Talky (HT) 2 Buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah
PERLENGKAPAN POKMASWAS AKTIF DI PERAIRAN LAUT				
1	Pokmasawas Danau Indah	Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu	DAK 2023	GPS 1 buah; Handlamp 5 buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	SUMBER DANA	KETERANGAN
				buah; Teropong Monokuler 2 buah
2	Pokmasawas Hidup Bersama	Jln. Budi Luhur RT/RW. 02/01, Desa Pulau Kerasian, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru	DAK 2023	GPS 1 buah; Handlamp 5 buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah
3	Pokmasawas Berkat Bersama	Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala	DAK 2023	GPS 1 buah; Handlamp 5 buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah
4	Pokmasawas Kemitraan	Desa Balandean, Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala	DAK 2023	GPS 1 buah; Handlamp 5 buah; Kamera Semipro 1 buah; Rompi Pokmaswas 15 buah; Teropong Binokuler 1 buah; Teropong Monokuler 2 buah

Sumber: Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan Bidang PSDKP (2023)

Tabel 3.80. Data Pelaku Usaha Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Patuh (orang)							Jumlah (Orang)
		Nelayan		Pembudidaya Ikan			Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		
		Nelayan Laut	Nelayan PUD	Pembudidaya Ikan Laut	Pembudidaya Ikan Payau	Pembudidaya Ikan Air Tawar	Pengolah	Pemasar	
1	Kotabaru	1,392	-	18	82	18	93	-	1,603
2	Tanah Bumbu	118	-	396	44	396	16	1	971
3	Tanah Laut	217	-	-	-	-	-	-	217
4	Barito Kuala	-	10	54	5	54	8	-	131
5	Banjar	71	141	153	-	153	11	-	529
6	Banjarbaru	-	-	35	-	35	35	-	105
7	Tapin	-	25	61	-	61	5	-	152
8	Hulu Sungai Tengah	-	-	142	10	142	31	12	337
9	Hulu Sungai Utara	-	-	9	-	9	-	-	18
10	Tabalong	-	-	17	-	17	1	-	35
11	Balangan	-	-	18	-	18	-	-	36

	KALIMANTAN SELATAN	1,798	176	903	141	903	200	13	4,134
--	---------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------

Sumber: Data terolah Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2023)

Keterangan:

Dalam pendataan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dan Penyuluh Perikanan yang tersebar di kabupaten/kota

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Seksi lingkup Bidang PSDKP, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sd 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sd 12 Mil
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya

VI. BIDANG BUDIDAYA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (BP2HP)

VI.1. SASARAN ESELON III BIDANG BP2HP

Tabel 3.81. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang BP2HP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang Dibina Perizinan Usahanya	100%
		Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut Yang Dapat Dibina	100%
		Persentase Cakupan Wilayah Yang Terkelola Usaha Pembudiyaan Ikan di Perairan Darat	100%
2	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan	100%

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat 4 indikator kinerja utama pada tahun 2023 ini, yaitu :

1. Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang Dibina Perizinan Usahanya
2. Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut Yang Dapat Dibina
3. Persentase Cakupan Wilayah Yang Terkelola Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
4. Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan

Berikut pada Tabel 3.82 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Bidang Budiaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.82. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Bidang BP2HP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang Dibina Perizinan Usahanya	100%	100%	100%
		Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut Yang Dapat Dibina	100%	100%	100%
		Persentase Cakupan Wilayah Yang Terkelola Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Pada Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, berikut merupakan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 :

1. Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang Dibina Perizinan Usahanya dengan capaian 100%, kegiatan yang mendukung indikator tersebut dilaksanakan Rapat Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Ikan Gabus Haruan Skala Industri Provinsi Kalimantan, Rapat Awal Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Ikan Gabus Haruan Skala Industri Provinsi Kalimantan Selatan, Survei Lokasi Pendampingan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rapat Antara Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Ikan Gabus Haruan Skala Industri Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dilaksanakan Rapat Akhir Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Ikan Gabus Haruan Skala Industri Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut Yang Dapat Dibina telah realisasi 100%, indikator kinerja utama ini didukung oleh 4 kegiatan diantaranya yaitu :
 - a. Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut dengan capaian 100%, di Desa Teluk Kemuning Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru, penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut, tali nylon dan sampan pada Kelompok Pantai Raya.
 - b. Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota masih dengan capaian realisasi 100%, kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah dilaksanakan Pengambilan Data dan Peninjauan Tambak Marginal ke Kab. Tanah Bumbu Bumbu dan Pengambilan Data dan Peninjauan Tambak Marginal ke Kab. Kotabaru.
 - c. Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat telah terealisasi 100%, dilaksanakan Monitoring Hama dan Penyakit Ikan ke Kab. Tanah Bumbu dan Kabupaten Barito Kuala.
 - d. Jumlah Pembudidaya Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang terbina telah terealisasi 100%, dilaksanakan Monitoring/ Pemantauan Pembudidaya Ikan ke Kab. Barito Kuala, Pembinaan/Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) ke Kab. Banjar, Pembinaan/Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) ke Kab. Tanah Laut,

Pembinaan/Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) ke Kab. Tanah Bumbu dan Pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) ke Kab. Tanah Bumbu, Monitoring/Pemantauan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Tanah Bumbu, Monitoring/Pemantauan Pembudidaya di Kabupaten Kotabaru.

3. Persentase Cakupan Wilayah Yang Terkelola Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat telah realisasi 100%, yaitu 5 kelompok penerima hibah sebagai berikut :
 - a. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya benih bandeng dan pakan pada Kelompok Indah Rugi Tabunganen, di Desa Tabunganen Pemurus Kabupaten Barito Kuala.
 - b. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya benih bandeng dan pakan pada Kelompok Semangat Baru Tabunganen, di Desa Tabunganen Pemurus Kabupaten Barito Kuala.
 - c. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya benih bandeng dan pakan pada Kelompok Putra Tiger, di Desa Sungai Rasau Kabupaten Tanah Laut.
 - d. Penyerahan Benih Udang Windu pada Klp. Sahabatku dan Klp. Hasrat Bersama, di Desa Api-API Kec. Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu.
4. Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan dengan capaian realisasi 100% dari target Kinerja Utama Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan dari target sebanyak 8 jenis produk pengolahan telah terealisasi 8 jenis produk pengolahan.

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 3.83 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 Kepala Bidang BP2HP

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1.	Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang Dibina Perizinan Usahanya	-	100 %	100 %
	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut Yang Dapat Dibina	-	100%	100%
	Persentase Cakupan Wilayah Yang Terkelola Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	100%	100%
2.	Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan	-	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.84 Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Bidang BP2HP Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Tahun 2023		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Cakupan Wilayah Pembudidayaan Ikan di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Yang Dibina Perizinan Usahanya	0	0	0	100%	100%	100%
	Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut Yang Dapat Dibina	0	0	0	100%	100%	100%
	Persentase Cakupan Wilayah Yang Terkelola Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	0	0	0	100%	100%	100%
2.	Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan	0	0	0	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian							100%
Kategori Capaian							Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya – Upaya Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2023, capaian ke-4 IKU Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan rata-rata sebesar 100,00%.

Sementara itu beberapa hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

🚦 Kegiatan penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Ikan Gabus Haruan Skala Industri Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen, yaitu :

- Dokumen Laporan Tahap Pendahuluan Awal
- Dokumen Laporan Tahap Antara
- Dokumen Laporan Tahap Akhir

✚ Persentase Cakupan Wilayah Budidaya Ikan di Laut Yang Dapat Dibina dengan capaian 100% didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- 1) Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang menerima bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut, tali nylon dan sampan Pada tanggal 16 Mei 2023 di Desa Teluk Kemuning Kec. Pulau Laut Kepulauan Kab. Kotabaru, penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut, tali nylon dan sampan pada Kelompok Pantai Raya.
- 2) Melaksanakan kegiatan penyediaan data dan peninjauan tambak marginal yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
- 3) Melaksanakan kegiatan pertemuan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan, yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu dan di Kabupaten Kotabaru. Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan usaha budidaya perikanan. Pembudidaya ikan disarankan untuk selalu memonitor kesehatan ikan dan kondisi kualitas air lingkungan budidayanya agar penyebaran penyakit dan penurunan kualitas air budidaya perikanan dapat diantisipasi sebelum menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha budidaya perikanan itu sendiri.
- 4) Melaksanakan kegiatan pertemuan/sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) bagi pembudidaya dan petugas/pendamping kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang pesertanya berjumlah 25 orang. Pada tanggal 07 November 2023 di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang dihadiri 25 orang peserta.

✚ Cakupan Wilayah Yang Terkelola Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat telah realisasi 100%, yaitu 5 kelompok penerima hibah sebagai berikut:

- b. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya benih bandeng dan pakan pada Kelompok Indah Rugi Tabunganen, di Desa Tabunganen Pemurus Kabupaten Barito Kuala.
- b. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya benih bandeng dan pakan pada Kelompok Semangat Baru Tabunganen, di Desa Tabunganen Pemurus Kabupaten Barito Kuala

- c. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya benih bandeng dan pakan pada Kelompok Putra Tiger, di Desa Sungai Rasau Kabupaten Tanah Laut.
- d. Penyerahan Benih Udang Windu pada Klp. Sahabatku dan Klp. Hasrat Bersama, di Desa Api-API Kec. Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu.

 Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan dengan capaian realisasi 100% dari target Kinerja Utama Persentase Jenis Produk Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang Memiliki Standar Teknis Yang Ditentukan dari target sebanyak 8 jenis produk pengolahan telah terealisasi 8 jenis produk pengolahan

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 ini, hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran dari pembudidaya ikan tentang penting CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik).
2. Dalam hal CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik), masih banyak Unit-unit pembenihan ikan yang belum bersedia untuk dilakukan sertifikasi CPIB, dikarenakan untuk pendelegasiannya mesti dari DJPB yang membidangi hal tersebut, namun dari segi pembinaan dilakukan seiringan dengan CBIB.
3. Masih kurang pemahamannya mengenai keamanan pangan hasil produk perikanan dari unit usaha budidayanya.
4. Pembinaan yang kurang optimal dari pihak terkait terhadap pembudidaya tradisional yang mana harus lebih memperhatikan terhadap kontaminan dari lingkungan/area sekitar unit usaha budidaya.
5. Terkendalanya bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam aspek permodalan
6. Kurangnya kemampuan manajemen usaha
7. Kurangnya kualitas sumberdaya manusia pengelolanya
8. Kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi untuk pemasar dan pengolah hasil perikanan.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan pembinaan secara terus menerus dan intensif kepada pembudidaya ikan dan pelatihan guna peningkatan mutu produk perikanan budidaya melalui kegiatan pembinaan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan pembinaan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik).

2. Peningkatan daya saing produk dan peningkatan kapasitas SDM UMKM melalui pelatihan/bimtek, fasilitasi peralatan/sarana pengolahan pangan, bantuan permodalan, serta perluasan pemasaran (digital marketing), sehingga dapat menghasilkan produk olahan yang berdaya saing.
3. Koordinasi dengan pembina mutu masing-masing kabupaten/kota, untuk kemudian menyiapkan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan SKP bagi UMKM kabupaten/kota binaan pembina mutu yang memungkinkan memenuhi persyaratan. Kemudian pembina mutu dari provinsi akan melaksanakan pembinaan ke UMKM atau Unit Pengolah Ikan Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan oleh Pembina Mutu Kabupaten/Kota.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Bidang BP2HP maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

VI.2. SASARAN ESELON IV LINGKUP BIDANG BP2HP

VI.2.1. Kepala Seksi Budidaya Perikanan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Budidaya Perikanan terdapat 4 indikator kinerja pada tahun 2023 ini, yaitu :

- Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Resiko
- Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat
- Jumlah Pembudidaya

Berikut pada Tabel 3.86 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Budidaya Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.85. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Budidaya Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Resiko	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	50 Orang	50 Orang	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Seksi Budidaya Perikanan :

Tabel 3.86. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Kepala Seksi Budidaya Perikanan

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Resiko	4 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	Jumlah Pembudidaya	50 Orang	50 Orang	100%
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Budidaya Perikanan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.87. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Budidaya Perikanan Tahun 2023 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Tahun 2023		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Resiko	-	-	4	1	1	100%
2	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	2	2	100%
3	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Yang Teruji Sehat	1	1	1	3	3	100%
4	Jumlah Pembudidaya	25	25	50	50	50	100%
Rata-rata Capaian							100%
Kategori Capaian							Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Upaya – Upaya Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2023, capaian ke-4 IKU Kepala Seksi Budidaya Perikanan rata-rata sebesar 100,00%.

Sementara itu beberapa hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kepala Seksi Budidaya Perikanan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Ikan Gabus Haruan Skala Industri Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen, yaitu :
 - a. Dokumen Laporan Tahap Pendahuluan Awal
 - b. Dokumen Laporan Tahap Antara
 - c. Dokumen Laporan Tahap Akhir
2. Melaksanakan kegiatan penyediaan data dan peninjauan tambak marginal yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
3. Melaksanakan kegiatan pertemuan validasi data statistik budidaya semester II tahun 2023, yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru.
4. Melaksanakan kegiatan pertemuan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan, yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu dan di Kabupaten Kotabaru.

Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan usaha budidaya perikanan. Pembudidaya ikan disarankan untuk selalu memonitor kesehatan ikan dan kondisi kualitas air lingkungan budidayanya agar penyebaran penyakit dan penurunan kualitas air budidaya perikanan dapat diantisipasi sebelum menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha budidaya perikanan itu sendiri.

Pada Tabel 3.88 berikut disajikan perkembangan pelaksanaan bimtek pengelolaan kesehatan ikan/bimtek pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ikan :

Tabel 3.88. Perkembangan Pelaksanaan Bimtek Pengendalian dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan di Kalimantan Selatan

No	Tahun	Kabupaten	Jumlah Peserta
1	2017	Tabalong (30 Orang) Hulu Sungai Utara (30 Orang)	60 Orang
2	2018	Hulu Sungai Tengah (30 Orang) Tapin (30 Orang)	60 Orang
3	2019	Tabalong (30 Orang) Hulu Sungai Utara (30 Orang)	60 Orang
4	2020	-	-
5	2021	Tanah Bumbu (30 Orang) Kotabaru (30 Orang)	60 Orang
6	2022	Barito Kuala (35 Orang) Banjarmasin (35 Orang)	70 Orang
7.	2023	Tanah Bumbu (25 Orang) Kotabaru (25 Orang)	50 Orang

- Melaksanakan kegiatan pertemuan/sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) bagi pembudidaya dan petugas/pendamping kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang pesertanya berjumlah 25 orang. Pada tanggal 07 November 2023 di Desa Sebelimbingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang dihadiri 25 orang peserta.

b. Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023 ini, hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran dari pembudidaya ikan tentang penting CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik).
- Dalam hal CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik), masih banyak Unit-unit pembenihan ikan yang belum bersedia untuk dilakukan sertifikasi CPIB, dikarenakan untuk pendelegasiannya mesti dari DJPB yang membidangi hal tersebut, namun dari segi pembinaan dilakukan seiringan dengan CBIB.
- Masih kurang pemahamannya mengenai keamanan pangan hasil produk perikanan dari unit usaha budidayanya.

4. Pembinaan yang kurang optimal dari pihak terkait terhadap pembudidaya tradisional yang mana harus lebih memperhatikan terhadap kontaminan dari lingkungan/area sekitar unit usaha budidaya

c. Rencana Tindak Lanjut

Melakukan pembinaan secara terus menerus dan intensif kepada pembudidaya ikan dan pelatihan guna peningkatan mutu produk perikanan budidaya melalui kegiatan pembinaan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan pembinaan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik).

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Seksi Budidaya Perikanan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi

VI.2.2. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat 1 indikator kinerja utama pada tahun 2023 ini, yaitu :

Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing

Berikut Kegiatan Pendukung dalam tercapainya Indikator Kinerja Utama pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diantaranya ialah :

- a. Persentase Pertemuan Dalam Rangka Koordinasi Pembina Mutu Daerah
- b. Persentase Kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Dalam Rangka Mendukung Program Penurunan Stunting
- c. Persentase Kegiatan PENAS PETANI NELAYAN ke XVI
- d. Persentase Kegiatan Bazar / Pasar Murah Dalam Rangka Bulan Ramadhan dan Peringatan HBKN
- e. Persentase Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi dan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional

Berikut pada Tabel dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Target 3.89. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi P2HP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Terlaksananya Pembinaan Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	20 Unit Usaha	23 Unit Usaha	115%
Rata-rata Capaian					115%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

Pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, berikut merupakan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 :

Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing, yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama adalah Kegiatan Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi Pra SKP untuk UMKM Kabupaten/Kota telah dilaksanakan Bimbingan Persiapan Pra SKP telah terealisasi sebanyak 115% dengan total sebanyak 23 UMKM/Unit Usaha Pengolahan Ikan sebagai berikut :

1. Kabupaten HSS sebanyak 2 unit usaha
2. Kabupaten Tapin sebanyak 2 unit usaha
3. Kabupaten Kotabaru sebanyak 2 unit usaha
4. Kabupaten Balangan sebanyak 2 unit usaha
5. Kabupaten Tabalong sebanyak 2 unit usaha
6. Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 2 unit usaha
7. Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2 unit usaha
8. Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 unit usaha
9. Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 2 unit usaha
10. Kota Banjarmasin sebanyak 2 Unit Pengolah Ikan,
11. Kabupaten Barito Kuala sebanyak 1 Unit Pengolah Ikan
12. Kota Banjarbaru sebanyak 1 Unit Pengolah Ikan.
13. Kabupaten Banjar sebanyak 1 Unit Pengolah Ikan

Adapun Kegiatan yang mendukung dalam tercapainya Indikator Kinerja Utama pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diantaranya ialah :

- a) Pertemuan Dalam Rangka Koordinasi Pembina Mutu Daerah telah terealisasi 100% dengan mengundang Pembina Mutu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Koordinasi terkait UMKM atau Unit Pengolah Ikan yang akan diusulkan untuk pengajuan persyaratan kelengkapan SKP.
- b) Kegiatan Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Dalam Rangka Mendukung Program Penurunan Stunting terealisasi 100% yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Balangan.
- c) Kegiatan PENAS-PETANI NELAYAN ke XVI terealisasi 100% yang dilaksanakan di Sumatera Barat.
- d) Kegiatan Bazar / Pasar Murah Dalam Rangka Bulan Ramadhan dan Peringatan HBKN terealisasi 150%, dari target 4 kali kegiatan pada tahun 2023 ini terlaksana 6 kali kegiatan.
- e) Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi dan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional terealisasi sebanyak 100%.

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 3.90. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 Kepala Seksi P2HP

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1	Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	28 Unit	23 Unit	100 %
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.91 Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi P2HP Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Tahun 2023		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	0	0	28	20	23	100%
Rata-rata Capaian							100%
Kategori Capaian							Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM atau Unit Pengolah Ikan di Kalimantan Selatan diantaranya adalah aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, kualitas sumberdaya manusia pengelolanya, dan kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi. Adapun strategi penguatan dan pengembangan UMKM atau Unit Pengolah Ikan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing produk dan peningkatan kapasitas SDM UMKM melalui pelatihan/bimtek, fasilitasi peralatan/sarana pengolahan pangan, bantuan permodalan, serta perluasan pemasaran (digital marketing), sehingga dapat menghasilkan produk olahan yang berdaya saing.

Produk olahan yang berdaya saing mampu memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada produk perikanan yang diproduksi, untuk itu UMKM atau Unit Pengolah Ikan harus memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Beberapa kendala masih dihadapi oleh para UMKM atau Unit Pengolah Ikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya salah satu syarat dari terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah tempat produksi harus terpisah dengan dapur rumah tangga. Kebanyakan dari UMKM atau Unit Pengolah Ikan di Kabupaten/Kota dapur produksinya masih belum terpisah, sehingga ini menjadi kendala masih banyaknya UMKM atau Unit Pengolah Ikan di Kabupaten/Kota masih belum memiliki SKP.

Pada tahun 2023, langkah awal yang diupayakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ialah melaksanakan Koordinasi dengan Pembina Mutu masing-masing Kabupaten/Kota, untuk kemudian menyiapkan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan SKP bagi UMKM Kabupaten/Kota binaan Pembina Mutu yang memungkinkan memenuhi persyaratan. Kemudian Pembina Mutu dari Provinsi akan melaksanakan pembinaan ke UMKM atau Unit Pengolah Ikan Kabupaten/Kota yang telah direkomendasikan oleh Pembina Mutu Kabupaten/Kota.

Untuk Indikator Kinerja Utama pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yaitu Jumlah Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing terealisasi sebesar 115%, dari target kinerja utama sebanyak 20 unit usaha terealisasi sebanyak 23 unit usaha.

Berikut disajikan perkembangan pemberian paket bantuan di Seksi Sarana dan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Tabel 3.92. Perkembangan Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing

No.	Tahun	Jumlah Unit Usaha
1.	2017	-
2.	2018	-
3.	2019	-
4.	2020	-
5.	2021	
6.	2022	28
7.	2023	23

Keterangan :

Untuk Tahun 2023 :

23 Unit Usaha Yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing Serta Pemberdayaan Usaha Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman dan Bermutu Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

VI.2.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budiadaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (BP2HP)

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Pada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdapat 2 indikator kinerja pada tahun 2023 ini, yaitu :

- a. Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Berikut pada Tabel 3.93 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.93. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana BP2HP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan.atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	100%
2	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	1 Unit	100%
Rata-rata Capaian					100%
Kategori Capaian					Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

Pada bulan Mei tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan telah selesai dilaksanakan dimana target pada tahun 2023 ini adalah 6 unit sarana pembudidayaan ikan yang berupa paket bantuan benih udang windu, benih ikan bandeng, dan bibit rumput laut yang diserahkan ke kelompok pembudidaya.

Adapun paket bantuan yang diserahkan adalah :

1. 2 unit benih udang windu di Kabupaten Barito Kuala
2. 1 unit benih bandeng di Kabupaten Tanah Laut
3. 2 unit benih udang windu di Kabupaten Tanah Bumbu
4. 1 unit bibit rumput laut di Kabupaten Kotabaru

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tabel 3.94

Tabel 3.94. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Capaian Kinerja %
		2022	2023	
1	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	100 %
2	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0 Unit	1 Unit	100 %
Rata-rata Capaian				100%
Kategori Capaian				Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun – Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya pada Tabel 3.95 :

Tabel 3.95. Perbandingan Realisasi Kinerja Kepala Seksi Sarana dan Prasarana BP2HP Tahun 2023 Dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Tahun 2023		
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	10	5	5	5	100%
2	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	0	0	0	1	1	100%
Rata-rata Capaian							100%
Kategori Capaian							Sangat Memuaskan

Sumber Data : Bidang BP2HP Tahun 2023

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Salah satu permasalahan yang dihadapi pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar di Kalimantan Selatan adalah terbatasnya permodalan usaha. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan pembangunannya menyediakan paket bantuan hibah sarana budidaya bagi Kelompok

Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Bantuan tersebut sifatnya stimulan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas usaha perikanan.

Pada tahun 2023, indikator Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 100,00%. Dan untuk indikator Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut terealisasi sebesar 100,00%.

Sementara itu, untuk pemberian paket bantuan bagi Poklahsar sejak tahun 2020 tidak lagi dialokasikan anggarannya. Dikarenakan adanya pemberlakuan UU 23/2014 dan Permendagri 90/2019 yang berdampak pada pembagian kewenangan pembinaan unit usaha P2HP. Untuk pengelolaan P2HP skala kecil mikro kewenangannya berada di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk unit usaha P2HP skala menengah besar pengelolaannya di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berikut disajikan perkembangan pemberian paket bantuan di Seksi Sarana dan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :

Tabel 3.96. Perkembangan Pemberian Paket Bantuan di Kalimantan Selatan

No.	Tahun	Jumlah Paket Bantuan Yang Diserah terimakan (Kelompok)
1.	2017	40
2.	2018	39
3.	2019	16
4.	2020	-
5.	2021	10
6.	2022	5
7.	2023	6

Keterangan :

Untuk Tahun 2023 :

5 unit paket bantuan dari Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan 1 unit paket bantuan dari Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

VII. SEKRETARIAT

VII.1. SASARAN ESELON III SEKRETARIAT

Tabel 3.97. Perjanjian Kinerja Sekretaris

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasionalkan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Berikut pada Tabel 3.98 dapat dilihat realisasi kinerja terhadap target kinerja yang ditetapkan pada kinerja utama dan indikator kinerja Sekretaris berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.98. Target dan Realisasi Kinerja Sekretaris

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasionalkan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%	100%	100%
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%	100%	100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Berikut disajikan data tentang perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Sekretaris :

Tabel 3.99. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		% Capaian
			2022	2023	
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasionalkan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%	100%	100%
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%	100%	100%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berikut pada Tabel 3.100 disajikan perbandingan realisasi kinerja yang dicapai oleh Sekretaris pada tahun 2023 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya :

Tabel 3.100 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				% Capaian
			2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Berbasis SMART Goals	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Tahunan Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Telah Diversifikasi/Direkonsiliasi Oleh Instansi Terkait	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Unit Kerja Dinas dan UPTD Yang Dapat Dimanfaatkan/ Dioperasionalkan/Digunakan Sesuai Dengan Fungsi/Peruntukkan/ Masterplan Yang Telah Ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ASN Yang Dapat Menerapkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Secara Tertib dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Umum Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang Yang Telah Termanfaatkan Untuk Menunjang Layanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pemenuhan Layanan Jasa Kantor Yang Telah Diberikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik dan Dapat Dimanfaatkan Sebagaimana Mestinya	100%	100%	100%	100%	100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indikator Kinerja Utama yang diemban oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 capaian yang dihasilkan pada tahun 2023 adalah 100%.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Sekretariat maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VII.2. SASARAN ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Tabel 3.101. Target dan Realisasi Kinerja Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan					
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
Sub Bagian Keuangan dan Aset					
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/Bulan	145 Orang/Bulan	100%
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	100%

5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665 Laporan	665 Laporan	100%
7	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
1	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	785 Orang	785 Orang	100%
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%
7	Tersedianya Mebel Untuk Menunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	6 Paket	5,5 Paket	91,67%
8	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	65 Unit	63 Unit	96,92%
9	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
10	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
11	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarnya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	100%

12	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100%
13	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	174 Unit	174 Unit	100%

2) Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi Terkait

Berikut disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 untuk Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat :

Tabel 3.102. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan				
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	16 Dokumen
Sub Bagian Keuangan dan Aset				
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/Bulan	145 Orang/Bulan
2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Dokumen
4	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	8 Laporan
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4 Paket	4 Paket
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	665 Laporan	665 Laporan
7	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
1	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	785 Orang
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	100%	1 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100%	3 Paket
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	100%	1 Paket
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	100%	2 Dokumen
6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	-	4 Unit
7	Tersedianya Mebel Untuk Menunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	-	5,5 Paket
8	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	100%	63 Unit
9	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	12 Laporan
10	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	100%	12 Laporan
11	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarnya Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	27 Unit
12	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	4 Unit
13	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabiliatsi	-	174 Unit

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

IKU Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 IKU tersebut tercapai 100% (Sangat Memuaskan).

Berikut daftar dokumen yang tersusun selama tahun 2023 :

1. Buku LAKIP Tahun 2022
2. Buku LKPj/LPPD Tahun 2022
3. Buku AKI Tahun 2022
4. Buku Nilai Tukar Perikanan Tahun 2022
5. Buku Rancangan Awal RENJA Tahun 2024
6. Buku SAKU Kelautan dan Perikanan Tahun 2022
7. Buku Statistik Kelautan dan Perikanan Tahun 2022
8. Buku Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2022
9. Buku Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2022
10. Buku Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2022
11. Buku Laporan Tahunan Tahun 2022
12. Buku Rancangan Akhir RENJA Tahun 2024
13. Buku Rancangan Akhir RENJA Perubahan Tahun 2023
14. Buku Rancangan Awal RENJA Perubahan Tahun 2023
15. Laporan MONEV TERPADU Tahun 2023
16. Laporan KONSOLIDASI Tahun 2023

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada tahun 2023 ini mempunyai 7 (tujuh) IKU, dan ketujuh IKU tersebut tercapai 100% (Sangat Memuaskan).

Berikut daftar dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Dokumen Laporan Inventarisasi Barang Daerah yang tersusun selama tahun 2023:

1. Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan
 - Laporan Keuangan
 - Laporan Konsolidasi Keuangan
2. Dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - Laporan Rencana Kebutuhan BMD
 - Laporan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan

- Laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB)
- Laporan Barang Persediaan
- Laporan Rekapitulasi Aset

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tahun 2023 ini mempunyai 13 (tiga belas) IKU, dari 13 IKU tersebut ada 2 IKU yang capaiannya hanya sebesar 91,67% yaitu pada IKU jumlah paket mebel yang disediakan dari target sebesar 6 paket hanya terealisasi sebanyak 5,5 paket dan pada IKU jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dari target sebesar 65 unit hanya terealisasi sebanyak 63 unit, hal ini disebabkan oleh pengadaan barang yang tidak bisa direalisasikan karena spek barang tersebut tidak tersedia dipasaran dan harganya melebihi satuan harga barang pada dokumen DPA Perubahan 2023.

Disamping pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 20 (dua puluh) orang untuk periode April dan 3 (tiga) orang untuk periode Oktober. Pelayanan kenaikan pangkat berkala ASN sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, pelayanan cuti pegawai sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang ASN dan 4 (empat) orang non ASN serta pelayanan pensiun sebanyak 6 (enam) orang.

4) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mendukung capaian kinerja di Kepala Sub Bagian Lingkup Sekretariat maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

Penganggaran pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2023 mengalami penyesuaian dari anggaran semula yang tercantum dalam DPA-SKPD TA. 2023.

Pada anggaran APBD TA 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 37.984.683.596 dan pada anggaran perubahan APBD-P TA 2023 berubah menjadi Rp. 43.481.396.796.

Berikut pada Tabel 3.103 disajikan program dan kegiatan beserta anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.103. Program dan Kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Desentralisasi Tahun Anggaran 2023	Pagu Anggaran (Rp)	
		Sebelum	Sesudah
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.407.404.896	31.169.118.096
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.236.851.000	1.776.805.000
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.236.851.000	1.776.805.000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.668.925.896	22.727.661.496
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.336.722.696	22.336.722.696
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	328.203.200	386.938.800
3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	89.854.800	148.195.900
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	89.854.800	148.195.900
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.220.100	184.744.100
3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	115.220.100	184.744.100
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.468.965.600	2.055.134.300
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.814.000	111.209.000
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.495.600	207.034.000
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.292.000	349.292.000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.000.000	85.701.300
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72.108.000	72.108.000

3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	805.256.000	1.229.790.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.705.000	1.385.828.700
3.25.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	139.962.000
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	143.205.000	296.466.700
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.500.000	949.400.000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.712.500	1.296.718.600
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108.137.000	108.137.000
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	651.610.500	651.610.500
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	472.965.000	536.971.100
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.144.170.000	1.594.030.000
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	480.310.000	480.310.000
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	1.000.000.000
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.860.000	113.720.000
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4.186.371.500	4.621.371.500
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.739.793.700	3.939.793.700
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	248.659.000	419.684.000
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.357.912.000	3.386.887.000
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	133.222.700	133.222.700
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	438.081.000	538.081.000
3.25.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	438.081.000	538.081.000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.496.800	143.496.800
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8.496.800	143.496.800
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.469.368.800	2.369.368.800
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	655.715.700	1.155.715.700
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	36.741.700	36.741.700
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	618.974.000	1.118.974.000
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	627.633.600	1.027.633.600
3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	627.633.600	627.633.600
3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	-	400.000.000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	186.019.500	186.019.500
3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	47.291.100	47.291.100
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	94.817.000	94.817.000
3.25.03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	43.911.400	43.911.400
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.180.997.000	1.630.997.000
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	300.000.000	300.000.000
3.25.04.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	300.000.000	300.000.000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	296.655.000	657.115.000
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24.289.000	128.535.300
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	75.520.000	85.980.000

3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48.877.000	130.682.000
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	147.969.000	311.917.700
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	584.342.000	673.882.000
3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	584.342.000	673.882.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.732.572.400	2.182.572.400
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.010.609.500	1.229.084.500
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	730.609.500	949.084.500
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	280.000.000	280.000.000
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	721.962.900	953.487.900
3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	721.962.900	953.487.900
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.007.969.000	1.507.969.000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.007.969.000	1.507.969.000
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	1.007.969.000	1.507.969.000
TOTAL		37.984.683.596	43.481.396.796

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Berikut anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023:

Tabel 3.104 Anggaran dan Realisasi Menurut Program Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Program Prioritas			
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Kesekretariatan	Sekretariat	31.169.118.096	29.874.503.417	95,85	1.294.614.679
2	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	Bidang PRL	4.621.371.500	4.322.160.366	93,53	299.211.134
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Bidang Perikanan Tangkap	2.369.368.800	2.180.040.991	91,01	189.327.809
4	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Bidang BP2HP	3.138.966.000	2.900.651.244	92,46	238.300.756
	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat					
5	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per- UU Yang Berlaku	Bidang PSDKP	2.182.572.400	1.914.456.995	87,72	268.115.405
Total			43.481.396.796	41.191.813.013	94,73	2.289.569.783

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 adalah 6 program, 19 kegiatan dan 41 sub kegiatan, sedangkan pada tahun 2023 ini untuk program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 6 program, 20 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

Berikut perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 3.105. Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tahun 2022			Tahun 2023		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

					Undangan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pengadaan Mebel	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Surat Menyurat			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut sd. 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir			

		Pulau-Pulau Kecil			dan Pulau-Pulau Kecil
		Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan Dalam Sistem Kadaster Laut			
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan

					Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumberdayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh daerah Provinsi dan/atau Manfaat

					atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (DAK)
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya		Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sesuai Dengan Kewenangannya
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk Dikonsumsi atau Digunakan dan Berdaya Saing
Total			Total		
6 Program	19 Kegiatan	41 Sub Kegiatan	6 Program	20 Kegiatan	43 Sub Kegiatan
Total Anggaran			Total Anggaran		
Rp. 31.797.255.507			Rp. 43.481.396.796		

Sumber: Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel (2022, 2023)

Adapun perbandingan struktur anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.106. Perbandingan Struktur Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	2022		2023	
	Belanja Langsung	Jumlah (Rp)	Belanja Langsung	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	18.071.170.065	Belanja Pegawai	21.915.417.109
2	Belanja Barang dan Jasa	8.573.409.300	Belanja Barang dan Jasa	16.248.515.704
	Total	26.644.579.365	Total	38.163.932.813

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 secara umum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari realisasi dan capaian beberapa indikator kinerja utama yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka untuk mencapai terwujudnya misi dan visi yang telah ditetapkan selama 6 (enam) tahun melalui RENSTRA Tahun 2021 – 2026, maka diperlukan kesinambungan dan keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain :

1. Menyusun serta mengefektifkan Pohon Kinerja sebagai landasan dalam penyusunan dokumen kinerja untuk mencapai sinkronisasi antar jenjang/level pada dokumen kinerja;
2. Integrasi indikator kinerja sesuai dengan indikator di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki system pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam system pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala.
2. Melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap pertanggungjawaban kinerja pada masing-masing unit kerja di Dinas dan UPTD.
3. Meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja unit kerja di lingkup Dinas dan UPTD.

LAMPIRAN

